INDO-PACIFIC DEFENSE

VOLUME 48, TERBITAN KE-2, 2023

FORUM

TERAMAT PENTING

Kerja Sama Kemitraan Kemampuan

Penangkalan Terintegrasi

tajuk utama

10 Meningkatkan Penangkalan Strategis
Komando Strategis A.S. memodernisasi kemampuannya

18 Persenjataan Dengan Misi Ganda
Penembakan presisi berbasis darat melindungi wilayah, mendorong penangkalan

24 Operasi Informasi Kunci Penangkalan
Mengubah persepsi pesaing tentang risiko dan biaya

28 Menentang Penindasan
Kritik dan sanksi yang semakin kuat menargetkan perlakuan tidak manusiawi PKT terhadap warga Uyghur

34 Era Perekonomian Baru Tiongkok
Bagaimana kepemimpinan aktivis dan top-down Xi Jinping membahayakan prospek pertumbuhan, membatasi peluang warga

40 Kesadaran Ranah Maritim
Program Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan teknologi dan pelatihan untuk mengamankan jalur perairan Indo-Pasifik dengan lebih baik

44 Transparansi Maritim
HawkEye 360 meningkatkan kesadaran ranah

48 Mengintegrasikan Keunggulan
Pusat respons krisis Indo-Pasifik beradaptasi dengan lingkungan sipil-militer yang berkembang

56 Membongkar Tata Negara Ekonomi Tiongkok
Apa yang terjadi ketika Sabuk dan Jalan Beijing masuk ke Papua Nugini?

bagian-bagian

4 Indo-Pasifik Selayang Pandang

5 Kontributor

6 Seluruh Kawasan
Berita dari Indo-Pasifik

8 Perkembangan Teroris
Mantan pemberontak di Mindanao menyelesaikan penonaktifan senjata

64 Budaya & Adat Istiadat
Di Ujung Selatan Thailand, seniman berusaha mengubah 'citra kekerasan'

66 Renungan
Perkenalkan kecoak cyborg Jepang, merayap ke bencana di dekat Anda

67 Kata Terakhir

DI SAMPUL MAJALAH:
Searah jarum jam dari kiri atas: Latihan Tentara Indonesia dalam Super Garuda Shield 22 di Baturaja, Indonesia; seorang Prajurit Australia mengamankan pantai dalam Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022; Marinir Republik Korea melakukan pendaratan amfibi dalam RIMPAC 2022; Prajurit Jepang dan A.S. berlatih pada sistem peluncur roket multipel HIMARS di Amami, Jepang. ILUSTRASI FORUM, DVIDS, GETTY IMAGES

Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM tentang penangkalan terintegrasi.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperkenalkan penangkalan terintegrasi sebagai hal terpenting dari Strategi Pertahanan Nasional A.S. 2022, yang menggambarkannya sebagai pendekatan baru untuk mencapai penangkalan.

"Penangkalan terintegrasi berarti menggunakan semua kemampuan di semua ranah pertempuran: udara, darat, laut, ruang angkasa, dan siber," kata Austin pada Februari 2022. "Namun yang paling penting, [penangkalan terintegrasi berarti] menggunakan kemampuan dan kapasitas yang ada pada mitra dan sekutu kami."

Menurut Departemen Pertahanan A.S., "Penangkalan terintegrasi memerlukan pengembangan dan penggabungan kekuatan kami untuk dampak maksimum, dengan bekerja secara mulus di seluruh ranah pertempuran, teater, spektrum konflik, instrumen kekuatan nasional A.S. lainnya, serta jaringan aliansi dan kemitraan kami yang tak tertandingi. Penangkalan terintegrasi dimungkinkan oleh kekuatan tempur yang kredibel, disokong oleh penangkalan nuklir yang aman, terlindungi, dan efektif."

Selama masa jabatan Austin, penangkalan terintegrasi makin penting untuk keamanan. "Amerika Serikat berada di ambang fase baru — fase di mana, untuk pertama kalinya, kami menghadapi dua kekuatan nuklir besar sebagai pesaing strategis. Republik Rakyat Tiongkok memperluas dan memodernisasi serta mendiversifikasi kekuatan nuklirnya. Dan Rusia juga memodernisasi dan memperluas persenjataan nuklirnya," kata Austin dalam pidato Desember 2022 dalam upacara pergantian komando di Komando Strategis A.S. (USSTRATCOM) di Pangkalan Angkatan Udara Offutt, Nebraska.

"Kemampuan nuklir kami tidak berada di ruang hampa. Jadi, kami harus mengintegrasikan penangkal nuklir di semua ranah, termasuk ruang angkasa dan dunia maya. Kami juga harus mengurangi risiko eskalasi dalam satu ranah dapat meluas ke ranah lain," lanjut Austin.

USSTRATCOM "bekerja untuk membangun penangkalan yang benar-benar terintegrasi. Dan itu merupakan inti dari Strategi Pertahanan Nasional kami, yang mencakup Tinjauan Postur Nuklir kami," kata Austin, sambil menambahkan, "jenis integrasi itu jauh lebih penting untuk mencegah konflik dan bencana."

Brigadir Jenderal Angkatan Udara A.S. Glenn T. Harris dan Mayor Angkatan Darat A.S. John Yanikov dari USSTRATCOM membuka edisi FORUM ini dengan ikhtisar tentang mengapa penangkalan nuklir tetap menjadi inti dari penangkalan strategis bagi A.S. dan sekutu serta mitranya. Selain itu, mereka menulis bahwa modernisasi kemampuan pertahanan nuklir dan lainnya sangat penting untuk penangkalan yang efektif.

Dalam sebuah artikel terkait, Laksamana Angkatan Laut A.S. Samuel Paparo, komandan Armada Pasifik A.S., memperinci peran operasi informasi dalam penangkalan terintegrasi. Menggabungkan penangkalan dengan informasi membantu sekutu dan mitra mengubah persepsi pesaing tentang risiko dan biaya, jelasnya.

Sementara itu, beberapa artikel menguraikan mengapa agresi Partai Komunis Tiongkok harus ditangkal, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uyghur dan minoritas lainnya di kawasan Xinjiang, Tiongkok barat laut hingga ekspansionisme dan perebutan wilayah di Laut Cina Selatan melalui pemaksaan dan tindakan militer yang memutarbalikkan norma internasional.

Artikel-artikel tambahan mengkaji bagaimana kesadaran ranah maritim dan teknologi yang berkembang, serta kerja sama sipil-militer, berkontribusi pada penangkalan terintegrasi.

Kami berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan regional tentang pentingnya mencapai penangkalan terintegrasi. Kami menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi kami di **ipdf@ipdefenseforum.com** untuk menyampaikan pendapat Anda.

Salam,

Staf FORUM

IPD **FORUM**

Penangkalan Terintegrasi
Volume 48, Terbitan ke-2, 2023

KEPEMIMPINAN USINDOPACOM

JOHN C. AQUILINO
Laksamana, AL A.S.
Komandan

STEPHEN D. SKLENKA
Letnan Jenderal, Pasukan Marinir A.S.
Wakil Komandan

JEFFREY T. ANDERSON
Laksamana Madya, AL A.S.
Direktur Operasi

HUBUNGI KAMI

IPD **FORUM**

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 USA

ipdefenseforum.com

email:
ipdf@ipdefenseforum.com

Indo-Pacific Defense FORUM adalah sebuah majalah militer professional yang diterbitkan triwulanan oleh komandan Komando Indo-Pasifik A.S. untuk menyediakan forum internasional bagi personel militer di kawasan Indo-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan atau sudut pandang komando ini atau lembaga pemerintah A.S. lainnya. Semua artikel ditulis oleh staf FORUM kecuali jika disebutkan lain. Menteri pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S.

ISSN 2333-1593 (cetak)
ISSN 2333-1607 (online)

BRIGADIR JENDERAL GLENN T. HARRIS adalah wakil direktur Operasi Global untuk Komando Strategis Amerika Serikat (USSTRATCOM) di Pangkalan Angkatan Udara Offutt, Nebraska. Dia adalah pemimpin komando untuk operasi nuklir dan bertanggung jawab atas kesiapan sehari-hari komando dan kendali nuklir A.S. serta pasukan penangkal strategis. Dia juga bertanggung jawab untuk menyinkronkan komponen, operasi gabungan dan koalisi, serta mengarahkan pasukan yang ditugaskan untuk mencapai tujuan USSTRATCOM dan nasional.

MAYOR ANGKATAN DARAT A.S. JOHN YANIKOV adalah kepala cabang Operasi Dukungan Informasi Militer (MISO) di Direktorat Operasi Global USSTRATCOM. Sebagai pemimpin komando, dia mengawasi perencanaan, integrasi, dan pelaksanaan MISO. Dia menerima penugasan ke Angkatan Darat melalui Millersville University pada tahun 2007 dan memperoleh gelar magister di bidang studi pertahanan dan strategi dari University of Texas, El Paso, pada tahun 2021. Dia telah bertugas di berbagai posisi, termasuk sebagai komandan kompi dan perwira operasi batalion di Fort Bragg, North Carolina, di bawah Komando Operasi Khusus Angkatan Darat A.S. Ditampilkan pada Halaman 10

MAYOR BRYAN C. NEAL adalah perwira intelijen strategis Angkatan Darat A.S. di Layanan Atase Pertahanan, yang mendukung operasi Departemen Pertahanan A.S. di Oseania dan Filipina. Dia memperoleh gelar magister di bidang intelijen strategis dengan fokus pada Tiongkok dari National Intelligence University pada tahun 2021. Dia adalah perwira artileri lapangan di tingkat taktis dan operasional selama satu dekade, termasuk bertugas sebagai instruktur dukungan tembak di Fires Center of Excellence Angkatan Darat A.S. di Fort Sill, Oklahoma. Ditampilkan pada Halaman 18

DR. SHALE HOROWITZ adalah profesor ilmu politik di University of Wisconsin-Milwaukee. Dia telah meneliti konflik internasional dan etnis, dengan penekanan pada Asia Timur dan Selatan, politik perdagangan dan keuangan internasional, serta politik transisi pasar dan perubahan kelembagaan di negara-negara pascakomunis dan Asia Timur. Dia telah melakukan penelitian di Tiongkok, India, Korea Selatan, Taiwan, Eropa Timur, dan bekas Uni Soviet. Ditampilkan pada Halaman 34

AIYANA PASCHAL adalah pejabat urusan publik di Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance di Hawaii. Paschal sebelumnya adalah pejabat urusan publik di Komando Siber A.S. di Fort Meade, Maryland. Dia bertugas selama enam tahun di Angkatan Laut A.S. sebagai spesialis komunikasi massa, mengenyam pendidikan di Defense Information School dan bertugas di berbagai komando, termasuk di atas kapal induk USS Nimitz, Badan Akuntansi POW/MIA Pertahanan, dan Defense Media Activity Pacific. Ditampilkan pada Halaman 48

PETER CONNOLLY adalah seorang ahli di bidang hubungan internasional, keamanan, dan strategi yang baru-baru ini menyelesaikan disertasinya di Australian National University. Dia bertugas selama 33 tahun sebagai perwira infanteri Angkatan Darat Australia, termasuk dalam layanan operasional di Afganistan, Kepulauan Solomon, Somalia, dan Timor-Leste. Dia juga bekerja di Gedung Parlemen Australia dan Departemen Pertahanan A.S. sebelum mengarahkan keterlibatan internasional untuk Angkatan Darat Australia dan pusat penelitiannya. Ditampilkan pada Halaman 56

Gabung dengan Bahasan ini

KAMI INGIN MENDENGAR DARI ANDA!

Indo-Pacific Defense FORUM melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai upaya keamanan di seluruh kawasan — mulai kontraterorisme, kerja sama internasional, hingga bencana alam.

FORUM ONLINE KINI TERSEDIA DALAM 11 BAHASA!

- Bahasa Mandarin (Sederhana dan Tradisional)
- Bahasa Inggris
- Bahasa Hindi
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Jepang
- Bahasa Khmer
- Bahasa Korea
- Bahasa Rusia
- Bahasa Thailand
- Bahasa Vietnam

Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan konten online ekstensif, dengan artikel baru yang diterbitkan setiap hari di **www.ipdefenseforum.com**

Pengunjung dapat:

- Mengakses konten online eksklusif
- Menengok kembali terbitan sebelumnya
- Mempelajari cara untuk mengajukan artikel
- Meminta berlangganan gratis
- Mengirim umpan balik kepada kami

UNDUH APLIKASI KAMI!

Cari "FORUMNEWS" di iTunes atau Google Play untuk mengunduh aplikasi gratis ini.

FORUM

Mari bergabung dengan kami di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp: @IPDEFENSEFORUM dan Line: @330WUYNT

Lihat sampul belakang untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Polandia dan Korea Selatan Capai Kesepakatan

PESAWAT MILITER SENILAI 45,8 TRILIUN RUPIAH (3 MILIAR DOLAR A.S.)

REUTERS

Polandia menandatangani kesepakatan senilai 45,8 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.) dengan Korea Selatan pada September 2022 untuk pembelian 48 pesawat tempur FA-50 Korea seiring negara Eropa Tengah itu mengambil langkah mendesak untuk meningkatkan kemampuan penangkalan dan pertahanannya di tengah perang Rusia di negara tetangga Ukraina.

Dua kesepakatan untuk pembelian pesawat tempur dan latih Fighting Falcon tersebut, ditampilkan dalam foto, tercapai menyusul kontrak yang ditandatangani sebulan sebelumnya untuk akuisisi tank dan howitzer Korea Selatan senilai 88,7 triliun rupiah (5,8 miliar dolar A.S.) oleh Polandia.

Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak, yang juga merupakan wakil perdana menteri, mengatakan kesepakatan itu mewakili "hari bersejarah lain ketika perspektif baru terbuka di hadapan Angkatan Bersenjata Polandia."

Eom Dong-hwan, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Seoul, mengatakan kontrak itu meningkatkan kerja sama kedua negara. "Sampai baru-baru ini, kami adalah mitra. Sekarang kami dapat mengatakan bahwa kami adalah sekutu," ungkapnya.

Berdasarkan satu perjanjian, senilai 10,7 triliun rupiah (700 juta dolar A.S.), 12 pesawat pertama akan dikirim pada paruh kedua tahun 2023. Kesepakatan kedua, diperkirakan mencapai 35,1 triliun rupiah (2,3 miliar dolar A.S.), adalah untuk 36 pesawat yang akan dikirim antara tahun 2025 dan 2028.

Presiden Polandia Andrzej Duda, yang merupakan komandan tertinggi Angkatan Bersenjata, mengatakan pembelian pesawat tempur FA-50 akan "memungkinkan kami untuk sepenuhnya melepaskan penggunaan MiG-29 dan Su-22 (buatan Soviet)."

Dia mengatakan Seoul melihat kesepakatan itu sebagai "pembuka bagi pesawat tempur Korea untuk memasuki pasar Uni Eropa dan NATO."

The Associated Press

Negara-Negara Indo-Pasifik Luncurkan Pembicaraan Perdagangan Utama

Para menteri ekonomi dari lebih dari sepuluh negara Indo-Pasifik meluncurkan negosiasi pada September 2022 tentang upaya keterlibatan perdagangan regional besar pertama Amerika Serikat dalam hampir satu dekade.

Perwakilan Perdagangan A.S. Katherine Tai mengatakan pembicaraan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik di Los Angeles, California, bertujuan untuk mengatasi tantangan masa depan dan mencapai "pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan" di kawasan itu.

Presiden A.S. Joe Biden meluncurkan inisiatif tersebut dalam perjalanan ke Tokyo pada Mei 2022.

Tai, yang memimpin pembicaraan dengan Menteri Perdagangan A.S. Gina Raimondo, mengatakan inisiatif ambisius itu mengalami kemajuan. Pembicaraan tersebut menyertakan para menteri dari Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Bersama dengan A.S., para peserta mewakili sekitar 40% dari produk domestik bruto global.

"Kerangka kerja ini akan menjadi model yang tahan lama untuk diikuti oleh seluruh dunia," kata Tai, sambil menambahkan hal itu akan membawa nilai ekonomi bagi usaha kecil. Dia mengatakan inisiatif tersebut akan menargetkan masalah seperti ekonomi digital, tenaga kerja, lingkungan, pertanian, dan perdagangan. (Foto: Perwakilan Dagang A.S. Katherine Tai, kiri, dan Sekretaris Perdagangan A.S. Gina Raimondo menghadiri Pertemuan Menteri Ekonomi Indo-Pasifik di Los Angeles, California, pada September 2022.)

AFP/GETTY IMAGES

Mengutip "kemajuan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir," Raimondo mengatakan inisiatif itu dapat mengarah pada rantai pasokan yang lebih stabil dan tangguh, sekaligus mempercepat pekerjaan teknologi energi bersih dan komitmen antikorupsi. Reuters

FILIPINA DAN SINGAPURA PERTEGAS HUBUNGAN PERTAHANAN DAN STABILITAS MARITIM

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengakhiri tur ke dua negara Asia Tenggara di Singapura pada September 2022. Di sana, dia dan para pemimpin pemerintah sepakat untuk meningkatkan kerja sama kontraterorisme dan menegaskan pentingnya perdamaian di Laut Cina Selatan.

Marcos tiba di Singapura setelah kunjungan kenegaraan ke Indonesia — perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden sejak pemilu Mei 2022.

Marcos, bersama dengan Presiden Singapura Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. (Foto: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Louise Araneta-Marcos menghadiri upacara pemberian nama anggrek untuk menghormati mereka di Taman Anggrek Nasional Singapura pada September 2022.)

REUTERS

"Para pemimpin menyambut baik kerja sama yang luas dan kuat antara kedua negara, termasuk dalam perdagangan dan investasi, kontraterorisme, perawatan kesehatan, dan kerja sama digital," ungkap sebuah pernyataan bersama.

Mereka juga menegaskan kembali hubungan bilateral dan pertahanan yang telah berlangsung lama dan menyambut baik penandatanganan perjanjian antara militer mereka untuk membentuk tim gabungan yang berbasis di Singapura guna berbagi informasi kontraterorisme.

Para pemimpin juga membahas persaingan klaim Laut Cina Selatan, serta krisis politik yang makin dalam di Myanmar hampir dua tahun setelah kudeta militer.

Para pemimpin sepakat tentang pentingnya "penyelesaian sengketa secara damai tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982," demikian menurut pernyataan itu.

Mereka juga menekankan perlunya memajukan lingkungan yang kondusif untuk negosiasi pedoman perilaku di Laut Cina Selatan. Benar News

Angkatan Laut India Lakukan Commissioning Kapal Induk Terbesar dalam Upaya Mendorong Pertahanan Dalam Negeri

India melakukan commissioning kapal induk buatan dalam negeri pertamanya pada September 2022, yang menggarisbawahi upaya New Delhi untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna memasok militer yang dikerahkan di dua perbatasan yang diperdebatkan.

Setelah konstruksi dan pengujian selama 17 tahun, Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan commissioning INS Vikrant, ditampilkan dalam foto — kapal induk operasional kedua Angkatan Laut dan kapal perang terbesar yang pernah dibuat di India — di Cochin Shipyard Ltd. di Kochi, Kerala.

"Hari ini, India telah bergabung dengan negara-negara di dunia yang dapat memproduksi kapal induk besar dengan teknologi pribumi," kata Modi. "Ini adalah simbol potensi pribumi, sumber daya pribumi, dan keterampilan pribumi."

Dirancang untuk menampung awak yang terdiri atas 1.600 orang dan 30 pesawat, INS Vikrant awalnya akan membawa pesawat MiG-29K rancangan Rusia yang sudah beroperasi dari kapal induk India lainnya, INS Vikramaditya, yang dibeli India dari Rusia.

Dua produsen, Boeing yang berbasis di Amerika Serikat dan Dassault Prancis, berupaya memasok lebih dari dua puluh jet ke India untuk INS Vikrant.

India adalah salah satu importir senjata terbesar di dunia, yang membelanjakan 189,8 triliun rupiah (12,4 miliar dolar A.S.) antara tahun 2018 dan 2021, tetapi negara tersebut telah berusaha mengembangkan kemampuan manufaktur sendiri sebab pemasok utama Rusia menghadapi sanksi atas invasi tidak beralasan ke Ukraina.

India telah mengidentifikasi sekitar 8.000 barang pertahanan impor senilai sekitar 15.316,9 triliun rupiah (1 triliun dolar A.S.) yang ingin diproduksi oleh perusahaan domestik, demikian menurut Kementerian Pertahanan.

"India bekerja dengan segenap kekuatannya untuk menjadi mandiri," kata Modi, yang merujuk pada pesawat tempur ringan dan artileri Tejas yang dibuat di dalam negeri.

INS Vikrant akan memungkinkan Angkatan Laut India untuk mengoperasikan kapal induk di tiap pesisir, di samping 10 kapal perusak, 12 fregat, dan 20 korvet.

"Masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan Samudra Hindia telah lama diabaikan," kata Modi. "Namun saat ini, area ini adalah prioritas pertahanan utama bagi negara kami." Reuters

MANTAN PEMBERONTAK SERAHKAN SENJATA

Mantan pemberontak di Mindanao menyelesaikan penonaktifan senjata

BENAR NEWS

Mantan pemberontak separatis di Filipina selatan menyerahkan ribuan senjata api sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan pemerintah pusat negara itu, demikian yang diumumkan pemimpin mereka pada akhir September 2022.

Murad Ebrahim, juga dikenal sebagai Ahod Balawag Ebrahim, mengumumkan hal tersebut dalam pembukaan sesi parlemen di Kawasan Otonomi Bangsamoro di Mindanao ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengunjungi kawasan selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim di Filipina yang mayoritas beragama Katolik dan berbicara kepada anggota legislatif kawasan itu.

Sekitar 5.500 mantan pejuang berencana untuk menyerahkan sekitar 2.400 senjata dalam fase terakhir penonaktifan, kata Murad. "Kami berkomitmen untuk mempertahankan momentum dan kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami," katanya dalam upacara yang dihadiri oleh Marcos.

Murad, yang bertanggung jawab atas otoritas transisi di kawasan itu, memimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF), mantan kelompok separatis bersenjata yang menandatangani kesepakatan damai dengan Manila delapan tahun lalu. Pakta yang mengakhiri pemberontakan MILF selama puluhan tahun itu menetapkan bahwa mantan pemberontak harus menyerahkan senjata mereka.

Proses itu seharusnya selesai dalam tiga fase, dimulai pada tahun 2019, tetapi terganggu oleh pandemi COVID-19. MILF telah menyerahkan lebih dari 5.000 senjata api, demikian menurut angka pemerintah. Departemen Pertahanan Nasional Filipina memperkirakan mantan gerilyawan itu memiliki sekitar 40.000 senjata api.

Di bawah penonaktifan tersebut, tiap mantan pejuang yang menyerahkan senjata akan menerima

Murad Ebrahim, ketua Front Pembebasan Islam Moro, telah menyerukan kepada para mantan pemberontak untuk menyerahkan senjata mereka sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.
GETTY IMAGES

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., tengah, berbicara dengan Murad Ebrahim saat Nur Misuari, ketiga dari kiri, melihat selama sesi parlemen di Kawasan Otonomi Bangsamoro pada September 2022. GETTY IMAGES

pembayaran tunai, termasuk dana untuk pendidikan.

Meski tidak mendukung Marcos dalam pemilihan umum Mei 2022, Murad meyakinkan Marcos akan kerja sama dan dukungannya. Murad menuduh ayah Marcos yang bernama sama dan militer di bawah mendiang diktator tersebut menggerebek daerah Muslim dan membantai masyarakat.

'KEADILAN, KEMAJUAN, PERDAMAIAN BERSEJARAH'

Marcos berbicara tentang komitmennya terhadap perdamaian di kawasan ini. "Sebagai presiden Anda, saya menjamin, Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA), dan semua rakyat Bangsamoro akan komitmen penuh dan tak tergoyahkan pemerintahan ini terhadap proses perdamaian," ungkapnya dalam rapat pleno tersebut .

"Jalan menuju perdamaian abadi selalu dalam pembangunan. Namun kita menempuh jalan ini bersama-sama. Dan kita berjalan bukan karena itu mudah. Kita menempuh jalan ini bersama-sama karena meski dengan kesulitannya, kita tahu bahwa di akhir perjalanan ada keadilan, kemajuan, perdamaian, dan stabilitas bersejarah, serta persatuan yang telah lama dicita-citakan oleh rakyat di negara kita," tambahnya.

Marcos mengatakan pemerintahannya akan mendorong pembangunan sosial ekonomi dan intervensi untuk memajukan perdamaian di daerah yang terkena dampak konflik selama beberapa dekade. "Saya mendorong BTA untuk meloloskan langkah-langkah yang akan mengamankan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam perawatan kesehatan, perikanan, transportasi, infrastruktur digital, dan tata kelola elektronik," ungkapnya.

Kepemimpinan MILF juga mengundang Nur Misuari, pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) untuk menghadiri sesi parlemen. MILF memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1978. MNLF menandatangani pakta perdamaian sendiri dengan pemerintah pada tahun 1996 dan Misuari kemudian menjadi gubernur kawasan otonomi Muslim itu. Akan tetapi, pemerintah menganggap perjanjian itu gagal.

Misuari kemudian memberontak terhadap pemerintah, dan MNLF mengepung Kota Zamboanga selatan pada tahun 2013, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Ketika pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte, menjabat pada tahun 2016, dia membersihkan Misuari dari tuduhan pemberontakan dalam upaya untuk memadamkan ketidakpuasan warga Muslim.

Pada akhir September 2022, Misuari berdiri di atas panggung bersama Murad, dan kedua mantan pejuang itu berpelukan di depan Marcos. "Kami mengulurkan tangan kepada MNLF karena kami berjanji untuk bekerja sama demi persatuan Bangsamoro," kata Murad.

MENINGKATKAN

PENANGKALAN STRATEGIS

ILUSTRASI FORUM

KOMANDO STRATEGIS A.S. MEMODERNISASI KEMAMPUANNYA

BRIGADIR JENDERAL GLENN T. HARRIS/ANGKATAN UDARA A.S. DAN **MAYOR JOHN YANIKOV**/ANGKATAN DARAT A.S., KOMANDO STRATEGIS A.S.

Ada alasan mengapa penangkalan nuklir tetap menjadi misi terpenting dalam militer Amerika Serikat. Laksamana Angkatan Laut A.S. Charles Richard, mantan komandan Komando Strategis A.S. (USSTRATCOM), komando yang bertanggung jawab untuk menangkal serangan strategis dan memberikan tanggapan yang menentukan jika penangkalan gagal, menjelaskan: "Setiap rencana operasional di Departemen Pertahanan A.S. (DOD), dan setiap kemampuan lain yang kami miliki, bertumpu pada asumsi bahwa penangkalan strategis akan dapat bertahan. Dan jika penangkalan strategis, dan khususnya penangkalan nuklir, tidak dapat bertahan, tidak ada rencana kami yang lain dan tidak ada kemampuan lain yang kami miliki, yang akan berjalan sesuai rencana."

Untuk memastikan penangkalan nuklir tetap kredibel sebagai landasan keamanan nasional A.S., penangkalan nuklir harus menjalani modernisasi kritis terhadap sistem senjata tritunggal tradisionalnya — platform darat, laut, dan udara yang dapat meluncurkan senjata nuklir. Selain itu, berkembang dari pendekatan operasional konvensional untuk penangkalan menjadi konsep penangkalan terintegrasi yang lebih kuat akan lebih membantu A.S. mempertahankan kemampuan nuklirnya yang kredibel untuk masa mendatang dan memastikan stabilitas di seluruh dunia. Dalam konsep ini, kemampuan tritunggal nuklir terkait dan digabungkan dengan kemampuan strategis lainnya seperti pertahanan siber, ruang angkasa, serta rudal, dan bahkan akademisi sipil, industri, dan sekutu.

Penangkalan nuklir dihasilkan dari pemahaman bersama di antara pesaing bahwa masing-masing pihak memiliki kemampuan yang siap pakai dan dapat diandalkan untuk merespons serangan nuklir dengan cara yang sama. Komponen tradisional utama untuk mempertahankan penangkalan nuklir adalah menerjunkan sistem senjata yang layak. Tritunggal nuklir A.S. saat ini terdiri dari 14 kapal selam rudal balistik (SSBN) yang dipersenjatai dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), 400 rudal balistik antarbenua (ICBM) berbasis darat, dan 60 pesawat pengebom berat berkemampuan nuklir. Secara kolektif, tritunggal A.S. berusaha untuk memastikan tidak ada musuh yang meyakini bahwa mereka dapat meluncurkan serangan strategis, dalam keadaan apa pun, yang meniadakan kemampuan A.S. untuk merespons dan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diterima. Demi tujuan ini, tiap kaki tritunggal memberikan atribut yang unik dan saling melengkapi, sehingga pasukan strategis A.S. menjadi responsif, dapat bertahan, dan fleksibel.

Pesawat pengebom B-2 Spirit Angkatan Udara A.S. yang dikerahkan dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri, mendarat di Royal Air Force Fairford di Britania Raya dalam demonstrasi keamanan global. SERSAN MIGUEL LARA III/ANGKATAN UDARA A.S.

ICBM Minuteman III merupakan kaki yang paling responsif dari tritunggal nuklir. Sejak tahun 1959, rudal Minuteman tetap waspada sepanjang waktu,

Rendering kapal selam rudal balistik kelas Columbia yang akan menggantikan armada kelas Ohio Angkatan Laut A.S.
ANGKATAN LAUT A.S.

menyediakan komponen cepat tanggap dari program penangkalan strategis Amerika. ICBM tersebar di antara 400 silo bawah tanah yang diperkeras — dengan tambahan 50 silo yang dijaga dalam status "hangat" — yang ditugaskan ke beberapa pangkalan militer, menghadirkan masalah penargetan bagi musuh mana pun. Sifat ICBM A.S. yang diperkeras dan tersebar mengharuskan musuh untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap tanah air A.S. supaya memiliki kesempatan untuk menonaktifkan semua ICBM, sehingga meningkatkan penangkalan.

Persenjataan Minuteman III memanfaatkan pendekatan pembaruan "singkirkan dan ganti" rutin yang memungkinkannya mencapai tingkat peringatan 100% sejak pertama kali dikerahkan. Sistem komunikasi yang aman memberi presiden dan menteri pertahanan A.S. kontak langsung dengan tiap awak peluncuran yang sangat andal dan hampir seketika. Awak peluncuran di pusat kendali melakukan peringatan terus-menerus dengan semua situs peluncuran rudal jarak jauh. Apabila kemampuan komando hilang antara pusat kendali peluncuran dan fasilitas peluncuran rudal jarak jauh, pesawat pusat kendali peluncuran udara E-6B yang dikonfigurasi secara khusus akan otomatis mengambil komando dan kendali rudal yang terisolasi. Awak tempur rudal udara akan melaksanakan perintah presiden, sehingga kaki ICBM berbasis darat dari tritunggal juga dapat bertahan.

SILUMAN DAN PRESISI

Kaki berbasis laut dari tritunggal nuklir, di mana SSBN kelas Ohio berfungsi sebagai platform peluncuran yang tidak terdeteksi, adalah yang paling dapat bertahan. SSBN dirancang untuk patroli panjang siluman dan presisi pengiriman hulu ledak nuklir. Rata-rata, kapal selam tersebut menghabiskan waktu 80 hari di laut, diikuti oleh 35 hari di pelabuhan untuk pemeliharaan. Tiap kapal selam memiliki dua awak, Biru dan Emas, yang berpatroli secara bergantian. Ini memaksimalkan ketersediaan strategis kapal selam, mengurangi jumlah kapal selam yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan strategis, dan memungkinkan pelatihan, kesiapan, dan moral awak yang optimal. Tiap SSBN membawa hingga 24 SLBM dengan beberapa hulu ledak yang ditargetkan secara independen. Rudal Trident II D5, yang memiliki jangkauan 7.000 kilometer, memungkinkan A.S. untuk membuat aset musuh yang diperkeras dan berharga menjadi berisiko. SSBN sangat mobil dan dapat dipindahkan ke berbagai titik peluncuran untuk menghindari masalah penerbangan lintas, sehingga memberikan jaminan tambahan kepada sekutu dan meningkatkan fleksibilitas operasional.

Pesawat pengebom adalah kaki yang paling fleksibel dari tritunggal nuklir A.S. Terdiri dari pesawat B-52H Stratofortress dan B-2A Spirit, platform udara menyediakan kemampuan serangan nuklir dengan

cepat di mana saja di dunia sekaligus menghindari pertahanan canggih sebagian besar musuh. Pesawat pengebom A.S. memiliki jangkauan yang hampir tak terbatas, mengingat kemampuan pengisian bahan bakar di tengah udara dan, ketika dikombinasikan dengan jangkauan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara (ALCM), dapat mengancam persentase target yang tinggi di dalam wilayah musuh. Mereka dapat mencapai target potensial apa pun di seluruh dunia dari pangkalan A.S., atau dikerahkan selama masa damai, krisis, atau konflik — sebuah pengingat nyata bagi musuh potensial akan komitmen A.S. untuk membela keamanan sekutu dan mitranya.

Kedua jenis pesawat pengebom dapat membawa senjata nuklir dan konvensional yang disesuaikan dengan misi. B-52 dapat menjatuhkan atau meluncurkan rangkaian terluas senjata dalam arsenal A.S., termasuk bom gravitasi dan klaster, rudal presisi terpandu, dan amunisi serangan langsung gabungan. B-2 memberikan fleksibilitas penetrasi yang tak tertandingi. Karakteristik silumannya memberikan kemampuan unik untuk menyusup ke dalam pertahanan musuh yang paling canggih dan mengancam target yang dijaga dengan paling ketat. Pesawat pengebom juga dapat dibongkar muat dalam waktu sangat singkat, sehingga memberi kepemimpinan nasional kemampuan untuk membatalkan serangan setelah pesawat lepas landas.

LANDASAN PAMUNGKAS

Bersama-sama, kekuatan nuklir tersebut adalah landasan pamungkas keamanan nasional A.S. Komitmen pemerintah A.S. untuk memodernisasi tritunggal nuklir lebih lanjut menggambarkan hal ini. Meski tiap sistem senjata menerima pembaruan reguler dan rutin untuk memenuhi perubahan teknologi dan persyaratan misi yang berkembang, ketiga kaki harus dimodernisasi untuk memastikan mereka mempertahankan kemampuan penangkalnya. Ini berarti platform yang ada akan diganti dengan sistem senjata baru atau benar-benar dirombak dan dibekali dengan teknologi terbaru. Rekapitalisasi kekuatan nuklir seperti itu sedang berlangsung dan selama 20 tahun ke depan akan terdiri dari, pada titik tertinggi, hingga sekitar 3,7% dari anggaran DOD.

Pembaruan sebelumnya dan yang sedang berlangsung untuk Minuteman III telah memperluas opsi penargetan rudal, sekaligus meningkatkan akurasi dan kemampuan bertahan. Namun, Angkatan Udara A.S. telah menetapkan bahwa melanjutkan perpanjangan siklus hidup Minuteman III akan menghabiskan biaya yang hampir sama dengan ICBM pengganti. Selain itu, ICBM baru akan lebih baik dalam memenuhi persyaratan masa depan sekaligus menurunkan biaya keberlanjutan selama siklus hidupnya. Oleh karena itu, DOD telah menyatakan masa depan ICBM adalah program Sentinel.

Program Sentinel akan menampilkan arsitektur modular yang dapat menggabungkan teknologi berkembang untuk beradaptasi dengan lingkungan ancaman yang berkembang pesat. Ini akan menurunkan biaya dan membantu program beroperasi dengan baik hingga tahun 2070-an. Program ini juga akan memodernisasi fasilitas peluncuran, meningkatkan komando dan kendali, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan, dengan peningkatan yang dimulai pada tahun 2029.

Kaki berbasis laut dari tritunggal nuklir A.S. juga dijadwalkan untuk mendapatkan keuntungan dari sistem senjata baru dan yang diperbarui. Setelah melayani lebih lama daripada kapal selam bertenaga nuklir A.S. lainnya, 14 SSBN kelas Ohio akan digantikan oleh setidaknya 12 SSBN kelas Columbia. Proyek ini akan membawa kemajuan dalam navigasi, kemampuan manuver, komando dan kendali, serta teknologi penghening. Kelas Columbia, yang diharapkan menjadi kapal selam paling siluman hingga saat ini, akan mengusung fitur reaktor nuklir yang tidak memerlukan pengisian bahan bakar midlife, sehingga mengurangi biaya operasional sementara tetap memenuhi persyaratan misi.

Rendering pesawat pengebom B-21 Raider di Pangkalan Angkatan Udara Ellsworth, South Dakota, salah satu pangkalan yang menampung pesawat siluman baru Angkatan Udara A.S.
NORTHROP GRUMMAN

Kapal selam kelas Columbia A.S. dan kelas Dreadnought Britania Raya akan membawa SLBM Trident II D5 saat ini, sehingga memberi sekutu interoperabilitas yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dengan meniadakan kebutuhan akan desain kompartemen rudal yang berbeda. SSBN kelas Columbia, yang awalnya akan membawa 16 SLBM Trident II D5, dirancang untuk beroperasi hingga tahun 2080-an. SLBM Trident II D5 akan beroperasi hingga tahun 2040-an.

Sementara itu, kaki berbasis udara dari tritunggal nuklir A.S. mengganti satu jenis pesawat pengebom dan

Sebuah rudal balistik antarbenua Minuteman III tanpa hulu ledak diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Ruang Angkasa Vandenberg di California dalam uji coba pada tahun 2020.
ANGKATAN UDARA A.S.

memperbarui yang lain. B-52, yang awalnya dikerahkan pada tahun 1961, telah mengalami perpanjangan usia dan upgrade serta dijadwalkan untuk tetap beroperasi setelah tahun 2040. B-2 akan dilengkapi pada pertengahan 2020-an dan akhirnya digantikan oleh B-21 Raider, yang diperkenalkan Angkatan Udara A.S. pada akhir 2022. B-21 adalah pesawat pengebom siluman generasi berikutnya yang dirancang untuk jarak jauh, sangat dapat bertahan, dan mampu membawa persenjataan konvensional dan nuklir. Dengan rencana inventaris minimum 100 pesawat, B-21 akan bergabung dengan tritunggal nuklir negara ini sebagai opsi penangkal yang fleksibel.

Selain itu, untuk mendukung kaki berbasis udara dari tritunggal nuklir, ALCM AGM-86B, yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1982 dan dirancang untuk mempertahankan diri dari ancaman Soviet, akan digantikan oleh rudal standoff jarak jauh. Rudal jelajah siluman akan memiliki akurasi, jangkauan, dan keandalan yang ditingkatkan dari generasi ALCM sebelumnya, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan misi sekaligus mengurangi risiko bagi awak pesawat.

Efektivitas tritunggal nuklir A.S. tidak hanya akan ditentukan oleh modernisasi sistem persenjataannya, tetapi juga oleh modernisasi sistem komando, kendali, dan komunikasi nuklir (NC3) yang aman. NC3 adalah bagian yang tak terpisahkan untuk memastikan bahwa senjata nuklir tersedia untuk penggunaan instan dan disengaja, tetapi tidak pernah digunakan secara keliru. Sistem NC3 melakukan lima fungsi penting: deteksi, peringatan, dan karakterisasi serangan; perencanaan nuklir adaptif; konferensi pengambilan keputusan; menerima perintah presiden; dan memungkinkan manajemen pasukan. Sistem ini mencakup sensor berbasis terestrial dan ruang angkasa yang memantau ancaman di dunia, dan arsitektur komunikasi yang menghubungkan para pengambil keputusan negara ini dengan kekuatan nuklirnya dalam kondisi apa pun.

Untuk melengkapi kemampuan baru tritunggal nuklir, sistem NC3 sedang ditingkatkan ke NC3 Next, yang digambarkan oleh Richard, mantan komandan USSTRATCOM, sebagai inisiatif perbaikan bergulir untuk semua aspek jaringan yang kompleks. Beberapa platform NC3 dikembangkan pada tahun 1980-an dan, sejak itu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia telah mengembangkan kemampuan yang dapat mengancam sistem warisan. NC3 Next akan menyajikan lebih dari 200 platform, mulai dari radio dan terminal yang tertanam di sekitar 60 sistem hingga satelit yang digunakan untuk mengirim komunikasi strategis terenkripsi ke kapal selam nuklir, serta pesawat Pos Komando Lintas Udara E-6B atau pesawat Pusat Operasi Lintas Udara Nasional E-4B, yang dikenal sebagai "pesawat Doomsday," yang akan mengambil alih komando apabila sistem berbasis darat dinetralkan.

Salah satu nodus utama dari sistem ini telah dimodernisasi. Pada tahun 2019, USSTRATCOM membuka Command and Control Facility (C2F) di Pangkalan Angkatan Udara Offutt di Nebraska. Sebagai jantung komando nuklir Amerika Serikat, fasilitas ini merupakan langkah pertama dalam memodernisasi seluruh upaya nuklir dan akan mendukung modernisasi semua aset strategis lainnya, seperti tritunggal nuklir dan NC3.

Para pemimpin senior dari lebih dari sepuluh negara dan tiga organisasi internasional berkumpul dalam seminar Nimble Titan di Marine Establishment Amsterdam di Belanda untuk membahas pertahanan rudal multinasional. DOTTIE WHITE/ANGKATAN DARAT A.S.

Fasilitas seluas 85.100 meter persegi senilai 21,5 triliun rupiah (1,4 miliar dolar A.S.) itu diawaki oleh lebih dari 3.000 personel dan memiliki lebih dari 1.000 kilometer kabel teknologi informasi untuk mendukung kelayakan dan kredibilitas jangka panjang dari kekuatan penangkal strategis Amerika Serikat. C2F dirancang untuk berkembang seiring dengan ancaman dan kemampuan yang muncul, sehingga memungkinkan A.S. untuk beradaptasi dan tetap fleksibel di masa depan.

PENANGKALAN TERINTEGRASI

Investasi A.S. dalam memodernisasi sistem senjata strategisnya berusaha untuk menjaga keseimbangan, mengingat belanja pertahanan tingkat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Rusia untuk memodernisasi kekuatan konvensional dan nuklir mereka. Senjata nuklir menjadi aspek yang lebih penting dari strategi militer Tiongkok dan tetap menjadi aspek dasar dari Rusia. PKT, menurut Richard, sedang mengalami "pelarian nuklir" — berada di jalur untuk meningkatkan hulu ledak nuklirnya dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat, pada tahun 2030 sementara juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas sistem pertahanan rudalnya. Kementerian pertahanan Rusia telah mengatakan bahwa 90% dari kekuatan nuklir strategisnya telah dimodernisasi dalam beberapa tahun terakhir.

Meski Rusia dan PKT masing-masing memiliki tritunggal nuklir, "persediaan nuklir suatu negara adalah ukuran mentah dari kemampuan keseluruhannya," Richard memperingatkan. "Kita harus mempertimbangkan sistem penyampaian, akurasi, jangkauan, kesiapan, pelatihan, konsep operasi, dan banyak hal lainnya untuk sepenuhnya memahami apa yang mampu dilakukan suatu negara. Ya … kami memiliki persediaan yang lebih besar daripada yang dimiliki Tiongkok saat ini. Namun dua pertiga dari yang kami miliki secara operasional tidak tersedia bagi saya akibat kendala perjanjian. Dan saya harus menangkal Rusia dan lainnya, termasuk pencilan seperti Korea Utara, dengan apa yang kami miliki, semua pada saat yang sama." Oleh karena itu, segala perbandingan dengan Perang Dingin bipolar, di mana A.S. berada dalam paritas nuklir dengan hanya satu negara, kurang memadai. Lingkungan strategis saat ini ditandai oleh dua rekan kapabel yang ingin mengubah tatanan dunia, dan A.S. bersama sekutunya berusaha mempertahankan tatanan berbasis aturan itu. RRT dan Rusia dapat meningkatkan konflik secara sepihak ke tingkat permusuhan apa pun, dalam ranah apa pun, di lokasi geografis mana pun, kapan pun, menurut Richard.

Sebuah pencegat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) diluncurkan dalam sebuah uji coba. BADAN PERTAHANAN RUDAL A.S.

Oleh karena itu, wajib untuk melihat penangkalan sebagai lebih dari modernisasi sistem senjata tritunggal nuklir dan NC3. Selain itu, negara-negara pesaing terus mengembangkan kemampuan yang menentang ranah dan batas tradisional. Pandangan penangkalan yang ditingkatkan dan diperluas melihat di semua ranah, termasuk pertahanan rudal terintegrasi (IMD), ruang angkasa dan siber, serta memahami bagaimana kemitraan, seperti kemitraan dengan sekutu atau dengan basis intelektual dan industri suatu negara, diperlukan untuk mendukung kemampuan masa depan. Pendekatan penangkalan terintegrasi ini memberikan fleksibilitas melekat yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang disesuaikan bagi semua musuh.

Mengintegrasikan pertahanan rudal ke dalam tritunggal nuklir, NC3 Next dan kebijakan nuklir nasional meningkatkan kemampuan dan opsi, dan semoga mencegah konflik apa pun menjadi nuklir. IMD adalah misi penting dan berkelanjutan, baik di masa damai, krisis, atau konflik, yang membantu melindungi wilayah, penduduk, dan pasukan terhadap serangan udara dan rudal. A.S. saat ini menggunakan tiga sistem pertahanan rudal tingkat teater untuk menargetkan rudal balistik jarak pendek, menengah, dan intermediat yang datang untuk mempertahankan wilayah tanah air dan regional. Ini adalah sistem Patriot Advanced Capability (PAC-3) dan THAAD berbasis darat, serta sistem Aegis berbasis laut, meski Aegis Ashore juga dapat digunakan di darat. Tiap sistem menargetkan roket atau rudal dalam fase terminalnya — setelah hulu ledak masuk kembali ke atmosfer — menggunakan sistem radar dan satelit untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan melacak ancaman.

Ketika dikerahkan dengan tepat, sistem IMD menyediakan berbagai opsi sekaligus membuat musuh tidak dapat menggunakan serangan rudal untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapainya, pertahanan rudal menetapkan penangkalan yang lebih kredibel dengan mendorong pengekangan musuh. Selain itu, program pertahanan rudal yang kuat dan dapat diandalkan membebankan biaya pada pesaing dengan memaksa mereka untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya pada persenjataan rudal.

RRT dan Rusia sedang mengembangkan platform canggih untuk menantang arsitektur radar berbasis terestrial saat ini, seperti Zircon penggunaan ganda Rusia dan kendaraan luncur hipersonik Tiongkok. Untuk mengatasi ketidakseimbangan potensial dalam kemampuan, A.S. sedang mengembangkan Pencegat Generasi Berikutnya, pencegat luncur hipersonik, dan laser berenergi tinggi serta teknologi energi terarah lainnya untuk melengkapi sistem pertahanan rudal yang ada dan melawan ancaman rudal di masa depan.

Peringatan dini rudal canggih semua jenis juga harus dilengkapi dengan perencanaan global untuk mencapai penangkalan terintegrasi yang strategis. Sistem pesaing tidak dirancang dengan memperhatikan batas, geografis atau operasional. Selain sistem peringatan, pelacakan, dan penetralisasi, A.S. akan membutuhkan postur alternatif untuk menjelaskan kasus kurangnya peringatan. Kemampuan untuk memerintahkan dan mengendalikan pasukan pertahanan rudal melandasi kegunaannya dalam penangkalan. Sistem NC3 Next dan Joint All-Domain Command and Control (JADC2) adalah bagian utama untuk mengintegrasikan pertahanan rudal dan membuatnya lebih efektif untuk penangkalan. JADC2 akan menyediakan sarana untuk lebih cepat berbagi

informasi di seluruh pasukan gabungan, sehingga memastikan sensor dan penembak terbaik tersedia untuk melawan ancaman terhadap pasukan nuklir dan konvensional. Integrasi komando dan kontrol sistem pertahanan rudal dapat membantu A.S. menangkal senjata musuh, seperti senjata nuklir hasil rendah, tanpa perlu mencocokkan sistem dengan sistem pesaing.

MEMIKIRKAN KEMBALI PENANGKALAN OPERASIONAL

Tritunggal nuklir, NC3, dan IMD tertaut sebagai elemen utama penangkalan. Di lingkungan multiranah saat ini, integrasi juga terjadi di ruang angkasa, siber, dan zona abu-abu, yang didefinisikan sebagai interaksi kompetitif antara aktor negara dan non-negara yang berada di antara perang tradisional dan perdamaian. Kompleksitas ini berarti militer A.S. perlu makin mengintegrasikan komunitas akademis dan industri untuk memenuhi tantangan penangkalan saat ini dan masa mendatang. Meski ancaman nuklir berbeda dari masa lalu, manfaat berinvestasi dalam kapasitas intelektual masih berlaku. Di A.S., misalnya, wadah pemikir Rand Corp dibuat untuk mempelajari Perang Dingin dan mengeksplorasi teori penangkalan. Beberapa ahli teori terhebat era itu, seperti Thomas Schelling dan Herman Kahn, memberanikan diri "keluar kotak" pendekatan militer dan pemerintah tradisional untuk mengembangkan teori penangkalan nuklir awal yang melayani dunia dengan baik selama beberapa dekade.

USSTRATCOM sedang memikirkan kembali teori penangkalan operasional untuk memasukkan filosofi penangkalan terintegrasi yang lebih komprehensif. Dengan mengubah cara memandang penangkalan secara fundamental, diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal tersebut masih berlaku di lingkungan saat ini, dan bagaimana hal itu akan membantu untuk menginformasikan strategi saat melaksanakan rencana dalam mendukung pertahanan bersama yang komprehensif. Filosofi penangkalan terintegrasi memprioritaskan penggabungan sekutu dan mitra A.S. ke dalam semua aspek penangkalan kolektif.

Interoperabilitas sekutu dan mitra melestarikan kebebasan bertindak, meningkatkan pengetahuan dan pilihan, serta memungkinkan pertahanan kooperatif yang efektif. Upaya untuk meningkatkan hubungan strategis dengan mitra berlanjut melalui permainan perang seperti Nimble Titan. Dua puluh empat negara dan tiga organisasi internasional berpartisipasi dalam latihan tersebut, yang berfokus pada integrasi multinasional yang bertujuan untuk meningkatkan konsep interoperabilitas dan pertahanan. Kolaborasi tersebut menegaskan bahwa A.S. dan sekutu serta mitranya siap menghadapi serangan strategis melalui sistem penangkalan terintegrasi ini. Program penangkal nuklir yang kuat dan terintegrasi juga berkontribusi pada tujuan nonproliferasi A.S. dengan membatasi insentif bagi sekutu dan mitra untuk mengembangkan senjata nuklir.

Latihan multilateral juga membantu menangkal Korea Utara, RRT, Rusia, dan negara-negara lainnya agar tidak meyakini bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan senjata nuklir atau mengancamkan penggunaannya. Dengan cara ini, bahkan dengan skala dan intensitas perubahan pada lingkungan strategis, penangkalan terintegrasi dapat membantu menjaga dunia tetap stabil dan damai. Dengan tiap modernisasi dan kemajuan dalam sistem yang terdiri dari penangkalan terintegrasi A.S. dan sekutu, pesaing nuklir dan pesaing potensial hendaknya makin melihat investasinya terlalu besar untuk diatasi dan memilih bergabung dengan A.S. dalam mengurangi prospek konflik nuklir atau salah perhitungan.

Kapal selam kelas Ohio USS Nebraska menguji coba penembakan rudal Trident II D5 tanpa hulu ledak di lepas pantai California pada tahun 2018. ANGKATAN LAUT A.S.

Ketika ancaman musuh terus tumbuh, penangkalan tetaplah penting. Namun, A.S. dan sekutunya kini menyesuaikan dan mengembangkan penangkalan nuklir untuk lingkungan dinamis yang mereka hadapi. Penangkalan strategis membutuhkan integrasi kemampuan di semua ranah di seluruh militer A.S. dan lainnya. Di luar tritunggal nuklir, modernisasi sistem NC3 dan investasi dalam kemampuan lain, seperti IMD, akan menambah opsi dan meningkatkan penangkalan.

Selama 70 tahun, penangkalan telah membantu dunia menghindari konflik bencana nuklir. Ini terus melandasi semua operasi militer dan diplomasi A.S. di seluruh dunia. Penangkalan terintegrasi akan tetap menjadi penyokong dan landasan keamanan nasional A.S. di masa mendatang. □

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di per Concordiam, Volume 12, Edisi 3.
Per Concordiam adalah publikasi Komando Eropa A.S.

PERSENJATAAN DENGAN MISI GANDA

Sistem HIMARS menembakkan rudal selama latihan multilateral Rim of the Pacific di Hawaii pada Juli 2022. REUTERS

PENEMBAKAN PRESISI BERBASIS DARAT MELINDUNGI WILAYAH, MENDORONG PENANGKALAN

MAYOR BRYAN C. NEAL/ANGKATAN DARAT A.S.

Penembakan Presisi Jarak Jauh Strategis (Strategic Long-Range Precision Fires - SLRPF) yang dikerahkan di garis depan merupakan aset utama dalam gudang persenjataan Amerika Serikat yang dapat dimanfaatkan jika negara itu, bersama dengan sekutu dan mitranya, dipaksa untuk menanggapi secara militer tindakan agresif di kawasan Indo-Pasifik, termasuk tindakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ketika ditempatkan secara strategis, sistem pertempuran perang bergerak Angkatan Darat A.S. ini memberikan penangkalan signifikan dipadu dengan kemampuan multiranah — udara, siber, darat, laut, ruang angkasa, dan spektrum elektromagnetik — yang ada dan semakin meningkat.

Distribusi sistem SLRPF memungkinkan negara-negara yang berpandangan serupa untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka dengan menyediakan keunggulan strategis terhadap teknologi rudal canggih dan platform proyeksi kekuatan musuh.

SLRPF merupakan persenjataan kaliber besar dengan daya hantam berat — termasuk rudal, meriam, dan artileri lainnya — yang dirancang untuk menembus garis pertahanan musuh dan menghancurkan sasaran utama pada jarak jauh. Akan tetapi, sama seperti sistem khas Angkatan Darat A.S. lainnya, alutsista ini harus berevolusi sesuai dengan sifat peperangan yang berubah dengan cepat agar tetap efektif.

"Meningkatkan kekuatan dan kelincahan munisi dan sistem artileri lapangan Angkatan Darat akan memungkinkan Prajurit kami untuk memberikan efek yang lebih akurat dan menghancurkan pada medan perang di masa mendatang," ungkap Mayjen. John Rafferty, yang menjabat sebagai direktur Tim Lintas Fungsi Penembakan Presisi Jarak Jauh Komando Masa Depan Angkatan Darat A.S. dari Mei 2018 hingga Juni 2022. Grup tersebut, yang berpangkalan di Fort Sill, Oklahoma, ditugasi untuk menavigasi cara memajukan Penembakan Presisi Jarak Jauh bagi era peperangan baru. Program itu merupakan prioritas modernisasi taktis Angkatan Darat, dan menjajaki kemungkinan penggunaan sistem yang melibatkan pemanfaatan keahlian Komando Pengembangan Kemampuan Tempur Angkatan Darat bersama dengan masukan dari dunia industri dan akademisi.

Pemasangan sistem itu merupakan bagian penting dari rencana A.S. dan sekutu serta mitranya untuk mengatasi ancaman PKT di Laut Cina Selatan dan Timur, serta di tempat lainnya. Kesuksesan memerlukan kerja sama dengan berbagai negara, seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, A.S. juga bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), India, Selandia Baru, dan Negara-Negara Kepulauan Pasifik. Dengan memperkuat jaringan tak tertandingi yang terdiri atas para sekutu dan mitra yang memiliki visi yang sama, termasuk penghormatan terhadap tatanan internasional berbasis aturan, berbagai negara dapat menangkal agresi, serta memastikan keamanan dan kemakmuran bersama.

Wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM) merupakan medan tempur prioritas Departemen Pertahanan A.S. Laksamana John C. Aquilino, Komandan USINDOPACOM, menyatakan bahwa setiap ranah di kawasan ini disengketakan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan A.S. harus terus mampu mengungguli kemampuan RRT melalui kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan, penembakan ofensif, energi terarah, hipersonik, dan komputasi kuantum, dengan kemajuan yang diintegrasikan ke dalam pasukan sekutu/kemitraan gabungan secepat mungkin.

Uji terbang yang dilakukan di Pangkalan Angkatan Ruang Angkasa Vandenberg, California, pada Oktober 2021, memvalidasi kemampuan SLRPF Angkatan Darat untuk menembakkan rudal lebih dari 499 kilometer, yang melampaui jarak jangkauan 300 kilometer yang dimiliki oleh Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat yang ada saat ini. Angkatan Darat berencana untuk meluncurkan Rudal Serangan Presisi (Precision Strike Missiles - PrSM) operasional pertamanya pada tahun 2023, dan Britania Raya telah mengumumkan bahwa pihaknya akan mengerahkan PrSM pada tahun 2024 sebagai bagian dari pemutakhiran terhadap Sistem Roket Peluncuran Ganda M270 miliknya. Sistem rudal baru itu terdiri dari peluncur yang sudah ada yang dipersenjatai dengan PrSM generasi terbaru Angkatan Darat dan dapat menghancurkan ancaman udara, peluncur rudal, pusat komando dan kontrol, area berkumpul/persiapan, dan target penting lainnya. Rudal-rudal itu memiliki pencari multimode yang mengunci radar dan sinyal radio musuh, sehingga membuka pintu untuk menyerang target tradisional berbasis darat dan laut.

INSENTIF BAGI DIPLOMASI

Besar kemungkinan peningkatan kemampuan penangkalan militer A.S. dan sekutu/mitranya dengan cara yang dijelaskan oleh John C. Aquilino dan para pemimpin militer A.S. lainnya akan menghentikan kecenderungan ekspansionis PKT dan meningkatkan kemungkinan tercapainya solusi diplomatik terhadap potensi pemicu ketegangan di Laut Cina Selatan dan Timur.

A.S. perlu menjauh dari platform "prestise" yang besar dan mahal, seperti kapal dan pesawat terbang yang dapat ditargetkan dengan sistem penolakan area/antiakses yang lebih murah dan berinvestasi dalam sistem persenjataan yang lebih kecil, lebih murah, dan mudah diproduksi. Untuk menyeimbangkan kembali penangkalan di kawasan ini, A.S. harus berfokus pada peningkatan persenjataan penolakan area.

"Postur penangkalan konvensional yang kredibel dalam pertempuran diperlukan untuk mencegah konflik, melindungi kepentingan A.S., serta untuk meyakinkan sekutu dan mitra kami," ungkap Laksamana Philip S. Davidson, yang saat itu menjadi komandan USINDOPACOM, dalam kesaksiannya di depan Kongres A.S. pada Maret 2021. "Tanpa upaya penangkalan yang meyakinkan, Republik Rakyat

Tiongkok akan berani mengambil tindakan untuk merongrong tatanan internasional berbasis aturan dan nilai-nilai yang diwakili dalam visi kami untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka."

Sasaran penangkalan yang dipimpin A.S. di Indo-Pasifik adalah menempatkan pasukan musuh dalam bahaya dan membuat tindakan bermusuhan apa pun, seperti potensi invasi PKT ke Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri, menjadi terlalu mahal untuk dilakukan.

Indo-Pasifik memiliki ciri khas yaitu hamparan samudra luas dan kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dengan berbagai ukuran dan rupa bumi. Upaya untuk menyertakan karakteristik geografis ini ke dalam perencanaan penangkalan konvensional dalam sebuah lingkungan yang sebagian dibentuk oleh postur RRT memerlukan kemampuan serangan presisi jarak jauh yang didistribusikan secara regional.

Sistem SLRPF akan menawarkan keunggulan strategis dan finansial dibandingkan dengan sistem persenjataan konvensional. PrSM Angkatan Darat merupakan contoh dari konsep tersebut. Dengan menggunakan platform konvensional seperti Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket System - HIMARS) atau Sistem Peluncuran Roket Ganda (Multiple Launch Rocket System - MRLS), PrSM dapat meluncurkan rudal antikapal pada jarak lebih dari 500 kilometer, sehingga menempatkan kapal angkatan laut musuh dalam bahaya. Sementara itu, pesawat terbang berawak memiliki jarak jangkauan dan durasi penerbangan terbatas, sehingga rentan terhadap sistem pertahanan udara musuh yang canggih, dan tidak memiliki kemampuan penangkalan segala cuaca secara terus-menerus yang disediakan oleh SLRPF.

Kemahiran sistem SLRPF sangat bermanfaat. "Menurut hemat saya, memiliki portofolio kemampuan jarak jangkauan yang mendalam di Pasifik memberi Anda banyak pilihan karena ada begitu banyak lokasi berbeda yang dapat Anda bayangkan sebagai lokasi penembakannya," ungkap John Rafferty kepada situs web Defense News pada September 2020. "Memadukan dan mencocokkan kemampuan jarak jauh dari semua jenis lokasi berbeda itu menciptakan dilema yang luar biasa bagi musuh."

Satuan Tugas Multiranah (Multi-Domain Task Force - MDTF) merupakan jawaban Angkatan Darat terhadap kebutuhan untuk penembakan presisi operasional dan strategis dengan berbagai elemen rudal, pertahanan udara, intelijen, dan siber yang bersama-sama memfasilitasi kemampuan untuk mempertahankan area tertentu — landasan sistem penangkalan yang kredibel dalam pertempuran.

Persenjataan SLRPF Angkatan Darat dan jarak jangkauannya yang tersedia bagi MDTF meliputi:

- Senjata hipersonik jarak jauh (2.775 kilometer)
- PrSM, kompatibel dengan peluncur HIMARS/MLRS (500 kilometer)
- Kemampuan jarak menengah (rudal SM-6, Rudal Serangan Darat Tomahawk yang diluncurkan dari darat, dan PrSM Spiral 3) (1.800 kilometer)
- Sistem Roket Peluncuran Ganda Terpandu dengan Jarak Jangkauan yang Diperpanjang, kompatibel dengan peluncur HIMARS/MLRS (150 kilometer)
- Bom Diameter Kecil yang Diluncurkan dari Darat, kompatibel dengan peluncur HIMARS/MLRS (150 kilometer)

Anggota skuadron operasi Angkatan Darat A.S. berpose sebelum peluncuran Rudal Serangan Presisi dari peluncur artileri lapangan HIMARS pada Oktober 2021. PRAJURIT KEPALA KADIELLE SHAW/ANGKATAN UDARA A.S.

Persenjataan ini akan melawan alutsista yang dipasang oleh Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok, yang sebagian besar ditempatkan di Tiongkok timur. Alutsista PLA ini mampu menjangkau berbagai lokasi yang diantisipasi paling besar kemungkinan mengalami konfrontasi: Laut Cina Selatan dan Timur, Semenanjung Korea, dan Taiwan. Pengerahan sistem SLRPF bergerak yang diluncurkan dari darat di kawasan itu akan mempersulit perhitungan yang dibuat perencana PLA dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan untuk menargetkan sistem itu.

"Meskipun Beijing mungkin memilih untuk menargetkan beberapa pangkalan terdekat yang mampu menampung pesawat pengebom berat A.S., dan memaksa kapal perang permukaan A.S. untuk menjauh dari pantai Tiongkok, menemukan ratusan peluncur darat Angkatan Darat yang terus bergerak akan menjadi tugas yang sangat besar dan jauh melampaui kemampuan pasukan Tiongkok," demikian yang dilaporkan majalah Forbes pada Oktober 2021.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah jenis sistem SLRPF yang dikerahkan. Rudal hipersonik, yang dapat meluncur lebih dari lima kali kecepatan suara, mudah dibedakan dari sistem SLRPF Angkatan Darat lainnya. Menempatkan sistem hipersonik tanpa diidentifikasi dengan cepat oleh pihak musuh merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Sebaliknya, pod amunisi

Rudal Serangan Presisi diluncurkan dalam uji coba penembakan di Pangkalan Angkatan Ruang Angkasa Vandenberg, California, pada Oktober 2021.

ANTHONY MENDEZ/ANGKATAN RUANG ANGKASA A.S.

rudal PrSM praktis tidak dapat dibedakan dari pod konvensional untuk HIMARS dan MLRS. Musuh akan mengalami kesulitan untuk menentukan rudal mana yang akan diluncurkan. Ini dapat memberikan fleksibilitas tambahan dalam mengerahkan kemampuan rudal canggih dan berpotensi mengurangi besarnya respons PKT.

PERTANYAAN YANG MEMBAYANGI

Di mana A.S. dan sekutu serta mitranya akan menempatkan sistem SLRPF? Aset militer idealnya seharusnya diposisikan secara strategis ke garis depan untuk memberikan penangkalan, dan jika penangkalan gagal, menanggapi secara efektif agresi musuh guna memulihkan stabilitas dan keamanan di kawasan ini.

A.S. harus meyakinkan sekutu dan mitra atas komitmen langgeng dan kuatnya di kawasan ini, dan bahwa pihaknya akan melawan pemaksaan yang dilakukan oleh PKT. Pada akhirnya, berbagai negara yang setuju untuk menjadi lokasi pengerahan sistem SLRPF Angkatan Darat besar kemungkinan akan memandang keputusan mereka sebagai upaya untuk memperkuat penangkalan terhadap rezim Tiongkok yang semakin agresif, memaksa, dan mengabaikan aturan dan norma internasional.

Sistem rudal yang dikerahkan di Korea Selatan ditempatkan untuk menangkal agresi Korea Utara dan untuk menstabilkan kawasan itu. Sistem rudal itu tidak diposisikan sebagai ancaman bagi RRT.

"Bersama dengan sekutu dan mitra kami, pasukan militer gabungan kami yang terlatih secara profesional dan mematikan serta postur garis depan kami akan memberikan penangkalan yang diperlukan sembari memungkinkan diplomasi dari posisi yang kuat untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi semua orang di kawasan itu," ungkap John C. Aquilino selama sidang konfirmasi kongresnya pada Maret 2021.

Bagaimana tanggapan yang mungkin diambil oleh PKT terhadap sistem SLRPF? Para ahli telah mengidentifikasi tiga faktor utama yang besar kemungkinan menentukan jawabannya:

- **Penangkalan** — kemampuan A.S. dan sekutu serta mitranya untuk menyeimbangkan kehadiran PLA di Laut Cina Selatan dan Timur serta di tempat lain dengan memperkenalkan pasukan tangguh mereka sendiri.
- **Kekuatan ekonomi** — kemampuan kolektif kami untuk melawan penggunaan perdagangan, pemberian pinjaman, dan faktor pengaruh ekonomi lainnya oleh PKT yang tidak terkekang oleh kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional.
- **Kohesi sekutu** — sejauh mana sekutu dan mitra, termasuk anggota Quad yaitu Australia, India, Jepang, dan A.S., serta negara-negara yang berpandangan serupa seperti Filipina dan Korea Selatan, dapat membangun dan mempertahankan konsensus dan interoperabilitas.

Untuk mencegah pengerahan sistem SLRPF, PKT besar kemungkinan akan menggunakan taktik penyuapan, gertakan, dan ancaman terselubung, termasuk kampanye propaganda guna membujuk negara-negara penting agar menolak akses penempatan sistem persenjataan A.S. Jika taktik itu gagal, Beijing besar kemungkinan akan menggunakan pemaksaan ekonomi dan serangan siber dalam upaya mencapai tujuan politiknya tanpa konflik bersenjata.

Prajurit A.S. memeriksa platform bergerak HIMARS yang dapat meluncurkan SLRPF. AFP/GETTY IMAGES

Dengan semakin agresifnya PKT, penangkalan yang kredibel sangat penting, dan sistem SLRPF berbasis darat Angkatan Darat A.S. seharusnya menjadi dasar upaya penangkalan itu. Mengingat kapabilitas dan fleksibilitas lintas ranahnya, MDTF Angkatan Darat A.S. merupakan unit yang ideal untuk memperkenalkan teknologi yang baru muncul ini ke kawasan itu. PKT tidak diragukan lagi akan melawannya dengan retorika dan pemaksaan guna mencegah Angkatan Darat A.S. mendapatkan posisi di Rangkaian Pulau Pertama. Tetapi dengan mempersiapkan diri dalam menghadapi tanggapan semacam itu, A.S. dan sekutu serta mitranya dapat memperoleh dan mempertahankan kendali regional.

Banyak mitra dan sekutu A.S. berharap untuk mendapatkan HIMARS dan MLRS setelah menyaksikan manfaatnya bagi pasukan Ukraina yang mempertahankan diri dalam melawan pasukan penjajah Rusia. Negara-negara yang berpandangan serupa memiliki peluang besar untuk memperoleh sistem persenjataan ini.

"Dalam lingkungan operasional yang kompleks dan berteknologi tinggi, menjangkau dan menetralisasi ancaman dengan cepat dan akurat akan menjadi hal yang paling penting," ungkap John Rafferty. "Syukurlah, kemampuan yang kita lihat sudah muncul sebagai hasil dari investasi modernisasi strategis akan memperluas jarak jangkauan, letalitas, dan dampak kemampuan penembakan permukaan-ke-permukaan kita, sehingga membuat Angkatan Darat, pasukan gabungan, dan sekutu kita tetap memperoleh keunggulan yang sangat penting dalam menghadapi musuh yang memiliki kemampuan hampir setara." □

OPERASI INFORMASI KUNCI PENANGKALAN

Mengubah Persepsi Pesaing tentang Risiko dan Biaya

Laksamana Samuel Paparo, komandan Armada Pasifik A.S., menyampaikan pidato ini pada tanggal 18 Oktober 2022, di Simposium Operasi Informasi & Peperangan Elektronik Indo-Pasifik tahunan ke-11 di Hawaii, yang diselenggarakan oleh Komando Indo-Pasifik A.S. Pidato ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Terima kasih kepada Anda sekalian karena telah hadir di sini. Saya juga melihat beberapa teman lama di ruangan ini dan beberapa kolega lama yang pernah berdinas bersama di atas kapal. Tapi yang terpenting, saya melihat banyak sekutu dan mitra dari semua dinas militer. Saya melihat partisipasi mendalam di kalangan masyarakat sipil dan industri, dan ini menggarisbawahi fakta tertentu — kekuatan. Dan kekuatan itu membawa kita semua, dan kita semua berada di sini dan terlibat.

Topik keseluruhan simposium kita adalah penangkalan.

Dan dalam penangkalan, operasi informasi berada di bagian pertama, tengah, dan terakhir.

Definisi saya tentang penangkalan adalah kombinasi kemampuan dan kemauan untuk mengerahkan, mengenakan biaya yang tidak dapat ditoleransi dibandingkan dengan apa yang akan dicapai seseorang dengan perilaku jahatnya.

Dan kemudian, yang paling penting, adalah kesadaran musuh Anda bahwa Anda, pada kenyataannya, memiliki kemampuan dan keinginan untuk menangkalnya.

Apa sebenarnya yang ingin kita capai?

Pertama dan terpenting, legitimasi kita didasarkan pada fakta bahwa setiap orang di ruangan ini berusaha menegakkan status quo dan menghalangi siapa pun yang berupaya mengubah status quo dengan menggunakan pasukan militer.

Anda bisa mengubah perbatasan Anda; Anda bisa mengubah kondisi Anda. Tetapi harus melalui negosiasi, melalui prinsip martabat manusia dan penentuan nasib sendiri di antara semua orang.

Apa yang ingin kita pertahankan dalam status quo di Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, dan pada faktanya, dunia, adalah negara-negara yang:

- Menghormati supremasi hukum dan norma-norma internasional.
- Memperjuangkan hak dan kebebasan individu.
- Mempromosikan tata kelola yang baik.
- Mematuhi nilai-nilai dan kebebasan bersama.
- Mendapatkan manfaat dari lembaga multilateral.
- Mendukung dan mempertahankan akses terbuka ke laut, langit, dan luar angkasa.
- Terlibat dalam perdagangan yang adil dan terbuka.

Apa yang ingin kita tangkal, khususnya:

- Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari ekspansionisme dan perampasan lahan, laut, nutrisi, dan sumber daya mineral melalui pemaksaan dan/atau tindakan militer di luar norma internasional, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membuat narasi yang menyesatkan atau membenarkan argumen mereka dengan tindakan hukum kuasi-ilegal, turunan kedua, dan tidak masuk akal.
- Agresi berkelanjutan yang dilakukan oleh Rusia. Dan kita telah melihat secara mendalam seperti apa dampak agresi itu di Eropa Tengah.
- Korea Utara yang mengancam negara-negara tetangganya dan masyarakat internasional dengan persenjataan nuklir.

Kita hidup di masa yang benar-benar krusial. Dan, bahkan, itulah mengapa saya melihat urgensi dalam misi bersama kita.

Konferensi ini membahas operasi informasi untuk mempertahankan status quo negara-negara yang bebas dan berdaulat serta menghalangi berbagai negara dan tindakan yang akan membalikkan sistem yang ada saat ini — sebuah sistem yang telah memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, sistem ini telah mengangkat 60% penduduk dunia dari pergolakan kemiskinan.

Operasi informasi — dan, untuk mendukung operasi informasi, perang elektronik — dirancang

Kapal perusak yang dilengkapi dengan peluru kendali Angkatan Laut A.S. USS Benfold beroperasi di Laut Filipina pada Juni 2022.

SERSAN DUA ARTHUR ROSEN/ANGKATAN LAUT A.S.

Pesawat pengebom B-1B dan pesawat tempur F-16 Angkatan Udara A.S. terbang bersama dengan pesawat tempur F-35 Angkatan Udara Korea Selatan selama latihan Vigilant Storm di Korea Selatan pada November 2022.

THE ASSOCIATED PRESS

Pasukan Korea Selatan dan A.S. mempersiapkan diri untuk mengikuti latihan gabungan penyeberangan sungai di Yeoju, Korea Selatan, pada Oktober 2022.

THE ASSOCIATED PRESS

"Menggabungkan penangkalan dan informasi membantu kita mengubah persepsi pesaing tentang risiko, biaya, dan manfaat, serta menunjukkan kemampuan kita untuk mengendalikan eskalasi."

Kapal-kapal Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Angkatan Laut Korea Selatan, Angkatan Laut Australia, dan Angkatan Laut Kanada berlayar dalam formasi selama pengerahan regional pada Agustus 2022.

THE ASSOCIATED PRESS

Personel Pasukan Penjaga Pantai A.S. mempersiapkan diri untuk menaiki kapal di Samudra Pasifik bagian timur saat melakukan patroli penangkapan ikan ilegal pada Agustus 2022.

THE ASSOCIATED PRESS

untuk memengaruhi dan memberikan dampak pada kondisi kognitif serta memperkuat persepsi dan keyakinan bahwa biaya yang dibebankan ekspansionisme agresif, pemaksaan, dan tindakan militer akan melebihi manfaat apa pun yang dapat diperoleh.

Kita melakukan ini melalui komunikasi strategis, komunikasi di kalangan pemimpin senior dan bahkan di antara musuh dalam keterlibatan pemimpin utama kita.

Kita melakukannya di bawah operasi informasi, pengawasan dan pengintaian, serta jaringan yang memastikan kesadaran ruang pertempuran kita dan kemampuan kita untuk beroperasi di ruang pertempuran.

Dan kemudian, akhirnya, keamanan operasional yang dibawa oleh setiap negara dalam pertahanannya.

Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin telah berbicara tentang penangkalan terintegrasi yang memaksimalkan efek di seluruh ranah dan medan peperangan serta spektrum konflik melalui semua instrumen kekuatan militer, dan terutama dengan kemampuan kita yang tak tertandingi serta jaringan aliansi dan kemitraan kita, yang benar-benar merupakan keunggulan asimetris.

Menggabungkan penangkalan dan informasi membantu kita mengubah persepsi pesaing tentang risiko, biaya, dan manfaat, serta menunjukkan kemampuan kita untuk mengendalikan eskalasi.

Pertimbangkan di mana kita berada pada waktu yang tepat. Saat saya memberikan pidato ini, Kongres Partai ke-20 Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang berlangsung, yang mengarah ke masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya [bagi Sekretaris Jenderal Xi Jinping]. RRT menyimpang dari tradisi konsensus dan kebijakan luar negeri masuk akal yang dilaksanakannya selama 30 tahun menjadi sesuatu yang terlihat jauh lebih autokrasi.

Kita sendiri berkeinginan untuk mematuhi tatanan berbasis aturan internasional dan bukannya menciptakan tatanan baru seperti yang diusulkan oleh musuh potensial kita melalui frasa yang terdengar tidak berbahaya seperti "kemakmuran bersama."

Ini adalah sistem ketika RRT menjadi pusatnya dan "semua urusan di bawah kolong langit" ditentukan melalui autokrasinya. Supremasi hukum bukanlah seperti yang kita lihat di RRT; itu adalah aturan oleh hukum. Artinya, mengambil interpretasi turunan kedua dari hukum atau kebiasaan internasional, menyatakannya sebagai hukum alam semesta dan kemudian bertindak seolah-olah demikian.

Mari kita perjelas tentang apa arti peremajaan. Peremajaan nasional berarti pengendalian perekonomian oleh partai. Itu artinya modernisasi militer untuk mendukungnya. Dan itu artinya mengubah batas internasional dengan menggunakan pasukan militer. Itulah arti sebenarnya dari peremajaan nasional.

Sebagai sekutu dan mitra, kita tidak dapat membiarkan begitu saja perilaku jahat dan disengaja oleh RRT dan PKT, yang kita lihat dalam bentuk:

- Ekspansionisme militer di Laut Cina Selatan.
- Pemaksaan dan tekanan di perairan dan langit di sekitar Taiwan.
- Pemaksaan dan tekanan militer di perairan dan langit di sekitar Kepulauan Senkaku.
- Tindakan militer di sepanjang Garis Kontrol Aktual [yang memisahkan India dan Tiongkok].
- Penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan di Hong Kong.
- Perilaku ekonomi predator, mulai dari penangkapan ikan ilegal dan pencurian kekayaan intelektual hingga jebakan utang di seluruh dunia, termasuk penanganan perselisihan RRT dengan Australia, Kanada, dan Lituania.

Jadi, ini bukan tentang membendung pertumbuhan ekonomi dan militer RRT. Ini tentang memastikan bahwa kita sebagai negara yang bebas dan berdaulat memastikan tindakan dan perilakunya tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan atau tatanan berbasis aturan internasional. □

MENENTANG PENINDASAN

ILUSTRASI FORUM

Kritik dan Sanksi yang Semakin Kuat Menargetkan Perlakuan Tidak Manusiawi PKT terhadap Warga Uyghur

STAF FORUM

Kerja paksa terhadap warga Uyghur dan kelompok minoritas pribumi lainnya terus berlanjut untuk mendorong sektor manufaktur di kawasan Xinjiang Tiongkok, demikian menurut serangkaian penyelidikan, termasuk laporan penting yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagian besar bertindak melalui Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (Xinjiang Production and Construction Corps - XPCC) yang dikelola negara untuk menindas kelompok etnis tersebut.

Meskipun semakin banyak negara dan badan internasional yang telah menentang tindakan PKT dan meningkatkan sanksi terhadap rezim eksploitatif itu, langkah-langkah yang lebih kuat mungkin diperlukan untuk membatasi praktik-praktik yang bernuansa penganiayaan, termasuk penyiksaan dan genosida, demikian menurut laporan tersebut.

"Pemerintah Tiongkok menafsirkan identitas, agama, dan budaya yang berbeda warga Uyghur dan masyarakat berbahasa Turki lainnya di Xinjiang, yang mayoritas Muslim, baik sebagai ancaman keamanan nasional maupun sebagai ancaman budaya terhadap persatuan Tiongkok," ungkap Irina Bukarin, analis utama dalam sebuah laporan pada Mei 2022 yang diterbitkan oleh lembaga nirlaba Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), yang berkantor pusat di Washington, D.C., kepada National Public Radio. "Dan dengan demikian, mereka telah memenjarakan warga Uyghur dan memaksa mereka masuk ke dalam kondisi kerja paksa, menyingkirkan mereka dari masyarakat, dan mengirim mereka untuk bekerja di ladang dan pabrik yang berjarak ratusan mil dari keluarga mereka."

XPCC berfungsi sebagai pemerintah kuasi-regional, organisasi paramiliter, operator penjara, kerajaan media, dan sistem pendidikan serta merupakan salah satu badan usaha milik negara terbesar di dunia, demikian menurut laporan pada Juli 2022 yang diterbitkan oleh Helena Kennedy Center for International Justice di Sheffield Hallam University di Britania Raya. "Pemerintah pusat RRT [Republik Rakyat Tiongkok] menganggap XPCC sebagai 'sistem khusus yang mengintegrasikan pemerintah, militer, dan badan usaha.'"

XPCC menaklukkan warga Uyghur dan mengeksploitasi tenaga kerja mereka untuk usaha yang memasok produk dan layanan kepada RRT — dan sebagian besar negara di dunia. Upaya ini telah diintensifkan di

Warga etnis Uyghur bekerja keras di sebuah lahan pertanian di dekat Lukqun di Xinjiang, tempat Partai Komunis Tiongkok menggunakan kerja paksa yang meluas, demikian ungkap kelompok hak asasi manusia. REUTERS

Kawasan Xinjiang di Tiongkok barat laut merupakan kampung halaman bagi sekitar 12 juta warga Uyghur, yang sebagian besar adalah Muslim. REUTERS

> "Kawasan itu, rakyatnya, dan identitas mereka dipandang sebagai ancaman keamanan kritis terhadap integritas budaya Tiongkok, stabilitas perbatasan negara, dan otoritas absolut PKT."
>
> – Helena Kennedy Centre for International Justice

bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping, yang mengklaim warga Uyghur berpotensi menciptakan gangguan atau bahkan menjadi teroris.

Pada akhir Agustus 2022, tiga bulan setelah mengunjungi Xinjiang, kepala hak asasi manusia P.B.B. saat itu Michelle Bachelet merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu yang menegaskan bahwa penahanan yang dilakukan oleh RRT terhadap warga Uyghur dan kelompok minoritas lainnya mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penilaian setebal 46 halaman itu mencatat berbagai pelanggaran hak, termasuk penyiksaan, yang menuntut perhatian dunia.

Beijing, yang menuntut agar Michelle Bachelet tidak merilis laporan tersebut, menggambarkan temuannya sebagai bagian dari kampanye Barat untuk mencoreng reputasinya. Seorang diplomat Tiongkok mengatakan RRT tidak akan lagi bekerja sama dengan kantor hak asasi manusia P.B.B., demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP).

"Apa yang terjadi di Xinjiang merupakan bencana kemanusiaan terburuk di zaman kita," ungkap pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia Tiongkok, Teng Biao. "Bagi sebagian besar orang yang ditahan di kamp pengasingan, satu-satunya kejahatan mereka adalah menjadi [warga Uyghur], seorang Muslim, atau menolak melepaskan identitas budaya atau agama mereka — seperti memelihara janggut panjang, mengenakan kerudung di tempat umum, dan menolak untuk menonton televisi pemerintah, menolak minum alkohol, memiliki lebih banyak bayi, pernah berkunjung luar negeri, mengajukan paspor, memiliki Al-Qur'an, berbicara dengan kerabat atau anggota keluarga yang tinggal di luar negeri, dan seterusnya," ungkap Teng Biao dalam diskusi virtual Council on Foreign Relations (CFR) pada Juli 2021. Teng Biao memiliki gelar doktor di bidang filsafat hukum dari Peking University dan mengajar di China University of Political Science and Law sebelum meninggalkan negara asalnya.

Sejak tahun 2017, pemerintah Tiongkok telah memenjarakan lebih dari 1 juta orang di Xinjiang dan melakukan pengawasan, pembatasan agama, kerja paksa, dan sterilisasi wajib terhadap warga di sana, demikian yang dilaporkan CFR, sebuah wadah pemikir independen. Foto udara yang diterbitkan oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menunjukkan perluasan dramatis jaringan kamp pengasingan pemerintah yang luas di kawasan itu dari April 2017 hingga Agustus 2018. Pejabat PKT menyangkal bahwa apa yang disebut pusat pelatihan vokasi itu melanggar hak asasi manusia warga Uyghur.

Banyak tahanan bekerja dalam kondisi yang "dapat dianggap sebagai perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," ungkap Tomoya Obokata, pelapor khusus P.B.B. untuk bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, pada pertengahan Agustus 2022.

PKT ingin warga Uyghur menyesuaikan diri dengan versi identitas Tiongkok yang dibakukannya, meninggalkan budaya mereka, keyakinan agama, dan keinginan apa pun untuk merdeka. XPCC mendorong warga Han Tiongkok, kelompok etnis terbesar di negara itu, untuk pindah ke Xinjiang dan berusaha meredam angka kelahiran warga Uyghur, demikian menurut surat kabar The Guardian.

Setelah mendapatkan informasi dari para penyintas kamp pengasingan dan para ahli di kawasan itu, Uyghur Tribunal, sebuah kelompok yang berkantor pusat di Britania Raya, menetapkan bahwa tindakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi yang diberlakukan pada warga Uyghur merupakan genosida.

Geoffrey Nice, seorang pengacara Britania Raya yang memimpin dengar pendapat yang dilakukan sebelum diterbitkannya keputusan mahkamah yang bersifat tidak mengikat pada Desember 2021, mengatakan panel itu menemukan bahwa RRT menjalankan "kebijakan yang

disengaja, sistematis, dan terpadu" untuk menghasilkan "pengurangan jangka panjang terhadap penduduk Uyghur dan kelompok minoritas etnis lainnya," demikian menurut BBC. Panel itu juga menemukan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

Panel itu menyimpulkan bahwa Xi Jinping dan pejabat senior Tiongkok lainnya memikul "tanggung jawab utama" atas pelanggaran hak terhadap kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, demikian ungkap Geoffrey Nice.

Meskipun berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, telah melarang impor barang yang diproduksi di Xinjiang, sanksi semacam itu mungkin tidak terlalu membawa hasil. "Khususnya saat membahas XPCC, sasarannya tidak murni komersial, sehingga perilaku represifnya tidak mungkin diubah oleh dampak terhadap bisnisnya saja," ungkap Nicole Morgret, seorang analis hak asasi manusia di C4ADS, kepada FORUM.

'KRIMINALISASI PERILAKU NORMAL'

PKT, melalui XPCC, mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan di Xinjiang. Kamera keamanan ada di mana-mana, dan masyarakat didorong untuk memata-matai tetangga mereka. "Ada pengawasan yang meluas dan sangat mengganggu, yang berarti bahwa pejabat partai sekarang benar-benar dapat mengintip ke dalam rumah dan bahkan tempat tidur warga Uyghur," ungkap James Leibold, seorang peneliti senior di ASPI, selama acara virtual CFR.

Menurut beberapa laporan, XPCC telah mengambil harta benda banyak orang dan memaksa mereka bekerja di pabrik atau pertanian sembari melarang penggunaan bahasa asli, praktik keagamaan, dan pakaian etnis. Para penentang ditahan di kamp kerja tempat mereka diindoktrinasi mengenai budaya Han Tiongkok. Banyak warga Uyghur menghilang begitu saja. Tanda-tanda kehidupan mereka dihancurkan. Kepemilikan yang dianggap berharga, seperti tanah subur, disita.

"Kawasan itu, rakyatnya, dan identitas mereka dipandang sebagai ancaman keamanan kritis terhadap integritas budaya Tiongkok, stabilitas perbatasan negara, dan otoritas absolut PKT," demikian yang dilaporkan Helena Kennedy Center. "Dalam lima tahun terakhir ini, khususnya, XPCC telah memainkan peran penting dalam menindas kehidupan, budaya, dan identitas warga Uyghur." Taktik XPCC "sebagian besar belum pernah terjadi sebelumnya di antara konfigurasi politik atau perusahaan global; semua analogi gagal menangkap fungsi, jangkauan, dan kekuasaannya yang luas," demikian temuan laporan tersebut.

Chen Quanguo, yang saat itu menjabat sebagai kepala PKT di Xinjiang, menerbitkan perintah pada tahun 2017 dan 2018 untuk "mengumpulkan semua orang yang harus ditangkap," yang mengakibatkan pembangunan kamp pengasingan dan perluasan penjara. Pihak berwenang di Tiongkok melarang jurnalis dan penyelidik asing masuk ke dalam fasilitas tersebut. Di tengah kritik internasional, PKT terus mengirim banyak orang ke penjara dan fasilitas penahanan tanpa melalui proses hukum, demikian ungkap pakar Xinjiang kepada CFR.

Darren Byler, seorang antropolog yang telah mempelajari warga Uyghur, mengatakan kepada AP pada Juli 2021 bahwa banyak tahanan tidak melakukan "kejahatan nyata menurut standar apa pun" dan dipenjara tanpa adanya perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. "Tindakan ini merupakan kriminalisasi terhadap perilaku normal," ungkapnya.

Indoktrinasi juga terjadi di luar tembok fasilitas pemerintah. "Kita harus mengingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia … juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari semua warga Uyghur dan Muslim serta kelompok minoritas etnis lainnya di Xinjiang," ungkap Teng Biao dalam diskusi CFR. Di luar kamp pengasingan, warga Uyghur "terus menderita akibat tindakan tegas yang semakin parah dan pengawasan totaliter yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok."

Kelompok advokasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh Beijing melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang. Mereka menuduh Beijing melakukan berbagai pelanggaran yang di antaranya mencakup kerja paksa, sterilisasi, dan kepatuhan wajib terhadap asimilasi PKT, termasuk pembatasan praktik keagamaan. Penindasan itu berusaha membuat warga Uyghur patuh dan bergantung pada negara, demikian yang dilaporkan Helena Kennedy Center, yang setara dengan "pemerintahan teror."

SIAPA ITU WARGA UYGHUR?

Meskipun Kawasan Otonomi Uyghur Xinjiang menyumbang hampir seperenam luas daratan Tiongkok, jumlah penduduknya yang mencapai 26 juta jiwa hanya menyumbang kurang dari 2% populasi RRT yang mencapai 1,4 miliar jiwa. Xinjiang merupakan kampung halaman bagi sekitar 12 juta warga Uyghur, kebanyakan dari mereka adalah Muslim, bersama dengan kelompok etnis lainnya dan warga Han Tiongkok yang direlokasi ke sana, demikian menurut BBC. Masyarakat pribumi Xinjiang, yang diperintah selama berabad-abad oleh penguasa militer dan berbagai rezim, kebanyakan berkumpul di segelintir oasis di tanah pegunungan terjal dan padang pasir yang luas.

Suku Uyghur, warga berbahasa Turki, dan kelompok lainnya yang secara tradisional tinggal di kawasan ini memiliki ikatan budaya dan sejarah yang jauh lebih kuat dengan masyarakat di Asia Tengah di sebelah barat daripada dengan warga Tiongkok di sebelah timur kawasan itu. Secara historis, beberapa negara bagian Tiongkok di masa lampau terlibat dengan wilayah ini melalui diplomasi dan perdagangan; yang lain berusaha menaklukkan dan memaksakan sistem politik dan sosial Tiongkok, seperti di Xinjiang saat ini.

Xinjiang, yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Qing pada abad ke-18, telah menjadi "kawasan otonom" RRT sejak Perang Saudara Tiongkok berakhir pada tahun 1949. RRT pada tahun 1954 mendirikan XPCC, sebuah organisasi yang pada awalnya sebagian besar terdiri dari mantan prajurit Tentara Pembebasan Rakyat. Misinya: mengendalikan penduduk pribumi serta mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya kawasan itu dengan

"pistol di satu tangan" dan "bajak di tangan lainnya," demikian menurut Helena Kennedy Center. XPCC, yang dibubarkan pada tahun 1975 setelah Revolusi Kebudayaan RRT, didirikan kembali pada tahun 1981 dan mengambil peran yang ditingkatkan sebagai konglomerat korporat di bawah kendali langsung pemerintah pusat.

Penindasan terhadap warga Uyghur yang menuntut kemerdekaan pada tahun 2009 terjadi sebelum diberlakukannya praktik represif pemerintah saat ini. PKT menyebut para pendukung pemberontakan sebagai teroris dan, lewat mengeksploitasi ketakutan global akan terorisme, menolak kritik atas perlakuannya terhadap warga Uyghur, demikian menurut The Strategy Bridge, jurnal dan podcast online nirlaba.

Para pengunjuk rasa di luar Kedutaan Besar Tiongkok di London mengungkapkan dukungan bagi warga Uyghur yang ditindas oleh PKT. REUTERS

Sejak penindakan tegasnya dimulai, pemerintah Tiongkok telah mengutip "tiga kejahatan" yaitu separatisme etnis, ekstremisme agama, dan terorisme kekerasan sebagai pembenaran, demikian yang dilaporkan Departemen Luar Negeri A.S.

XPCC, sementara itu, telah berkembang menjadi operasi global yang terhubung ke ribuan perusahaan. XPCC pada awalnya merupakan badan usaha pertanian yang memproduksi tanaman panenan termasuk kapas, tomat, dan paprika. Akan tetapi, kepentingannya sekarang meluas ke sektor energi, pertambangan, bahan kimia, ekstraksi minyak dan gas, logistik, pakaian jadi, elektronik, minuman anggur, pemrosesan makanan, asuransi, dan pariwisata. Jalur arteri utama skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT melintasi kawasan ini, sehingga menyediakan akses ke pasar di Asia Tengah dan Eropa Timur.

PKT ingin membaurkan penduduk Uyghur, terutama di Xinjiang selatan, dan pada akhirnya menghapus budaya dan agamanya, demikian ungkap James Leibold dari ASPI kepada CFR. PKT telah menghancurkan masjid dan pemakaman, dan Xi Jinping telah mengatakan bahwa Islam di RRT harus berada "dalam konteks Tiongkok," demikian yang dilaporkan Xinhua News yang dikelola pemerintah Tiongkok pada Juli 2022. Warga Uyghur, yang bahasanya terkait dengan bahasa Turki, dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, termasuk anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka dan dikirim ke sekolah berasrama atau panti asuhan. Di sana, mereka juga menjadi sasaran propaganda PKT, demikian yang dilaporkan Departemen Luar Negeri A.S. pada Juni 2022.

"Di sepanjang kehidupan mereka, warga Uyghur menjadi sasaran indoktrinasi yang diarahkan dan disampaikan secara terpusat oleh XPCC," demikian menurut Helena Kennedy Center. "Program rekayasa sosial yang sengaja dilakukan oleh XPCC mengharuskan setiap warga negara etnis minoritas melepaskan warisan budaya, bahasa, dan keyakinan agama mereka demi praktik suku Han dan ideologi Xi Jinping."

APA LANGKAH BERIKUTNYA?

Pemerintah, bisnis, dan konsumen di seluruh dunia membantu mempertahankan kerja paksa di Xinjiang, meskipun banyak pihak yang tidak mengetahuinya. XPCC memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung pada ribuan entitas korporat di seluruh dunia, demikian menurut penyedia data Sayari, sehingga sulit, meskipun bukannya mustahil, untuk menentukan apakah suatu produk terhubung ke XPCC. "Kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi masyarakat berbahasa Turki di Xinjiang tidak hanya terjadi di dalam perbatasan kawasan itu, tetapi menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui sistem perdagangan dan keuangan global. Ikatan global ini dapat memungkinkan diperolehnya peningkatan laba dengan mengorbankan hak asasi manusia, dan kecuali jika dilawan, maka artinya pemangku kepentingan internasional secara diam-diam memungkinkan terjadinya kejahatan semacam itu," demikian yang dilaporkan C4ADS pada Mei 2022.

Laporan C4ADS lainnya, yang dirilis pada akhir Juni 2022, menyimpulkan bahwa Xinjiang dengan cepat menjadi pusat manufaktur Tiongkok. Laporan itu mengatakan 4.480 perusahaan manufaktur didirikan di sana pada tahun 2021, naik dari 1.604 perusahaan pada tahun 2009.

Sebagian besar pertumbuhan XPCC merupakan hasil dari kemampuan PKT untuk mengendalikan narasi. Melalui propaganda dan memanfaatkan ketakutan, intimidasi, dan rasisme, perusahaan yang diarahkan oleh pemerintah itu telah berkembang pesat hingga merugikan para pekerja Uyghur, demikian ungkap Teng Biao dalam diskusi CFR. Mantan tahanan kamp pengasingan, Omir Bekali, warga Uyghur yang sekarang tinggal di Belanda, mengatakan rakyat Tiongkok "tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi" karena sistem penyensoran PKT. "Jika Anda ingin tahu kenyataannya, bicaralah dengan korban," ungkap Omir Bekali kepada AP pada September 2022. "Pemerintah mengontrol media, mereka terus mengatakan kebohongan."

Informasi yang dapat diandalkan dan sanksi yang terkoordinasi di seluruh dunia merupakan kunci untuk mengungkap taktik XPCC, demikian yang dilaporkan

Fasilitas penahanan seperti ini di Hotan di Xinjiang barat daya telah bertambah berlipat ganda secara dramatis sejak tahun 2017.
GETTY IMAGES

majalah Foreign Affairs pada Juli 2021. "Tidak seorang pun boleh berada di bawah ilusi bahwa akan mudah untuk mengubah perilaku pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Beijing kecil kemungkinannya mengakui bahwa pihaknya merasakan panasnya tekanan internasional atau mengubah kebijakannya terhadap warga Uyghur."

Meskipun beberapa kelompok hak asasi manusia dan warga Uyghur di pengasingan mengkritik Michelle Bachelet karena tidak menyatakan kekejaman PKT di Xinjiang sebagai genosida, perhatian internasional yang dihasilkan oleh temuannya masih dapat memberikan pengaruh. "Laporan P.B.B. itu menambahkan sedikit dari apa yang sudah diketahui. Namun, fakta bahwa informasi itu berasal dari badan hak asasi manusia terkemuka di dunia, yang beranggotakan tidak hanya satu pemerintah tetapi ratusan pemerintah, memberikan kelegaan dan harapan bagi banyak korban," demikian menurut The Guardian.

Sekretaris Jenderal P.B.B. Antonio Guterres mendesak RRT untuk mengikuti rekomendasi Michelle Bachelet, termasuk membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan mengungkapkan lokasi warga Uyghur di Xinjiang yang belum diketahui kabarnya oleh kerabat yang berada di luar negeri, demikian yang dilaporkan Radio Free Asia pada September 2022. Laporan P.B.B. itu juga mendesak RRT untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai pusat penahanan.

Selain itu, para ahli mengatakan, boikot internasional terhadap produk-produk dari Xinjiang, meskipun cukup berhasil, harus diperkuat. "Data dan metode yang diperlukan untuk memerangi dukungan finansial terhadap penindasan di Xinjiang tersedia, dan inilah saatnya bagi para pemangku kepentingan untuk memanfaatkannya," demikian menurut laporan C4ADS pada Juni 2022. Produk XPCC mencapai pasar domestik dan global dengan berbagai cara, demikian ungkap laporan itu. Anak perusahaan XPCC melakukan perdagangan secara terbuka di pasar keuangan Tiongkok. XPCC juga memiliki anak perusahaan asing, dan melakukan penjualan secara langsung ke berbagai perusahaan domestik dan regional, yang memasukkan berbagai produk ke dalam rantai pasokan global. "Kesadaran dan perhatian yang diberikan pada saluran untuk memindahkan produk-produk ini dapat mengurangi ketergantungan padanya," ungkap laporan itu.

Akan tetapi, pelarangan produk yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang menimbulkan dilema jika bertentangan dengan kebutuhan domestik suatu negara yang bersifat mendesak. Contohnya produk panel surya. RRT mendominasi pasokan panel surya dunia, tetapi aparat Bea Cukai A.S. telah menyita produk-produk buatan Tiongkok sejak diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur federal pada bulan Juni 2022. Meskipun hal ini memengaruhi kemampuan A.S. untuk menerapkan komitmen yang dibuatnya pada Agustus 2022 untuk beralih ke energi terbarukan, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan A.S. di antara Juni 2022 dan Januari 2023 mengidentifikasi lebih dari 2.692 pengiriman sebagai berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. Hampir setengah dari pengiriman yang ditahan adalah panel surya atau komponen terkait.

Ini adalah kebingungan yang serupa dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang mengutuk invasi tidak beralasan yang dilakukan Rusia di Ukraina, namun ragu untuk memboikot minyak dan mineral Rusia yang sangat dibutuhkan. Terlepas dari rintangan semacam itu, tindakan internasional yang terkoordinasi menunjukkan bahwa dunia tidak akan mengabaikan pemusnahan seluruh kelompok etnis dan religius yang dirancang oleh PKT, demikian yang dilaporkan Foreign Affairs pada Juli 2021. "Rakyat Uyghur pantas mendapatkan tidak kurang dari itu." □

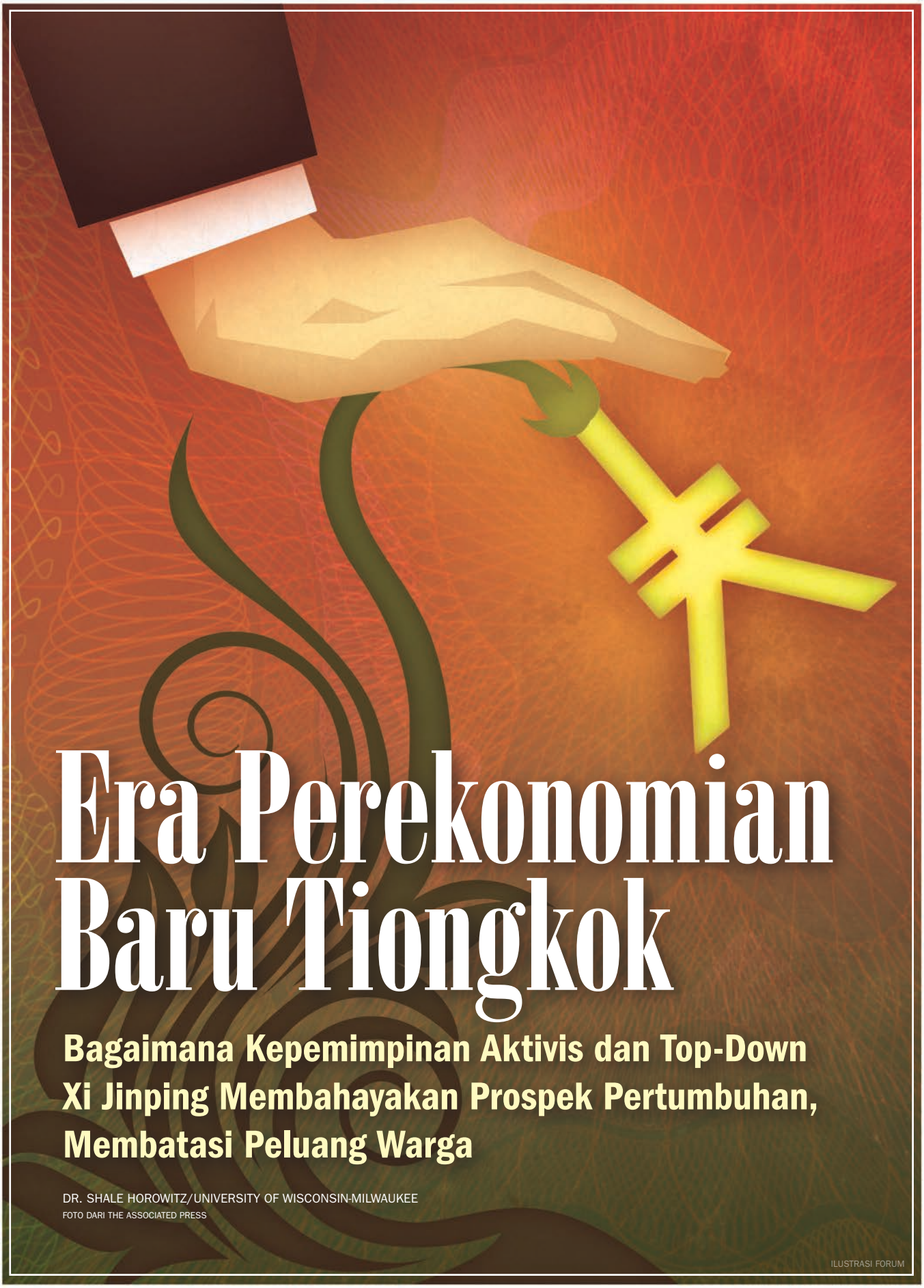

Era Perekonomian Baru Tiongkok

Bagaimana Kepemimpinan Aktivis dan Top-Down Xi Jinping Membahayakan Prospek Pertumbuhan, Membatasi Peluang Warga

DR. SHALE HOROWITZ/UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE

FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

ILUSTRASI FORUM

Sejak berkuasa pada tahun 2012, Xi Jinping, sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), secara sistematis membatalkan konsensus kelembagaan dan kebijakan "Reformasi dan Keterbukaan", yang diciptakan oleh Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an dan dipertahankan oleh dua pendahulu Xi Jinping, yaitu Jiang Zemin dan Hu Jintao. Sejak tahun 2020, serangkaian kebijakan telah mengganggu perkembangan perekonomian Tiongkok yang sudah melambat. Ini termasuk serangan peraturan dari banyak sisi terhadap bisnis teknologi tinggi paling mutakhir di Tiongkok; pembatasan utang secara tiba-tiba yang menjerumuskan sektor real estat ke dalam krisis; dan kebijakan "nol-COVID" keras kepala yang memaksakan dilakukannya penutupan akses menyeluruh berkelanjutan dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana seharusnya kebijakan ini dipahami, dan apa artinya bagi masa depan Tiongkok?

Pembatasan akibat berjangkitnya COVID-19 menutup pusat perbelanjaan dan sebagian besar bisnis lainnya di Beijing pada pertengahan tahun 2020.

Xi Jinping Mendefinisikan 'Era Baru'

Filosofi resmi Xi Jinping, yang diabadikan dalam konstitusi PKT pada tahun 2017, disebut "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru." Dia mengambilnya dari "Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok," yang diciptakan oleh Deng Xiaoping untuk kebijakan perekonomian baru yang berorientasi pasar pada era Reformasi dan Keterbukaan dari tahun 1978 hingga 2012. "Era baru" berarti bahwa Xi Jinping memutuskan hubungan dengan era Deng Xiaoping, dan "pemikiran Xi Jinping" berarti bahwa Xi Jinping akan memutuskan mengapa dan bagaimana ini akan dilakukan.

Dalam banyak pidato publik terkenal di pertemuan partai dan negara, Xi Jinping telah memproklamasikan arah baru di bidang politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Di bidang politik, dia berpendapat PKT harus memulihkan solidaritas internal, kontrol politik, dan dominasi budaya yang dimilikinya sebelumnya. Di balik penampakan berorientasi partai ini, Xi Jinping menggunakan kampanye "anti-korupsi" ekstensif untuk menyapu bersih saingan politik aktual dan potensial, mengambil kendali langsung atas pembuatan kebijakan di semua bidang penting, menghapus batas masa jabatan 10 tahun yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping bagi para pemimpin puncak, dan memulihkan pemujaan pahlawan bergaya Mao untuk dirinya sendiri. Di bidang ekonomi, Xi Jinping bersikeras bahwa tidak akan ada lagi penekanan utama pada pertumbuhan. Xi Jinping, yang tak sekadar menyampaikan basa-basi tanpa penindakan tegas ala Hu Jintao, menyatakan bahwa kepemilikan negara serta pengawasan dan regulasi negara yang lebih besar akan digunakan untuk memaksakan kontrol atas perekonomian yang lebih dapat diandalkan oleh negara berpartai tunggal itu; dan bahwa kontrol semacam itu akan digunakan secara lebih tegas guna mencapai sasaran ideologis partai, seperti melayani kemakmuran bersama (kesetaraan yang lebih besar) dan budaya sosialis (perpaduan di antara loyalitas partai, moralitas tradisional, dan nasionalisme Tiongkok). Di bidang kebijakan luar negeri, pendekatan penuh kesabaran dan mudah bergaul Deng Xiaoping — sering kali diringkas sebagai "menyembunyikan kekuatan dan tidak pernah menjadi sorotan" — digantikan oleh "impian peremajaan nasional Tiongkok," ketika Tiongkok menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan budayanya yang semakin meningkat untuk "bergerak lebih dekat ke posisi utama" di dunia.

Kebijakan ekonomi Xi Jinping dimulai dengan lambat. Masa jabatan pertamanya, dari tahun 2012-17, berfokus pada konsolidasi kekuasaan pribadi dan kontrol politik negara berpartai tunggal itu. Kebijakan ekonomi mencakup memperkuat posisi keuangan dan pasar dari badan usaha milik negara serta menghentikan eksperimen yang berpotensi mendestabilisasi dan membatasi negara dalam meliberalisasi pasar modal. Mulai tahun 2017, dan semakin intensif sejak tahun 2020, kebijakan ekonomi Xi Jinping menjadi lebih agresif, tidak dapat diprediksi, dan disruptif. Hal yang sama dalam berbagai kebijakan ini adalah bahwa kontrol dan pengawasan negara berpartai tunggal yang lebih besar bisa jadi menjadi salah satu sasarannya, metode dominan yang digunakan untuk mencapai sasaran lainnya, atau keduanya.

Menunjukkan Pada Jack Ma Siapa Bosnya

Tindakan tegas Xi Jinping terhadap sektor layanan online berteknologi tinggi — termasuk layanan pencarian, media sosial, pembayaran dan keuangan, game, belanja, dan pengiriman makanan — telah membuat perusahaan swasta terkenal dan paling sukses di Tiongkok mendapatkan kritik publik, ancaman dilakukannya penyelidikan, serta regulasi dan kontrol partai yang lebih besar. Pembenaran yang diberikan adalah untuk melayani kepentingan publik, termasuk mengamankan data konsumen, membatasi kekuatan monopoli perusahaan besar, menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi, serta melindungi moral publik. Mungkin yang lebih penting, perusahaan teknologi telah dipaksa untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara berpartai tunggal itu serta menempatkan kepentingan dan

sasaran mereka di bawah kepentingan dan sasaran negara berpartai tunggal itu.

Kasus paling terkenal adalah kasus Ant Group, raksasa layanan keuangan online yang penawaran umum perdananya diblokir pada akhir tahun 2020, yang dilaporkan dilakukan atas perintah langsung Xi Jinping, setelah pendirinya, miliarder Jack Ma, mengkritik regulator negara karena dianggap menghambat inovasi. Model bisnis Ant, yang membuka saluran pemberian pinjaman kepada konsumen dan usaha kecil, mengancam dominasi pasar bank-bank besar milik negara, yang memberikan pinjaman terutama kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta besar yang memiliki koneksi luas. Ant dan perusahaan teknologi keuangan lainnya menghadapi pembatasan baru pada model bisnis dan praktik pemberian pinjaman mereka ketika mereka diwajibkan untuk mematuhi rezim peraturan lebih ketat yang mengatur lembaga keuangan dan bank tradisional.

Kira-kira pada waktu yang sama, Beijing menggenjot upaya untuk membawa big data dan penggunaannya di bawah kendali negara berpartai tunggal itu. Perusahaan teknologi yang mengumpulkan rangkaian data pelanggan dalam jumlah besar — termasuk raksasa teknologi seperti Alibaba, Tencent, dan ByteDance — harus menyimpan data di Tiongkok, mematuhi pembatasan baru tentang pengumpulan data, dan menyediakan data kepada negara, yang ingin mengawasi cara penggunaan data itu. Negara itu menginginkan tidak hanya menjaga privasi konsumen tetapi juga menggunakan data untuk melayani tujuan pengawasan dan propaganda rezim pengawasan berteknologi tinggi PKT. Negara berpartai tunggal itu juga akan memiliki kelonggaran untuk menggunakan data perusahaan — termasuk data perusahaan asing — guna mempromosikan pengembangan perusahaan Tiongkok yang lebih disukai, dengan cara yang hampir sama dengan memaksa dilakukannya transfer teknologi atau mencuri teknologi melalui pencurian siber.

Salah satu pendiri Alibaba Group, Jack Ma, melepaskan jabatannya sebagai ketua dan menghilang dari pandangan publik dari Oktober 2020 hingga Januari 2021 setelah dilakukannya tindakan tegas pemerintah Tiongkok terhadap bisnisnya. Dia jarang terlihat di depan umum sejak saat itu.

Peraturan baru lainnya menargetkan ancaman yang dirasakan terhadap moral publik atau kualitas kehidupan. Tencent dan perusahaan game online lainnya telah melihat lebih sedikit persetujuan terhadap game yang diluncurkan dan lebih banyak pembatasan pada konten, termasuk membatasi anak di bawah umur untuk bermain game maksimal tiga jam dalam seminggu. Terdapat pembatasan pada popularisasi selebritas di media massa dan media sosial serta gaya hidup mereka yang sering kali bersifat boros dan tidak bermoral. Pada tahun 2021, regulator negara mengarahkan berbagai perusahaan untuk "mengontrol secara ketat pemilihan aktor dan bintang tamu program, serta menjunjung tinggi literasi politik, perilaku moral, tingkat artistik, dan evaluasi sosial sebagai standar pemilihan." Mungkin yang paling mengejutkan, juga pada tahun 2021, Beijing meluncurkan serangan frontal terhadap budaya pencapaian pendidikan berlebihan di Tiongkok. Bisnis pendidikan swasta yang besar dan berkembang dengan pesat, yang menyediakan pelajaran les setelah jam belajar sekolah bagi jutaan anak, mengancam akan "membentuk sistem pendidikan lain di luar sistem pendidikan nasional," demikian peringatan yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan.

Perusahaan atau divisi pendidikan yang melayani murid-murid hingga kelas sembilan dilarang beroperasi sebagai bisnis yang berorientasi terhadap laba. Harga dan waktu les juga berada di bawah kendali peraturan. Nilai pasar runtuh, dan PHK besar-besaran menyusul. Tiba-tiba saja karena takut akan terjadinya peristiwa terburuk, pengusaha teknologi kaya raya bergegas menyumbang untuk tujuan amal yang disetujui partai.

Dengan mengesampingkan denda wajib karena melanggar peraturan — seperti 8,11 triliun rupiah (530 juta dolar A.S.) untuk Meituan, 18,37 triliun rupiah (1,2 miliar dolar A.S.) untuk Didi, dan 42,86 triliun rupiah (2,8 miliar dolar A.S.) untuk Alibaba (semuanya pada tahun 2021-22) — "kontribusi" dari bos perusahaan mencakup 22,96 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) dari Pinduoduo, 33,68 triliun rupiah (2,2 miliar dolar A.S.) dari Xiaomi, 35,21 triliun rupiah (2,3 miliar dolar A.S.) dari Meituan, 229,66 triliun rupiah (15 miliar dolar A.S.) dari Tencent, dan 237,31 triliun rupiah (15,5 miliar dolar A.S.) dari Alibaba. Di tingkat manajemen perusahaan, ada juga peran pengawasan yang lebih kuat bagi komite partai dan penjualan saham dalam jumlah signifikan oleh pemegang saham kepada BUMN.

Semua peningkatan kontrol dan pengawasan negara berpartai tunggal ini cenderung mengurangi prospek pertumbuhan dengan cara yang saling menguatkan. Ini termasuk pembatasan pada pengembangan produk dan layanan; pembatasan antimonopoli pada pangsa

pasar dan pembatasan pada pemanfaatan bisnis untuk mempromosikan bisnis terkait; pembatasan kepemilikan dan penggunaan data pelanggan; pembatasan konten yang lebih ketat terkait moral publik dan kesetiaan politik; pengawasan yang lebih besar dan mengkritik keputusan yang diambil sebelumnya oleh pihak manajemen, baik besar maupun kecil; penegakan peraturan yang berubah-ubah dan dipolitisasi; dan ketidakpastian tentang mempertahankan aliran laba di masa depan. Harga pasar saham merupakan salah satu tanda langsung dari kerugian yang terjadi. Dari Februari hingga Agustus 2021, enam perusahaan teknologi terbesar Tiongkok kehilangan 40% nilainya. Dua perusahaan terbesar, Alibaba dan Tencent, kehilangan lebih dari setengah nilainya sejak mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan 2021. Bisa ditebak, lingkungan peraturan yang lebih keras menciptakan kondisi yang jauh lebih sulit bagi usaha rintisan dan perusahaan yang lebih kecil, yang cenderung meningkatkan konsentrasi pasar dan mengurangi inovasi dalam jangka panjang.

Menunjukkan Pada Penabung di Tiongkok Siapa Bosnya

Warga Tiongkok terkenal suka berhemat. Karena negara mengelola pasar saham domestik dan membatasi aliran keluar investasi asing, rumah tangga perkotaan Tiongkok memegang 78% tabungan hidup mereka dalam bentuk real estat hunian, dibandingkan dengan 35% rumah tangga Amerika Serikat. Karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat bertepatan dengan urbanisasi yang cepat, harga apartemen telah mengalami lonjakan pesat — dalam beberapa tahun terakhir ini, mencapai apa yang oleh para ekonom dianggap sebagai tingkat "gelembung" yang tidak berkelanjutan, dengan tingkat utang konsumen dan pengembang yang berpotensi memicu ketidakstabilan. Pada tahun 2019, harga rumah di Tiongkok kira-kira dua kali lebih mahal daripada harga rumah di A.S. jika dibandingkan terhadap tingkat pendapatan. Pada Juni 2021, harga rumah jika dibandingkan terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan mencapai empat hingga lima kali lebih tinggi di Shanghai, Beijing, dan Shenzhen, dibandingkan dengan San Francisco dan New York. Pada saat yang sama, tingkat kekosongan tinggi di kalangan pemilik dua rumah atau lebih, dan tingkat pengembalian sewa rendah.

Para ekonom berpendapat bahwa tidak ada cara yang aman untuk menusuk gelembung itu. Namun Xi Jinping, yang memperingatkan pada tahun 2017 bahwa perumahan "untuk ditinggali, bukan untuk spekulasi," menunjukkan sedikit kehati-hatian. Pada Agustus 2020, dia menerapkan tiga "garis merah," tindakan yang tiba-tiba membatasi tingkat utang perusahaan pengembang real estat. Dengan pengembang besar yang telah lama menekankan pertumbuhan yang cepat, utang telah mencapai tingkat yang tinggi, sembari memanfaatkan sumber yang tidak lazim seperti penjualan di muka kepada pembeli dan surat perjanjian utang pemasok. Dengan banyaknya pengembang besar seperti Evergrande yang tiba-tiba tidak dapat meminjam dana, maka harga properti jatuh dan konstruksi tersendat, yang diikuti oleh gelombang gagal bayar utang internasional. Banyak pembeli menyaksikan pekerjaan konstruksi dihentikan pada apartemen yang sudah dibiayai atau dibayar. Beberapa menanggapinya dengan menahan pembayaran kredit pemilikan rumah atau apartemen.

Para pekerja melewati logo raksasa perniagaan elektronik Alibaba Group selama pameran teknologi di Beijing. Pada akhir tahun 2020, otoritas Tiongkok menghentikan penawaran umum perdana senilai 528,15 triliun rupiah (34,5 miliar dolar A.S.) yang dilakukan oleh Ant Group, afiliasi Alibaba.

Xi Jinping telah melimpahkan masalah itu ke tangan pemerintah provinsi dan lokal, yang diharapkan dapat memastikan bahwa pembeli yang membayar di muka menerima apartemen mereka dan membatasi kerugian yang terjadi pada sektor properti. Dana talangan selektif dan pengambilalihan proyek bermasalah oleh pemerintah sedang berlangsung, bersamaan dengan upaya lokal ad hoc untuk mendorong pembangunan perumahan. BUMN yang berfokus pada proyek infrastruktur mendukung pasar penjualan lahan untuk menjaga aliran pendapatan ke pemerintah lokal. Tetapi hanya ada sedikit tanda adanya upaya mempertimbangkan kembali kebijakan awal yang gagal dan menggantikan secara luas peraturan utang yang lebih moderat. Pembangunan secara berlebihan dan perlambatan urbanisasi berarti bahwa pasar properti Tiongkok ditakdirkan untuk mengalami perlambatan. Akan tetapi, pendekatan yang tiba-tiba dan kaku telah mengakibatkan kerusakan parah pada kondisi keuangan pengembang dan pemerintah lokal serta mengguncang kepercayaan konsumen. Sektor real estat, yang diperkirakan menyumbang lebih dari 20% perekonomian

Terlepas dari gangguan berkelanjutan yang tidak dapat diprediksi pada rantai pasokan dan investasi serta kepercayaan konsumen, Xi Jinping tetap bertahan dengan kebijakan nol-COVID.

Tiongkok, tampaknya akan tetap mengalami tekanan.

Menunjukkan Pada Virus Siapa Bosnya

Menyusul pengabaian dan kesalahan manajemen mengerikan terhadap COVID-19 ketika pertama kalinya muncul di Wuhan, Tiongkok, rezim pengujian, pelacakan, dan penutupan akses menyeluruh PKT yang intens pada awalnya terbukti efektif.

Akan tetapi keberhasilan itu membawa benih bagi masalah di kemudian hari. Xi Jinping berupaya mewujudkan nasionalisme vaksin — mengandalkan vaksin buatan dalam negeri yang kurang efektif untuk menunjukkan bahwa RRT dapat menyelesaikan masalahnya sendirian. Sementara itu, jutaan lansia di Tiongkok mengkhawatirkan keamanan vaksin tersebut dan memutuskan bahwa penutupan akses menyeluruh membuat vaksinasi tidak diperlukan. Kemudian muncul varian lebih menular, yang menyebabkan penutupan akses menyeluruh di berbagai kota dan distrik besar Tiongkok secara berulang dan sering kali berkepanjangan — termasuk penutupan akses menyeluruh selama dua bulan di Shanghai, kota terbesar dan ibu kota perekonomian Tiongkok.

Terlepas dari gangguan berkelanjutan yang tidak dapat diprediksi pada rantai pasokan dan investasi serta kepercayaan konsumen, Xi Jinping tetap bertahan dengan kebijakan nol-Covid hingga akhir tahun 2022—ketika dia tiba-tiba membatalkan semua upaya untuk membatasi penyebaran virus. Mengapa PKT tidak bertransisi lebih cepat untuk membuka diri dan hidup bersama dengan virus? Pertama, Xi Jinping tidak bersedia mengalah begitu saja dan enggan mengakui adanya masalah yang terjadi pada salah satu keberhasilan khasnya. Kedua, jutaan lansia Tiongkok masih belum divaksinasi dan vaksin Tiongkok memiliki efektivitas yang belum dapat dipastikan. Ketiga, kebijakan nol-COVID telah memasang lapisan pengawasan dan kontrol lainnya yang berguna. Teknologi pembatasan perjalanan COVID telah digunakan, misalnya, untuk membatasi unjuk rasa di Zhengzhou terhadap bank yang gagal menyediakan uang tunai bagi deposan.

Jika Xi Jinping begitu berkomitmen pada kebijakan nol-Covid, mengapa kebijakan membuka diri terjadi dengan begitu tiba-tiba dan tanpa syarat? Tampaknya Xi Jinping bertekad untuk bertahan sampai virus itu mengalahkan upaya terbaik PKT. Penutupan akses menyeluruh konstan dan rezim pengujian wajib yang mengganggu menjadi semakin sering diperlukan, di seluruh segmen perekonomian Tiongkok yang semakin

Derek ditelantarkan tak terpakai di lokasi pembangunan perumahan Evergrande di Beijing pada September 2021. Meskipun berjanji untuk membuat perumahan menjadi lebih mudah diperoleh, kebijakan Xi Jinping memperketat pemberian kredit kepada beberapa pengembang, sehingga menyebabkan banyak gagal bayar utang internasional yang merembet menjadi krisis real estat jangka panjang.

besar. Kebijakan ini sangat mengganggu rantai pasokan dan aktivitas bisnis Tiongkok, merusak lapangan kerja, dan merongrong kondisi keuangan. Unjuk rasa meletus di berbagai kota Tiongkok dalam skala dan ruang lingkup yang belum pernah terlihat sejak tahun 1989. Kondisi keuangan pemerintah lokal mengalami krisis.

Xi Jinping tidak melihat adanya pilihan lain selain mengalah, tetapi konsekuensinya mengerikan karena rasa percaya diri berlebihan itu mengakibatkan sedikitnya persiapan. Tidak ada upaya untuk membawa masuk vaksin asing yang tampaknya lebih efektif dan pengobatan anti-virus dalam skala besar. Hanya ada sedikit upaya untuk mempersiapkan sistem medis Tiongkok dengan menimbun obat-obatan dasar serta membangun infrastruktur rumah sakit dan klinis. Ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya, keputusan dibuat untuk bergegas menuju kekebalan kelompok guna menghidupkan kembali perekonomian. Seperti yang diperkirakan, ratusan juta kasus tiba-tiba muncul di berbagai kota. Negara berpartai tunggal itu tidak berusaha menghentikan arus mudik tahun baru Imlek — yang tak pelak lagi menyebarkan angka kematian ke daerah pedesaan, yang dihuni oleh penduduk lebih tua dan memiliki perawatan medis yang lebih primitif. Sangat diragukan bahwa akan pernah ada transparansi tentang berapa banyak warga yang meninggal dunia, termasuk berapa banyak yang meninggal dunia secara tidak perlu karena sikap terlalu percaya diri, persiapan yang buruk, dan desakan ekonomi untuk membuka diri secara terburu-buru di negara berpartai tunggal itu.

Menunjukkan Pada Perekonomian Siapa Bosnya

Xi Jinping mewarisi dua sumber utama perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, tingkat pertumbuhan secara alami menurun ketika negara-negara miskin menjadi lebih kaya. Kedua, warisan kebijakan PKT semakin menghambat pertumbuhan. Kebijakan satu anak yang diterapkan di masa lampau telah menghasilkan penurunan cepat dalam jumlah tenaga kerja. Kumpulan kebijakan peraturan lainnya — sistem izin tinggal perkotaan, pembatasan penggunaan lahan pedesaan, dan jalur yang relatif sempit menuju kesuksesan ekonomi yang terkonsentrasi di beberapa kota besar — membatasi akses ke peluang ekonomi dan memperlambat pencapaian produktivitas.

Sementara itu, sasaran dan metode Xi Jinping telah menghasilkan rangkaian kebijakan lainnya yang memperlambat pertumbuhan secara lebih lanjut. Ini sebagian didorong oleh keinginan Xi Jinping untuk mengurangi penekanan pertumbuhan guna mencapai "kemakmuran bersama" atau oleh upaya ad hoc untuk meningkatkan standar hidup masyarakat kelas bawah dan menengah di Tiongkok. Akan tetapi, sasaran utama Xi Jinping — jauh di atas semua sasaran ekonomi — adalah memperkuat kekuasaan dan kontrol negara berpartai tunggal itu. Metode yang lebih disukainya untuk mencapainya adalah dengan memaksakan kebijakan top-down ambisius yang sebagian besar tidak terkait dan sering

Para pekerja membangun penghalang logam di sekitar lingkungan hunian di Beijing selama penutupan akses menyeluruh COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah pada Juni 2022.

kali bertentangan guna mendapatkan hasil tertentu. Ketika kebijakan Xi Jinping semakin memperlambat pertumbuhan, dia besar kemungkinan akan mencoba menyelesaikan masalah yang dihasilkannya dengan menerbitkan lebih banyak kebijakan yang kurang lebihnya sama.

Tiongkok yang Lebih Lambat Pertumbuhannya di Bawah Xi Jinping Lebih Berbahaya

Pertumbuhan yang lebih lambat melemahkan apa yang, di era Reformasi dan Keterbukaan, telah menjadi sumber utama legitimasi dan kekuatan politik PKT. Sebagai penggantinya, Xi Jinping mengandalkan penindasan, propaganda, dan nasionalisme Tiongkok. Tapi dia melakukannya karena keyakinan ideologis, bukan karena hal itu masuk akal untuk digunakan sebagai strategi politik. Di era baru, Xi Jinping bertekad untuk mencapai hasil, demi kejayaan Tiongkok, dan demi kejayaannya sendiri sebagai pemimpin pembuat sejarah Tiongkok.

Jika hasil itu tidak terwujud di arena ekonomi, Xi Jinping akan berupaya mendapatkannya di tempat lain. Itu termasuk kebijakan luar negeri, ketika risiko terbesar adalah perang dengan Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga besar kemungkinan tidak akan membatasi pengembangan kekuatan militer Tiongkok. Pemerintah pusat Tiongkok memiliki banyak kebijaksanaan fiskal, namun tidak ada prioritas selain keamanan dalam negeri yang besar kemungkinan didahulukan daripada anggaran belanja militer.

Bukan menyusutnya jendela peluang ekonomi yang membuat Tiongkok menjadi lebih berbahaya di luar negeri. Xi Jinping sebagian besar menjadi pencipta penyempitan itu. Sasaran dan metode sama yang mendorong Xi Jinping melemahkan pertumbuhan Tiongkok membuatnya jauh lebih berbahaya di bidang kebijakan luar negeri. □

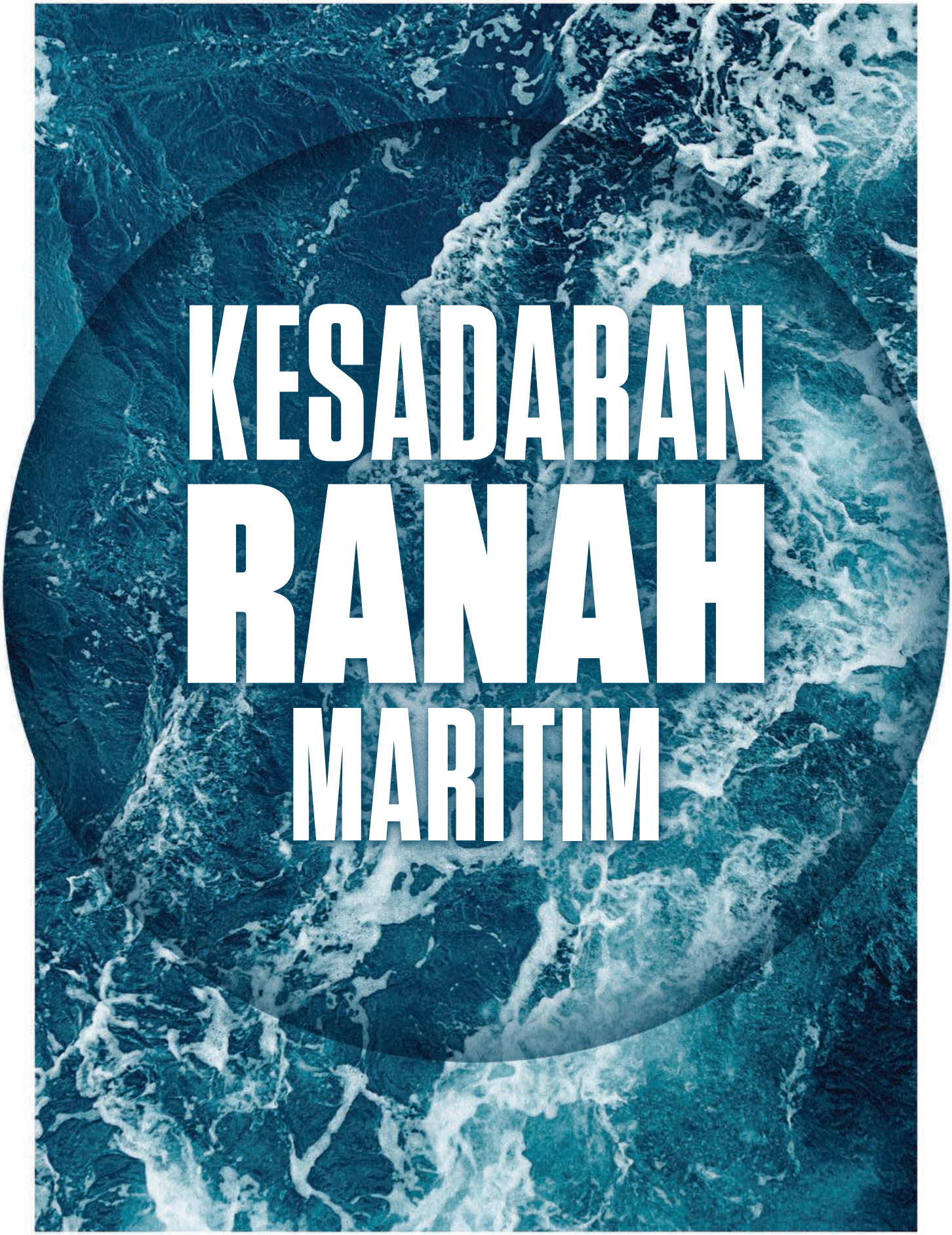

KESADARAN RANAH MARITIM

PROGRAM **PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA** MENYEDIAKAN TEKNOLOGI DAN PELATIHAN UNTUK **MENGAMANKAN JALUR PERAIRAN INDO-PASIFIK DENGAN LEBIH BAIK**

STAF FORUM | FOTO DARI KANTOR P.B.B. URUSAN OBAT-OBATAN DAN KEJAHATAN

Mengamankan perbatasan maritim membutuhkan lebih dari sekadar memiliki teknologi untuk mendeteksi anomali; upaya itu juga harus mencakup tenaga kerja yang terlatih untuk menganalisis data. Orang-orang yang memiliki keterampilan untuk mengetahui apa yang mereka lihat serta bagaimana menjelaskan dan melaporkannya merupakan komponen kunci penangkalan. Dan Program Kejahatan Maritim Global (Global Maritime Crime Programme - GMCP) Kantor P.B.B. Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) memperluas kerja samanya dengan lembaga penegak hukum maritim di seluruh Indo-Pasifik guna memastikan mereka memiliki teknologi dan tenaga kerja yang cakap.

"Mengingat bahwa tantangan keamanan maritim tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, dan mengingat kedekatan zona maritim berbagai negara, memperkuat kolaborasi antarlembaga dan antarnegara merupakan kunci untuk menanggapi secara efektif ancaman maritim di kawasan ini," demikian menurut Tim Samudra Pasifik GMCP.

Dewan Keamanan P.B.B. membentuk GMCP pada tahun 2010 untuk mengatasi pembajakan di Tanduk Afrika. Pada awalnya, program ini dikenal sebagai Program Kontra Pembajakan. Program ini berkembang saat memperluas keterlibatan dan jangkauan geografisnya serta mulai beroperasi di enam area secara global.

Di Pasifik, GMCP telah meningkatkan kesadaran ranah maritim (maritime domain awareness - MDA) dengan memasang sistem identifikasi otomatis (automatic identification system - AIS) pesisir serta teknologi dan infrastruktur lainnya, memutakhirkan pusat pengawasan polisi laut, dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum maritim dan nelayan setempat, demikian menurut Shanaka Jayasekara, koordinator program untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Shanaka Jayasekara membagikan detail keterlibatan GMCP saat ini dan yang direncanakan dengan Negara-Negara Kepulauan Pasifik selama Kelompok Kerja Keamanan Maritim 2022. Serangkaian presentasi dan diskusi selama seminggu, yang diselenggarakan di hotel Shangri-La di Singapura pada Mei 2022, menyediakan forum bagi personel militer, pemerintah, dan antarlembaga untuk menyoroti upaya mereka di Pasifik dan bertukar pikiran tentang cara meningkatkan kolaborasi.

Personel Pasukan Penjaga Pantai Bangladesh berpartisipasi dalam kursus UNODC tentang pengoperasian perahu yang efektif dan aman.

Dalam semangat tersebut, Tim Samudra Pasifik telah melakukan serangkaian dialog penegakan hukum maritim yang mapan yang berfungsi sebagai platform bagi kerja sama antarnegara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Selama dialog ini, personel penegak hukum maritim dan penasihat hukum membagikan tren maritim dan mengidentifikasi berbagai hal yang patut dikhawatirkan. UNODC juga membentuk Grup Kontak Kejahatan Maritim di Laut Sulu dan Sulawesi untuk membantu negara-negara pesisir dan mitra internasional agar lebih memahami dan mengembangkan respons terhadap kejahatan maritim.

"Dengan separuh permukaan dunia terdiri dari perairan internasional di luar yurisdiksi negara tunggal

mana pun, penegakan hukum maritim bersifat kompleks secara hukum dan menantang secara operasional," ungkap Miwa Kato, direktur operasi UNODC, dalam kata pembuka laporan tahunan GMCP. "Pada saat yang sama, dengan banyaknya rute perdagangan utama dunia yang mengandalkan jalur laut yang aman, memastikan supremasi hukum di atas perairan merupakan kunci untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan keamanan serta menjadi bahan yang sangat diperlukan bagi Agenda P.B.B. untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030. Hal ini terutama berlaku di kawasan dengan konektivitas dan perdagangan yang berkembang pesat, seperti kawasan Indo-Pasifik."

Aktivitas yang begitu ramainya di ruang yang terus berkembang memiliki tantangan tersendiri. Kerangka kerja yang ada, seperti Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut (UNCLOS), dirancang untuk membatasi hambatan itu, menyarankan jalan untuk pencegahan konflik dan memberikan panduan terkait masalah kedaulatan. UNCLOS menguraikan daftar lengkap yang menetapkan aturan untuk mengatur semua penggunaan samudra dan sumber dayanya. "UNCLOS mengabadikan gagasan bahwa semua masalah ruang samudra terkait erat satu sama lainnya dan perlu ditangani secara keseluruhan," demikian menurut Divisi P.B.B. untuk Urusan Samudra dan Hukum Laut.

Fitur utama UNCLOS menegaskan bahwa "negara-negara pesisir menjalankan kedaulatan atas laut teritorial mereka yang mana mereka memiliki hak untuk menetapkan ruang lingkupnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut," yang memungkinkan kapal asing "melintas secara damai" melalui perairan itu.

Teks lengkap konvensi tersebut mencakup 320 pasal dan sembilan lampiran yang membahas tentang pengaturan semua aspek samudra, termasuk penetapan batas, pengendalian lingkungan, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah samudra.

"Semua negara, pesisir dan terkurung daratan, bergantung pada keamanan samudra dunia," ungkap Ghada Waly, kepala UNODC, demikian menurut laporan lembaga tersebut. "Kebebasan navigasi, yang dikonfirmasi oleh Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut, diakui sebagai prinsip dasar hukum internasional. Kebebasan yang dilaksanakan secara turun-temurun ini semakin terancam."

PRIORITAS PASIFIK

Tim Samudra Pasifik memiliki lima prioritas untuk kawasan ini:

- Mempromosikan diplomasi lambung putih, menggunakan pasukan berjenis pasukan penjaga pantai dan bukannya pasukan angkatan laut reguler untuk membentuk kehadiran yang menstabilkan dengan membangun keterampilan untuk meredakan ketegangan situasi di laut dan meningkatkan kerja sama regional melalui dialog penegakan hukum maritim.
- Membentuk jaringan komandan regional pasukan penjaga pantai trilateral, di antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, untuk membangun pemahaman tentang perkembangan di Laut Sulu dan Sulawesi serta untuk menyebarluaskan informasi kejahatan maritim di bawah Grup Kontak Laut Sulu dan Sulawesi.
- Memperluas pemangku kepentingan dalam pendekatan multilembaga untuk melawan

Program Kejahatan Maritim Global UNODC dan Pasukan Penjaga Pantai (Bakamla) Indonesia membuka fasilitas pelatihan maritim di Batam, Indonesia, pada tahun 2022.

perdagangan narkoba di Laut Andaman dan Teluk Thailand.

- Meningkatkan kemampuan dan analisis MDA melalui dukungan peralatan dan penguatan kapasitas analitis.
- Meningkatkan kapasitas penuntutan dengan menyelaraskan standar internasional melalui penilaian hukum maritim dan simulasi persidangan di negara pesisir.

Menurut data UNODC, hanya 30% petugas perbatasan mengatakan bahwa mereka telah menerima pelatihan dan pelatihan itu tidak selalu memadai.

"Dalam hal MDA berbasis teknologi, kita harus mempertimbangkan pengumpulan intelijen manusia, " ungkap Shanaka Jayasekara selama pertemuan kelompok kerja itu di Singapura.

Tidaklah cukup hanya membekali masyarakat pesisir dengan AIS dan alat pendeteksi frekuensi radio. Jika pejabat maritim tidak tahu cara membaca data dan mengidentifikasi tren, maka tidak ada gunanya memiliki peralatan itu.

Di Fiji dan tempat lain di Pasifik, GMCP bekerja sama dengan kepala desa untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat pesisir dan nelayan, melatih mereka untuk mencatat pola kehidupan yang tidak lazim di laut, dan melaporkan temuan tersebut kepada otoritas maritim melalui aplikasi media sosial. Shanaka Jayasekara mengatakan masukan yang diberikan oleh manusia melengkapi pekerjaan sumber teknis.

Di bidang teknologi, GMCP dalam beberapa bulan terakhir ini menyediakan radar pesisir X-band kepada pusat pengawasan maritim untuk memutakhirkan kemampuan di Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Nauru, Tonga, dan Tuvalu.

PELATIHAN YANG LEBIH BAIK MENANGKAL TERORISME

Kelompok teroris berupaya menemukan kerentanan keamanan maritim yang dapat mereka manfaatkan, demikian menurut "Violence at Sea: How Terrorists, Insurgents, and Other Extremists Exploit the Maritime Domain (Kekerasan di Laut: Bagaimana Teroris, Pemberontak, dan Ekstremis Lainnya Mengeksploitasi Ranah Maritim)," sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Stable Seas, inisiatif penelitian transnasional untuk melawan ancaman terhadap perdamaian di laut.

"Mereka semakin banyak memanfaatkan secara strategis kebutaan laut dan kemampuan maritim yang lemah untuk menyelundupkan pejuang teroris dan persenjataan mereka, mengatur serangan terhadap target maritim, dan bahkan membiayai operasi mereka melalui skema perpajakan dan perdagangan ilegal," tulis laporan Stable Seas. "Meskipun tantangan mengamankan ranah maritim dipahami dengan baik di kalangan akademik dan pembuat kebijakan, mengembangkan kemampuan yang tangguh dan efektif untuk mengatasi ancaman maritim tetap menjadi tantangan yang rumit."

Para teroris tidak membeda-bedakan ketika menargetkan kapal di laut. Mereka membidik kapal militer dan sipil yang sedang berlayar dan berada di pelabuhan, demikian catatan singkat GMCP. Mereka "juga memanfaatkan laut sebagai sarana untuk mengangkut pejuang teroris dan persenjataan mereka ke lokasi serangan mereka," ungkap lembaga itu. "Kemampuan berbagai negara untuk memantau secara erat kapal-kapal di laut memainkan peran penting bagi peningkatan keberhasilan rezim sanksi yang dikenakan terhadap terorisme."

Untuk memerangi terorisme dengan lebih baik, GMCP bekerja sama dengan pasukan penjaga pantai, jaksa, pengadilan, dan otoritas pelabuhan guna meningkatkan keamanan maritim dan pelabuhan, memberikan berbagai dukungan pengawasan dengan teknologi satelit terbaru, dan memfasilitasi uji coba simulasi terorisme maritim. "GMCP mengakui bahwa terorisme maritim sering kali dikaitkan dengan bentuk kejahatan maritim lainnya, sehingga banyak kemampuan yang kami berikan kepada petugas penegak hukum maritim juga relevan untuk mengatasi terorisme maritim," ungkap lembaga itu.

Personel Indonesia mempraktikkan prosedur kunjungan, pemeriksaan di atas kapal, penggeledahan, dan penyitaan selama pelatihan yang difasilitasi oleh Program Kejahatan Maritim Global.

Sumber daya tambahan termasuk kursus MDA untuk memperkuat pemahaman tentang prosedur kunjungan, pemeriksaan di atas kapal, penggeledahan, dan penyitaan, navigasi yang aman, pembajakan, terorisme, serta penyelundupan barang selundupan dan manusia.

"Mendukung negara-negara anggota dalam melawan ancaman kejahatan maritim dan kriminalitas pada umumnya akan berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh dunia," ungkap Miwa Kato dalam laporan tahunan GMCP. "Oleh karena itu, mengurangi impunitas dan memperkuat supremasi hukum di samudra dunia merupakan langkah penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta perdamaian dan keamanan yang lebih luas." ◻

TRANSPARANSI MARITIM

HawkEye 360 Meningkatkan Kesadaran Ranah

JAMES MCADEN/HAWKEYE 360

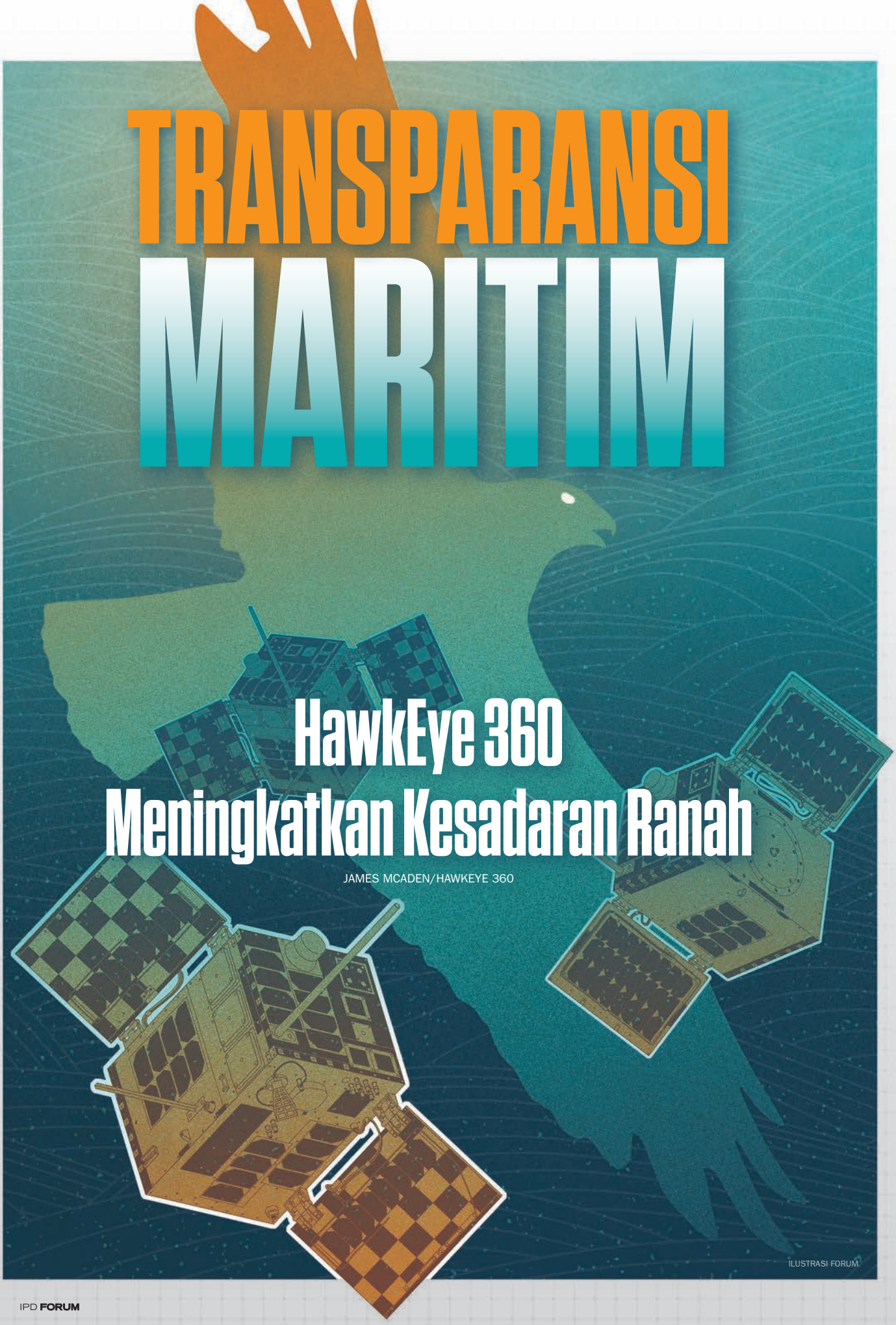

ILUSTRASI FORUM

Teknologi frekuensi radio (RF) berbasis ruang angkasa membantu dalam kesadaran ranah maritim (MDA) dan dalam mendeteksi kapal gelap (dark vessel). Di laut, kapal tersebut telah menonaktifkan penanggap sistem identifikasi otomatis (AIS) guna menghindari pelacakan lokasi, identitas, jalur, dan kecepatan, kemungkinan untuk melakukan aktivitas jahat. MDA menimbulkan tantangan, terutama mengingat terbatasnya sumber daya negara dan luasnya geografi lautan. Namun, tetap sangat penting untuk melindungi sumber daya maritim dan kepentingan nasional di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara berdaulat.

Aktivitas kapal gelap didokumentasikan dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU), serta kegiatan maritim lainnya yang melanggar hukum, dan tetap menjadi keprihatinan global. Praktik ini memiliki implikasi yang mahal, termasuk penipisan sumber daya lingkungan, kehilangan pendapatan bagi perusahaan perikanan legal, kelangkaan pangan di daerah pesisir, pengiriman narkoba dan barang terlarang lainnya, serta perambahan diam-diam di ZEE suatu negara untuk eksplorasi sumber daya bawah air.

Banyak negara Indo-Pasifik mengandalkan AIS untuk MDA, yang dapat menciptakan kerentanan yang signifikan. Meski AIS bermanfaat, diperlukan transmisi identifikasi dan lokasi kapal secara sukarela, yang dapat dengan mudah dimatikan atau diubah oleh kapal untuk menghindari deteksi. Dengan deteksi dan geolokasi RF, negara tidak harus mengandalkan AIS sukarela semata untuk memantau ZEE dan area maritim yang diminati. Deteksi dan geolokasi RF dari luar angkasa menyediakan alat yang inovatif dan hemat biaya untuk mengatasi tantangan ini.

Selama SEACAT 2022, latihan multilateral yang dipimpin Angkatan Laut Amerika Serikat selama 10 hari yang berbasis di Information Fusion Centre di Singapura, data dan analitik RF dari HawkEye 360, sebuah perusahaan yang berbasis di Virginia, diintegrasikan ke dalam SeaVision untuk mendukung tujuan latihan. HawkEye 360 mengkhususkan diri dalam deteksi dan geolokasi emisi RF dari konstelasi satelit orbit rendah Bumi, serta menyediakan data dan analitik ke A.S. dan negara mitra internasional demi dunia yang lebih aman.

SeaVision adalah alat kesadaran situasional maritim berbasis web yang memungkinkan pengguna berbagi informasi untuk meningkatkan operasi maritim, meningkatkan keamanan maritim, dan membangun kemitraan di dalam komunitas maritim.

Lebih dari 20 mitra maritim regional berpartisipasi atau menjadi pengamat dalam SEACAT dan melihat secara langsung bagaimana data RF dapat mengungkapkan potensi kapal gelap di wilayah mereka. Demonstrasi itu juga menyoroti bagaimana data ini dapat menginformasikan perencanaan misi untuk aset lain seperti pesawat pengintai maritim atau patroli permukaan.

HawkEye 360 dan Deteksi Aktivitas Kapal Tiongkok

Dalam beberapa tahun terakhir, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah berulang kali melakukan langkah agresif di Laut Cina Selatan — wilayah yang ramai diperebutkan yang kaya akan sumber daya dan rute perdagangan — dan serangan ilegal di perairan sekitar Kepulauan Senkaku Jepang di Laut Cina Timur. Dengan menciptakan, menduduki, dan memiliterisasi fitur buatan seperti terumbu karang, pulau, dan atol di Laut Cina Selatan, khususnya, RRT berusaha untuk menegaskan dominasi dan mengurangi klaim kedaulatan negara lain.

Transparansi yang lebih besar diperlukan untuk melawan langkah tersebut sebab transmisi AIS saja tidaklah cukup. Data RF HawkEye 360 dapat memberikan gambaran aktivitas yang lebih lengkap di Laut Cina Selatan dan di kawasan lain seperti Kepulauan Senkaku, yang memungkinkan negara untuk menanggapi dengan tepat guna melindungi perairan mereka.

Negara-negara mitra maritim bekerja sama dalam SEACAT 2022.
DAVID LAU/ANGKATAN LAUT A.S.

Kepulauan Senkaku

Kapal berbendera Tiongkok telah melakukan intrusi yang melanggar hukum di sekitar Kepulauan Senkaku, sehingga menimbulkan keberatan dari Tokyo dan mendorong tindakan perlindungan oleh Pasukan Penjaga Pantai Jepang. Kepulauan Senkaku, yang diklaim dan disebut oleh RRT sebagai Diaoyu, adalah rumah bagi beragam habitat tanaman dan hewan, serta tempat penangkapan ikan idaman. Cadangan minyak dan gas alam pulau tersebut serta kedekatannya dengan rute pelayaran terkemuka juga menjadikannya menarik dalam hal ekonomi dan penting dari segi strategi.

Beberapa penangkapan ikan IUU yang paling parah terjadi di Laut Cina Selatan dan Timur ketika kapal berusaha menyembunyikan aktivitas mereka dengan menonaktifkan AIS. Namun, geolokasi RF HawkEye 360 dapat menemukan kapal gelap ini dengan menguraikan berbagai sinyal.

Selama musim puncak penangkapan ikan, HawkEye 360 mengkaji aktivitas di sekitar Kepulauan Senkaku. Catatan AIS menunjukkan banyak kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok di dalam kawasan sengketa. Yang lebih menarik lagi, data geosinyal RF HawkEye 360 menunjuk ke situs aktivitas frekuensi ultra tinggi (UHF) yang berasal dari beberapa lokasi di mana tidak ada sinyal AIS. Sinyal semacam itu agak tidak biasa di antara kapal maritim, yang menunjukkan kapal penangkap ikan Tiongkok mengoordinasikan aktivitas melalui radio push-to-talk UHF alih-alih radio maritim frekuensi sangat tinggi (VHF).

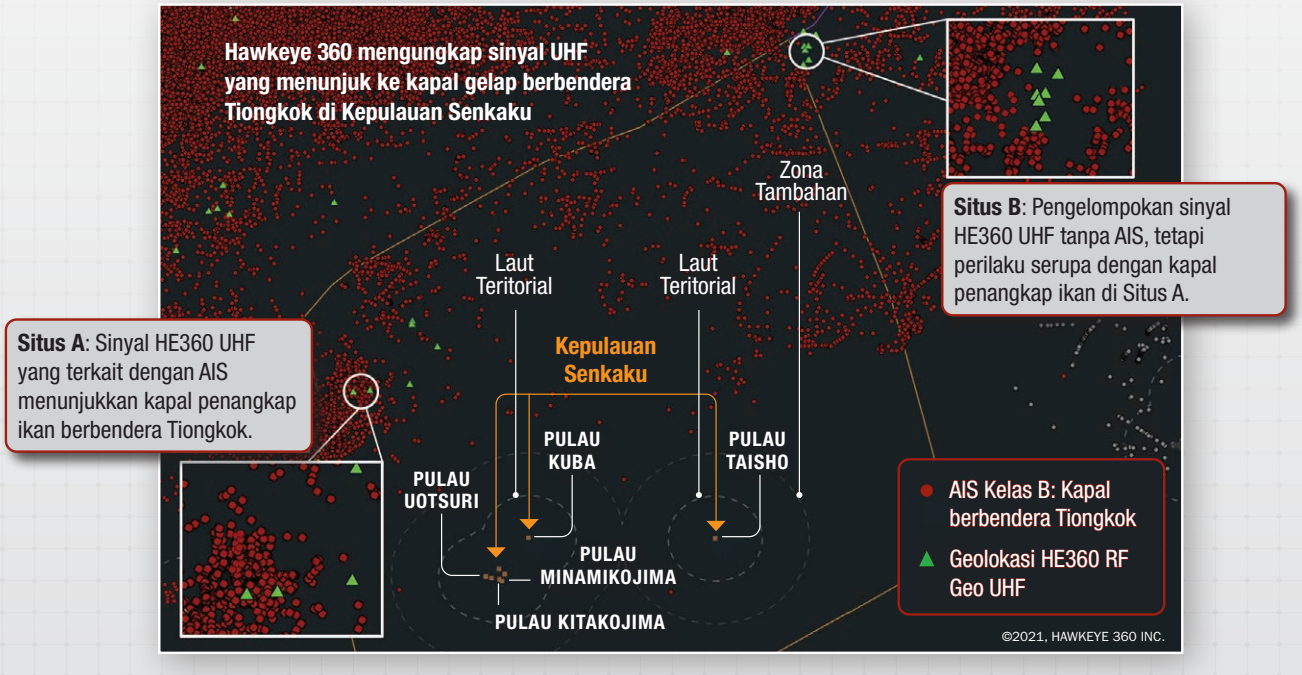

Whitsun Reef

Pada Februari 2021, 220 kapal Tiongkok merapat di dekat singkapan karang dangkal yang dikenal sebagai Whitsun Reef, yang juga merupakan bagian dari Kepulauan Spratly. RRT mengklaim armada itu terdiri dari kapal penangkap ikan yang mencari perlindungan dari cuaca buruk, tetapi Filipina melakukan siaga tinggi, mengirim patroli udara serta kapal Angkatan Laut dan Pasukan Penjaga Pantai untuk memantau. Filipina, RRT, dan Vietnam semuanya mengklaim kedaulatan atas terumbu karang itu.

Analisis sinyal komunikasi yang terdeteksi HawkEye 360 di Whitsun Reef menunjukkan pengidentifikasi Panggilan Selektif Digital VHF tidak terkait dengan kapal apa pun yang dikenal. Ini mungkin menunjukkan bahwa kapal menggunakan pengidentifikasi palsu untuk berkomunikasi satu sama lain guna menghindari deteksi.

Sumber: Basemap Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, ADX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, dan Komunitas Pengguna GIS

Scarborough Shoal

Scarborough Shoal, sebuah atol terisolasi yang terutama terdiri dari bebatuan dan terumbu karang di timur laut Laut Cina Selatan, diklaim oleh Filipina dan RRT. Sejak kebuntuan tegang tahun 2012 di antara kedua negara, Beijing telah membatasi akses Manila ke daerah itu.

Meski tampaknya tidak ada daratan atau struktur di beting itu per Juli 2020, keprihatinan tetap ada bahwa pengembangan kekuatan militer yang serupa dengan yang ada di Mischief Reef dapat menyebabkan peningkatan kontrol administratif Tiongkok atas Laut Cina Selatan serta menempatkan aset udara dan angkatan laut Tiongkok dalam jarak yang mencolok dari Filipina.

HawkEye 360 memantau Scarborough Shoal pada Juli 2020 dan mendeteksi aktivitas RF yang konsisten. Secara khusus, HawkEye 360 mengidentifikasi aktivitas RF terkonsentrasi di barat laut beting, yang tampaknya menjadi tempat pertemuan reguler untuk kapal.

Untuk membuktikan kegiatan ini, HawkEye 360 menganalisis sinyal AIS dan menghubungkannya dengan dua kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok selama periode yang sama: Zhong Guo Hai Jing 3502 (MMSI 413482730) dan pasukan penjaga pantai Tiongkok 3302 (MMSI 413480080). HawkEye 360 kemudian menganalisis citra satelit dari Planet Labs, sebuah perusahaan pencitraan yang berbasis di San Franciso, yang mengungkapkan sebuah kapal dengan dimensi fisik yang hampir sama dengan salah satu kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok yang teridentifikasi, yang menunjukkan patroli rutin di daerah tersebut.

Pelajaran yang Dipetik

Laut Cina Selatan seluas 3,4 juta kilometer persegi berbatasan dengan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, RRT, Taiwan, dan Vietnam. Ketegangan antara RRT dan penggugat lainnya atas jalur perairan strategis tersebut telah memanas selama bertahun-tahun, dengan klaim ekspansif Beijing yang sewenang-wenang ditolak oleh mahkamah internasional karena dianggap tidak sah secara hukum.

Tentara Pembebasan Rakyat Partai Komunis Tiongkok telah membangun pos terdepan militer di terumbu karang dan pulau-pulau, serta pasukan penjaga pantai dan angkatan lautnya berpatroli di perairan. RRT telah menunjukkan dirinya bersedia menerobos batas peraturan dan hukum internasional untuk membangun dominasi di laut hingga merugikan negara-negara tetangga.

RRT mampu menduduki wilayah strategis di Laut Cina Selatan, sebagiannya, akibat sulitnya memantau hamparan air yang luas. Namun, data RF HawkEye 360 dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kawasan ini, sehingga berbagai negara dapat mengerahkan patroli secara lebih efisien untuk memerangi aktivitas penangkapan ikan ilegal RRT dan upaya untuk membangun dominasi atas pulau-pulau sengketa.

Wawasan yang lebih luas tentang kegiatan angkatan laut, pasukan penjaga pantai, milisi maritim, dan armada penangkapan ikan Tiongkok akan memberi negara-negara tetangga dan masyarakat internasional landasan yang lebih kuat untuk mengevaluasi dan melawan pelanggaran tersebut. Tanpa pemantauan yang ditingkatkan, negara-negara tetangga tidak diperlengkapi dengan baik untuk menertibkan dan mengamankan perairan mereka sendiri dari penangkapan ikan ilegal dan kegiatan terlarang lainnya. □

MENGINTEGRASIKAN KEUNGGULAN

PUSAT RESPONS KRISIS INDO-PASIFIK BERADAPTASI DENGAN LINGKUNGAN SIPIL-MILITER YANG BERKEMBANG

AIYANA PASCHAL/CENTER FOR EXCELLENCE IN DISASTER MANAGEMENT AND HUMANITARIAN ASSISTANCE

Sejak didirikan pada tahun 1994, Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance (CFE-DM) telah membangun kapasitas tanggapan krisis, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, serta memperkuat hubungan untuk meningkatkan kinerja militer Amerika Serikat dan mitra selama bencana. Selain bidang-bidang inti ini, CFE-DM telah melakukan inisiatif untuk memenuhi panduan yang berasal dari Departemen Pertahanan A.S. (DOD) dan Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM). Contohnya termasuk memfasilitasi program seminar operasi penjaga perdamaian utama untuk para pemimpin senior internasional; memulai program pendidikan HIV/AIDS untuk pasukan internasional dan pelatihan peningkatan kapasitas pandemi-influenza untuk pasukan keamanan Indo-Pasifik; membantu program Badan Pembangunan Internasional A.S. yang berfokus pada USINDOPACOM dan Komando Afrika A.S.; serta mendukung program persekutuan kontraterorisme.

CFE-DM terus mengasah fokusnya dalam konteks geopolitik dan lingkungan yang dinamis, dan bagian utama dari misinya adalah pelatihan dan keterlibatan dengan mitra sipil dan militer. Ini biasanya dilakukan dengan fokus bencana alam melalui dukungan untuk organisasi regional dan latihan USINDOPACOM, serta kursus Pelatihan Tanggapan Bantuan Kemanusiaan (HART) pusat tersebut. Namun, konflik makin banyak terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk. Dalam kasus seperti invasi tidak beralasan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, rezim otoriter menargetkan warga sipil untuk mencapai tujuan politik atau nasionalis dengan segala cara. Akibatnya, CFE-DM lebih berfokus pada skenario konflik dalam pelatihan, penelitian, dan perencanaannya.

Selama 25 tahun terakhir, CFE-DM telah bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan University of Hawaii at Manoa untuk memfasilitasi kursus Darurat Kesehatan dalam Populasi Besar (Health Emergency in Large Populations - HELP) tahunan. ICRC mengembangkan kerangka kerja HELP untuk penanggap kemanusiaan selama konflik dan mendukung fasilitasinya oleh organisasi mitra di seluruh dunia. Kursus CFE-DM, yang diadakan selama dua minggu di Hawaii, mencakup peserta sipil dan militer, sebuah keseimbangan latar belakang yang memastikan pengalaman pendidikan yang berkualitas dan peluang berjejaring yang berharga di antara para profesional yang mungkin berpapasan lagi selama keadaan darurat kemanusiaan. Kursus HELP pusat tersebut kini memiliki lebih dari 600 lulusan.

Pusat ini juga memiliki kursus baru HART in Conflict (HART-C) yang memperkenalkan pasukan gabungan dan mitra A.S. pada kompleksitas pemberian bantuan kemanusiaan di zona konflik. Topiknya meliputi sistem notifikasi kemanusiaan, mekanisme koordinasi sipil-militer, persiapan untuk pengungsian sipil skala besar, analisis konflik kemanusiaan, akses dan keamanan, serta konsekuensi dari konflik bersenjata dan perang.

Tanggung jawab lain dari pusat ini meliputi integrasi perencanaan manajemen bencana ke dalam fungsi USINDOPACOM serta berkontribusi pada kebijakan dan pedoman Kantor Menteri Pertahanan A.S. CFE-DM juga melakukan penelitian dan membuat produk

ILUSTRASI FORUM

Marinir Korea Selatan dan A.S. membersihkan lumpur dan puing di luar pasar di Pohang, Korea Selatan, setelah Topan Hinnamnor pada September 2022. LETNAN SATU DAKOTA A. FORTUNA-CHUN/PASUKAN MARINIR A.S.

Pasukan Jepang dan A.S. berpartisipasi dalam latihan bantuan kemanusiaan dan bencana sebagai bagian dari Rim of the Pacific (RIMPAC) multinasional tahun 2022.
AIYANA PASCHAL/DEPARTEMEN PERTAHANAN A.S.

Personel sipil dan militer dari 15 negara berpartisipasi dalam kursus Keadaan Darurat Kesehatan dalam Populasi Besar yang diselenggarakan oleh CFE-DM melalui kemitraan dengan Komite Palang Merah Internasional dan University of Hawaii pada Agustus 2022.
AIYANA PASCHAL/DEPARTEMEN PERTAHANAN A.S.

informasi seperti buku panduan referensi manajemen bencana, lembar fakta, dan pamflet praktik terbaik, yang semuanya tersedia untuk umum secara online di cfe-dmha.org/publications. Selain itu, CFE-DM mempromosikan inisiatif untuk memudahkan aliran informasi penting di antara mitra sipil-militer selama upaya bantuan. Peneliti di pusat ini berkolaborasi dengan lembaga akademis dan organisasi mitra dalam proyek dan proposal untuk memastikan temuan mereka tersedia bagi praktisi dan pakar di lapangan dan memberikan analisis komprehensif tentang koordinasi sipil-militer di lingkungan bencana.

'SEBUAH KEHARUSAN MORAL'

CFE-DM terus beradaptasi dengan perubahan lanskap bencana alam dan ulah manusia, termasuk konflik. Inisiatif terbaru termasuk program Perlindungan Warga Sipil (POC) dan Dampak Perubahan Iklim (CCI). Program POC bertujuan mengurangi dan menanggapi kerugian yang diderita oleh warga sipil selama operasi militer. Ada tiga sarana utama untuk upaya ini: mendukung USINDOPACOM dalam mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan praktik DOD baru untuk melindungi warga sipil; mengidentifikasi dan mempromosikan praktik terbaik; serta mendorong dialog tentang tantangan utama dan praktik yang efektif di antara mitra regional. Untuk mendefinisikan praktik terbaik, CFE-DM bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan dan terus melakukan dialog erat dengan ICRC, yang, seperti CFE-DM, baru-baru ini merilis buku pegangan tentang praktik terbaik untuk mitigasi kerugian sipil.

Upaya ini bertepatan dengan Rencana Aksi Mitigasi dan Tanggapan Kerugian Sipil baru DOD, yang dirilis pada akhir Agustus 2022 atas arahan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin. Langkah rencana tersebut antara lain:

Warga desa yang terpaksa meninggalkan rumah setelah kudeta militer pada Februari 2021 di Myanmar berkumpul di sepanjang Sungai Moei di perbatasan Thailand. Di seluruh dunia, lebih dari 89 juta orang terpaksa mengungsi pada tahun itu akibat konflik, persekusi, atau kekerasan. THE ASSOCIATED PRESS

- Membangun pusat keunggulan perlindungan sipil untuk memfasilitasi analisis, pembelajaran, dan pelatihan di seluruh departemen.
- Mengembangkan standar pelaporan operasional kerugian sipil dan proses manajemen data.
- Memberikan lebih banyak informasi untuk membantu komandan dan operator agar lebih memahami lingkungan sipil, termasuk menyertakan panduan untuk membahas kerugian sipil ke dalam doktrin militer dan rencana operasional.

"Melindungi warga sipil dari kerugian sehubungan dengan operasi militer tidak hanya merupakan keharusan moral, tetapi juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang di medan pertempuran. Keberhasilan taktis dan operasional yang diperoleh dengan susah payah pada akhirnya dapat berakhir dengan kegagalan strategis jika kita tidak berhati-hati melindungi lingkungan sipil sebesar yang dimungkinkan oleh situasi," demikian ungkap sebuah rilis berita DOD.

"Yang terlewatkan adalah pendekatan DOD yang menyeluruh," kata Jenny McAvoy, penasihat dan pemimpin tim untuk program POC. McAvoy, yang telah menangani masalah perlindungan sipil selama beberapa dekade, menekankan perlunya "investasi dalam jenis kemampuan yang akan memungkinkan komandan untuk beradaptasi dengan tantangan operasi spesifik mereka."

Sebagiannya, urgensi didorong oleh meningkatnya jumlah konflik di lingkungan perkotaan dan dampaknya yang mengenaskan terhadap warga sipil. Organisasi kemanusiaan dan lembaga pemerintah A.S. berupaya mengatasi kerugian ini. Selain korban jiwa dan kehancuran, peningkatan konflik di daerah padat penduduk telah menyebabkan lonjakan jumlah pengungsi. Pada akhir 2021, 89,3 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi akibat persekusi, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau gangguan besar, demikian menurut Komisaris Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi. Di Myanmar saja, sekitar 1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah dan komunitas mereka di tengah kekerasan yang sedang berlangsung yang dipicu oleh kudeta militer pada Februari 2021.

> "YANG SERING KAMI TEMUKAN DALAM KONFLIK BERSENJATA SAAT INI ADALAH PEMBATASAN PERGERAKAN PERSONEL KEMANUSIAAN SECARA LANGSUNG DIBERLAKUKAN OLEH AKTOR BERSENJATA UNTUK MENGURANGI AKSES KAMI KE POPULASI YANG TERDAMPAK."
>
> – **Helene Skaardal**
> Kantor Koordinasi
> Urusan Kemanusiaan P.B.B.

Ketika para pengungsi melintasi perbatasan untuk melarikan diri dari zona konflik, ada perdebatan tentang kedaulatan — kemampuan suatu negara untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam perbatasannya. Beberapa negara telah menolak pengungsi, sementara yang lain mengharuskan pengungsi memenuhi kriteria tertentu untuk masuk. Kebijakan semacam itu menimbulkan pertanyaan etis dan praktis yang penting tentang bagaimana mengakomodasi populasi pengungsi secara aman mengingat prinsip internasional non-refoulement, yang melarang mengembalikan pengungsi secara paksa ke negara asal jika mereka memiliki ketakutan yang beralasan akan persekusi.

McAvoy menyoroti pentingnya keterlibatan CFE-DM dengan mitra regional dalam mengatasi masalah ini, mengingat sentralitas kemitraan keamanan dalam strategi militer A.S. secara keseluruhan. Pusat ini juga bekerja dengan Kantor P.B.B. untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), yang berfokus pada sinkronisasi tanggapan kemanusiaan global dan upaya bantuan, advokasi, pengembangan kebijakan, penyediaan layanan manajemen informasi, dan mobilisasi sumber daya keuangan.

"Perlindungan warga sipil adalah inti dari semua yang kami lakukan sebagai aktor kemanusiaan untuk meringankan penderitaan, mengurangi risiko, dan mencegah kekerasan terhadap populasi yang terkena dampak krisis, yang dapat mengambil berbagai bentuk dalam bencana dan konflik serta membutuhkan tanggapan multisektoral yang komprehensif," kata Helene Skaardal, seorang petugas urusan kemanusiaan di Kantor Regional UNOCHA untuk Asia dan Pasifik.

MANDAT PERAN MILITER

Koordinasi antara aktor kemanusiaan dan militer dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan pada apakah tanggapan tersebut berkaitan dengan bencana alam, konflik bersenjata, atau keadaan darurat kompleks lainnya. Di Indo-Pasifik, banyak militer memainkan peran yang diamanatkan dalam menanggapi bencana alam, menyediakan kemampuan yang sering melampaui sumber daya yang tersedia untuk lembaga sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Oleh karena itu, dalam tanggapan bencana alam, "penting bagi kami untuk menetapkan mekanisme koordinasi sipil-militer dengan jelas sehingga dapat membagi tugas, berbagi informasi, dan bersama-sama merencanakan operasi," kata Skaardal.

"Namun, dalam keadaan darurat yang kompleks dan konflik bersenjata, militer sering menjadi pihak yang berkonflik," ungkapnya. "Jadi, sebagai titik awal, keterlibatan kemanusiaan dengan aktor militer tidak didasarkan pada model kerja sama tetapi lebih pada koeksistensi dan diplomasi kemanusiaan." Itu karena upaya kemanusiaan harus selalu tetap independen dari tujuan politik atau militer, sehingga penting bagi aktor kemanusiaan untuk tetap netral dan tidak memihak sementara, pada saat yang sama, mempromosikan dan mengadvokasi hasil perlindungan. "Yang kami coba lakukan pada dasarnya adalah menegosiasikan akses kemanusiaan untuk menjangkau orang yang terdampak konflik dengan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dan mengadvokasi perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata Skaardal.

Lanskap perang yang berkembang, termasuk meningkatnya urbanisasi dan penargetan warga sipil yang disengaja, menghadirkan tantangan besar bagi upaya kemanusiaan untuk mengurangi risiko dan menawarkan perlindungan. "Yang sering kami temukan dalam konflik bersenjata saat ini adalah pembatasan pergerakan personel kemanusiaan secara langsung diberlakukan oleh aktor bersenjata untuk mengurangi akses kami ke populasi yang terdampak," kata Skaardal, yang dikerahkan ke Ukraina untuk membantu meningkatkan akses kemanusiaan di zona konflik setelah invasi Rusia. "Di satu sisi, kami tidak dapat menjangkau populasi yang terkena dampak konflik dengan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan, di sisi lain, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang mungkin terjadi tidak banyak diketahui."

Negosiasi akses kemanusiaan sering kali lambat akibat sifat hierarkis aktor bersenjata, yang dapat

Warga meninjau reruntuhan pusat perbelanjaan di Kyiv, Ukraina, setelah pengeboman oleh invasi pasukan Rusia pada Maret 2022. Upaya tanggapan bencana berkembang dalam menghadapi meningkatnya urbanisasi konflik di seluruh dunia. THE ASSOCIATED PRESS

menunda pengiriman bantuan penyelamatan jiwa dan menghambat solusi lokal. Akan tetapi, memberikan bantuan tanpa keterlibatan pihak yang berkonflik dapat menimbulkan risiko tinggi bagi personel kemanusiaan. Hambatan ini terlihat jelas di Myanmar, di mana junta pada September 2022 memerintahkan badan P.B.B. dan LSM untuk berhenti memberikan bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, di mana akses ke masyarakat diblokir oleh bentrokan antara pasukan militer dan kelompok bersenjata etnis, demikian menurut laporan situs web berita The Irrawaddy.

Meski adanya tantangan tersebut, UNOCHA dan organisasi lain bekerja untuk melindungi warga sipil, di samping upaya untuk mengodifikasikan perlindungan warga sipil ke dalam praktik militer, seperti Rencana Aksi Mitigasi dan Tanggapan Kerugian Warga Sipil DOD yang baru. Namun, Skaardal mengatakan, mekanisme akuntabilitas harus diperkuat untuk pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional. "Bekerja dalam sistem P.B.B. dan bekerja di sektor kemanusiaan, sentralitas perlindungan telah ada sejak lama," ungkapnya. "Ada proses di lembaga kemanusiaan selama beberapa tahun untuk memperkuat sentralitas perlindungan, tetapi mungkin sekarang memperoleh momentum baru karena perang di Ukraina, tetapi juga pengakuan bahwa Ukraina hanya satu konteks profil tinggi dari begitu banyak contoh di mana penduduk sipil paling menderita."

IKLIM PERUBAHAN

Dampak destabilisasi dari perubahan iklim mengancam keamanan manusia. Gelombang panas dan kekeringan mengurangi produksi pangan. Banjir, badai, dan kebakaran hutan merusak dan menghancurkan kehidupan, mata pencarian, dan infrastruktur. Perubahan iklim dapat membuat lahan rentan tidak dapat dihuni akibat genangan air atau penggurunan, sehingga mendorong migrasi manusia saat orang melarikan diri dari ancaman ini.

"Kami telah menyaksikan dampak ini yang akan terus terjadi," kata Steve Frano, manajer program Dampak Perubahan Iklim CFE-DM yang baru. "Contoh yang jelas di kepulauan Pasifik adalah kenaikan permukaan air laut. Ini tidak hanya berupa air yang bergerak naik dan pada dasarnya memaksa masyarakat keluar. Ini akan menjadi contoh permulaan lambat, di mana kini terdapat kenaikan permukaan air laut yang cukup dan gelombang badai yang cukup sehingga intrusi air asin telah memengaruhi kemampuan mereka untuk hidup dan menanam pangan. Jika tidak dapat beradaptasi untuk bertahan hidup di tanah air mereka lagi, mereka harus pindah … jadi ke mana mereka bisa pergi? Bagi banyak negara tersebut, komunitas, keluarga, dan sejarah mereka semuanya terpaut dengan tanah air, jadi gagasan untuk meninggalkan tanah air, dalam beberapa kasus, merupakan solusi yang tidak dapat dipertahankan."

Program CCI mendukung pembangunan kesadaran dan pertukaran pengetahuan untuk menekankan dampak perubahan iklim pada inisiatif keamanan regional yang memajukan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Fokus utamanya adalah memfasilitasi jaringan regional komprehensif yang terdiri dari pakar keamanan iklim dan menyediakan forum untuk bertukar informasi serta mendiskusikan rencana dan program kerja sama untuk menanggapi dampak keamanan dari perubahan iklim. Dengan melibatkan mitra regional, para ahli dapat berbagi pendekatan negara mereka terhadap perubahan iklim dan keamanan serta menyoroti prioritas. "Kami berbicara dengan para sekutu dan mitra, kami mengembangkan program dan inisiatif, dan kami menggabungkannya dalam perencanaan kami sendiri," kata Frano.

Memahami potensi perubahan lingkungan alam — serta dampaknya terhadap masyarakat, komunitas, dan negara — juga sangat penting bagi entitas militer regional seperti USINDOPACOM karena masalah tersebut memengaruhi kemampuan militer untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Ketika negara berpaling ke pihak lain untuk bantuan dalam menghadapi bencana alam yang lebih parah dan sering, mungkin ada kekhawatiran akan berkurangnya kedaulatan. Bagi beberapa Negara Pulau Pasifik, misalnya, meningkatnya permukaan air laut telah menyapu beberapa perbatasan yang menentukan kedaulatan mereka — erosi yang pada akhirnya dapat mendorong relokasi manusia berskala besar dan, pada gilirannya, merusak landasan keamanan regional. "Ketika kita melihat kedaulatan dan HADR [bantuan kemanusiaan dan tanggapan bencana], itu tidak selalu berupa skenario gempa: sesuatu terjadi; kita pergi dan menanggapinya," kata Frano. "Namun perubahan lain inilah yang akan mendorong kita ke arah yang akan menekan kemampuan negara untuk memberikan layanan bagi rakyat mereka."

Dengan demikian, program dan cabang CFE-DM akan tetap melibatkan mitra di kawasan ini dan sekitarnya untuk memastikan bahwa masalah perubahan iklim dan perlindungan warga sipil diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan HADR. Menjelang hari jadinya yang ke-30, CFE-DM tetap menjadi sumber daya yang kaya untuk militer A.S. dan mitra, lembaga sipil, serta organisasi kemanusiaan yang berusaha untuk meningkatkan tanggapan sipil-militer terhadap bencana alam dan ulah manusia — bidang fungsional intinya, yakni pelatihan dan keterlibatan, penelitian, berbagi informasi, dan perencanaan operasional sama relevannya saat ini seperti ketika pusat itu didirikan. Pada saat yang sama, CFE-DM terus berpivot dan berkembang untuk memenuhi persyaratan yang muncul dari DOD dan USINDOPACOM, dan program Perlindungan Warga Sipil dan Dampak Perubahan Iklim hanyalah dua dari inisiatif baru untuk menanggapi perubahan lanskap strategis Indo-Pasifik dan global. ◻

MEMBONGKAR TATA NEGARA EKONOMI TIONGKOK

Apa yang Terjadi Ketika Sabuk dan Jalan Beijing Masuk ke Papua Nugini?

PETER CONNOLLY

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping bertemu dengan delapan pemimpin Pulau Pasifik di Port Moresby pada 16 November 2018, dan meningkatkan hubungan mereka menjadi "kemitraan strategis yang komprehensif." Xi kemudian mendorong mereka yang belum bergabung dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative - BRI) untuk melakukannya. Papua Nugini (PNG) telah memimpin dengan menandatangani nota kesepahaman (MOU) BRI dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Juni 2018 dan menjadi tuan rumah forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada tahun itu. Namun, pada tahun 2017 sebagian besar pejabat dan pengusaha Papua Nugini yang saya wawancarai tidak percaya negara mereka akan bergabung dengan BRI karena tidak banyak yang dapat ditawarkan PNG kepada Tiongkok dari segi ekonomi. Artikel ini diambil dari karya lebih panjang yang diterbitkan dalam jurnal Security Challenges pada tahun 2020, yang membandingkan wawancara dan pengamatan dari kerja lapangan doktoral saya pada tahun 2017 dengan tahun 2019 untuk menilai apa yang berubah di PNG ketika negara itu bergabung dengan BRI.

Migran ekonomi Tiongkok ke negara-negara Pulau Pasifik tiba secara bergelombang, dimulai dari gelombang pertama, yang dikenal sebagai "Tionghoa lama" yang meninggalkan provinsi Fujian dan Guangdong dari pertengahan abad ke-19. Gelombang kedua tiba melalui Asia Tenggara pada tahun 1950-an dan 1970-an. Gelombang ketiga, yang dikenal sebagai "Tionghoa baru," dimulai pada 1990-an selama kebijakan "Going Out" RRT, yang dirancang untuk mendorong perusahaannya berinvestasi di luar negeri. Saya meyakini bahwa sekarang ada gelombang keempat, yang terdiri dari karyawan dan pejabat badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok yang mewakili kepentingan negara Tiongkok, yang makin bertambah dengan kehadiran BRI.

Strategi Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) Beijing dimulai sebagai visi Xi akan keterlibatan global RRT yang dipimpin dari segi ekonomi pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, RRT mengubah nama bagi audiensi eksternal dari OBOR menjadi BRI untuk menghindari persepsi bahwa itu adalah sebuah strategi, tetapi terus menggunakan kata awal untuk OBOR dalam bahasa Mandarin. Artikel ini menggunakan BRI untuk merujuk pada OBOR sesuai dengan penggunaan umum di dunia berbahasa Inggris. Kendati demikian, BRI dan OBOR adalah satu hal yang sama. Artikel ini berpendapat bahwa BRI adalah strategi geoekonomi untuk menyebarkan pengaruh global RRT dan meningkatkan posisinya sebagai kekuatan yang meningkat.

PNG adalah negara Pulau Pasifik pertama yang bergabung dengan BRI. Perdana Menteri saat itu Peter O'Neill melakukan kunjungan resmi ke Beijing pada Juni 2018, mencari dukungan untuk menjadi tuan rumah APEC pada tahun itu. Xi meyakinkan O'Neill bahwa Beijing akan membantu persiapan PNG untuk APEC, dan bahwa dia akan menghadiri KTT tersebut. Untuk mendukung acara tersebut, China Harbour Engineering Co. (CHEC) akan membangun 10 kilometer jalan empat lajur dan APEC Haus, fasilitas untuk forum

Kilang nikel Ramu NiCo Tiongkok berlokasi di Teluk Basamuk, Distrik Pesisir Rai, Provinsi Madang, Papua Nugini. PETER CONNOLLY

tersebut, dalam 200 hari. Lima bulan kemudian, Xi melakukan kunjungan kenegaraan ke Port Moresby dan mengundang para pemimpin dari delapan negara Pulau Pasifik yang mengakui RRT untuk menemuinya di sana sebelum KTT APEC. Mereka semua menandatangani MOU BRI dengan RRT, dan dua lagi mengalihkan pengakuan diplomatik mereka dari Taiwan ke Beijing pada tahun berikutnya, bergabung dengan BRI dalam prosesnya.

Peristiwa tersebut menghasilkan antisipasi besar perihal keuntungan apa yang dapat diberikan BRI untuk pengembangan PNG, disertai dengan kekhawatiran tentang berapa besar biayanya. Namun, masih belum ada kejelasan tentang apa itu BRI.

Perspektif Seorang Pejabat Tiongkok

Seorang pejabat Tiongkok di PNG menjelaskan kepada saya pada tahun 2019 bahwa BRI adalah "konsep yang luas … sebuah gambar, sapuan kuas — bukan poin yang sangat halus." BRI adalah "platform untuk kerja sama … alat untuk memajukan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan." Dia menekankan proses konsultasi timbal balik dengan otoritas PNG untuk menyelaraskan dengan strategi nasional PNG, menggaungkan kalibrasi ulang BRI 2018 setelah dikritik karena pinjaman predator.

Ketika ditanya, "Jadi apa itu proyek BRI?" pejabat itu mengakui: "Tidak ada definisi terperinci." Namun dia melanjutkan, "proyek apa pun yang sejalan dengan Lima Konektivitas" perdagangan, infrastruktur, kebijakan, orang ke orang, dan keuangan dapat "secara luas dianggap sebagai proyek BRI." Dia menambahkan bahwa "perusahaan Tiongkok memiliki keunggulan komparatif" karena mereka lebih terjangkau daripada perusahaan Barat.

Meski pedoman tersebut mungkin masuk akal untuk perencanaan strategis Tiongkok, ini terlalu luas bagi pihak lain untuk membedakan kegiatan mana yang merupakan bagian dari BRI. Itu bisa jadi dirancang demikian, sehingga memungkinkan RRT untuk memilih apa yang termasuk dan tidak termasuk sesuai dengan narasi globalnya. Pejabat itu menjelaskan bahwa proyek BRI tidak harus dibayar dengan uang Tiongkok — lembaga multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, atau bahkan negara lain, dapat menyediakan pembiayaan. Selain itu, proyek itu mungkin telah dimulai sebelum adanya BRI. "Jika sejalan dengan Lima Konektivitas, itu adalah proyek BRI," ungkapnya.

Penjelasan pejabat tersebut menunjukkan bahwa proyek BRI bisa berupa apa saja yang disampaikan oleh perusahaan Tiongkok asalkan sesuai dengan narasi strategis RRT. Hal ini memungkinkan RRT untuk mencapai tujuan geopolitik dalam kampanye untuk pengaruh global dengan menggunakan alat ekonomi. Ini makin banyak dibayar oleh pihak lain di dalam kerangka kerja BRI.

Perspektif Baru Tiongkok

Menurut seorang anggota terkemuka komunitas bisnis Tiongkok Papua Nugini di Port Moresby, terjadi arus masuk perusahaan konstruksi Tiongkok ke PNG dalam persiapan untuk Olimpiade Pasifik 2015. Sebagian besarnya adalah BUMN Tiongkok yang telah menyelesaikan proyek tetapi tetap tinggal di negara itu, sehingga mendorong penurunan harga dan meningkatkan persaingan. Mereka memiliki keunggulan kompetitif karena membawa pekerja dari Tiongkok dan membayar upah yang lebih rendah, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari perusahaan lokal hingga 50%.

Pengusaha itu menjelaskan bahwa O'Neill lebih menyukai perusahaan Tiongkok, tetapi ketika dia secara tak terduga digantikan oleh Perdana Menteri James Marape pada tahun 2019, orang-orang Tiongkok baru menjadi prihatin. Marape telah berjanji untuk "mengambil kembali PNG," dan ini ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai penolakan dominasi asing di beberapa sektor ekonomi PNG, termasuk pengaruh Tiongkok. Pengusaha Tiongkok itu menambahkan bahwa kebingungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru ini berarti: "Ketika pemerintah tidak tahu, ADB yang membuat keputusan."

Narasumber tersebut mengonfirmasi bahwa BRI bertujuan untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi RRT di Pasifik. Setelah MOU ditandatangani, PNG dianggap "berada di peta BRI" dan "terbuka untuk bisnis" dari perspektif Tiongkok. Jumlah BUMN Tiongkok di PNG perlahan tumbuh sejak China Overseas Engineering Co. tiba pada tahun 1995, tetapi tumbuh hampir dua kali lipat pada tahun setelah PNG bergabung dengan BRI. Antara Juni 2018 dan Juli 2019, jumlah BUMN Tiongkok di PNG meningkat dari 21 menjadi 39. Perusahaan Papua Nugini, Tiongkok lama, dan Barat tidak dapat bersaing dengan kejenuhan pasar ini. Sekali lagi, sebagian besar perusahaan baru memasuki negara itu untuk melakukan tugas tertentu, kemudian tinggal dan memenangkan kontrak dengan menawarkan harga yang sangat rendah dibandingkan pesaing. Dominasi pasar ini diperkuat oleh sebagian besar perusahaan Tiongkok yang menawarkan pengajuan tender tambahan dari anak perusahaan untuk mencegah persaingan.

Lonjakan jumlah BUMN ini dibuktikan dengan membandingkan daftar 2018 dan 2020 dari perusahaan besar Tiongkok dalam panduan investasi asing Kementerian Perdagangan RRT (MOFCOM) untuk PNG. Situs web Otoritas Promosi Investasi PNG pada akhir tahun 2019 juga menunjukkan lebih dari 79 perusahaan Tiongkok dan 12 asosiasi telah terdaftar di PNG sejak 1995. Ini menunjukkan keberadaan banyak anak perusahaan dan perusahaan kecil di luar perusahaan besar yang terdaftar oleh MOFCOM.

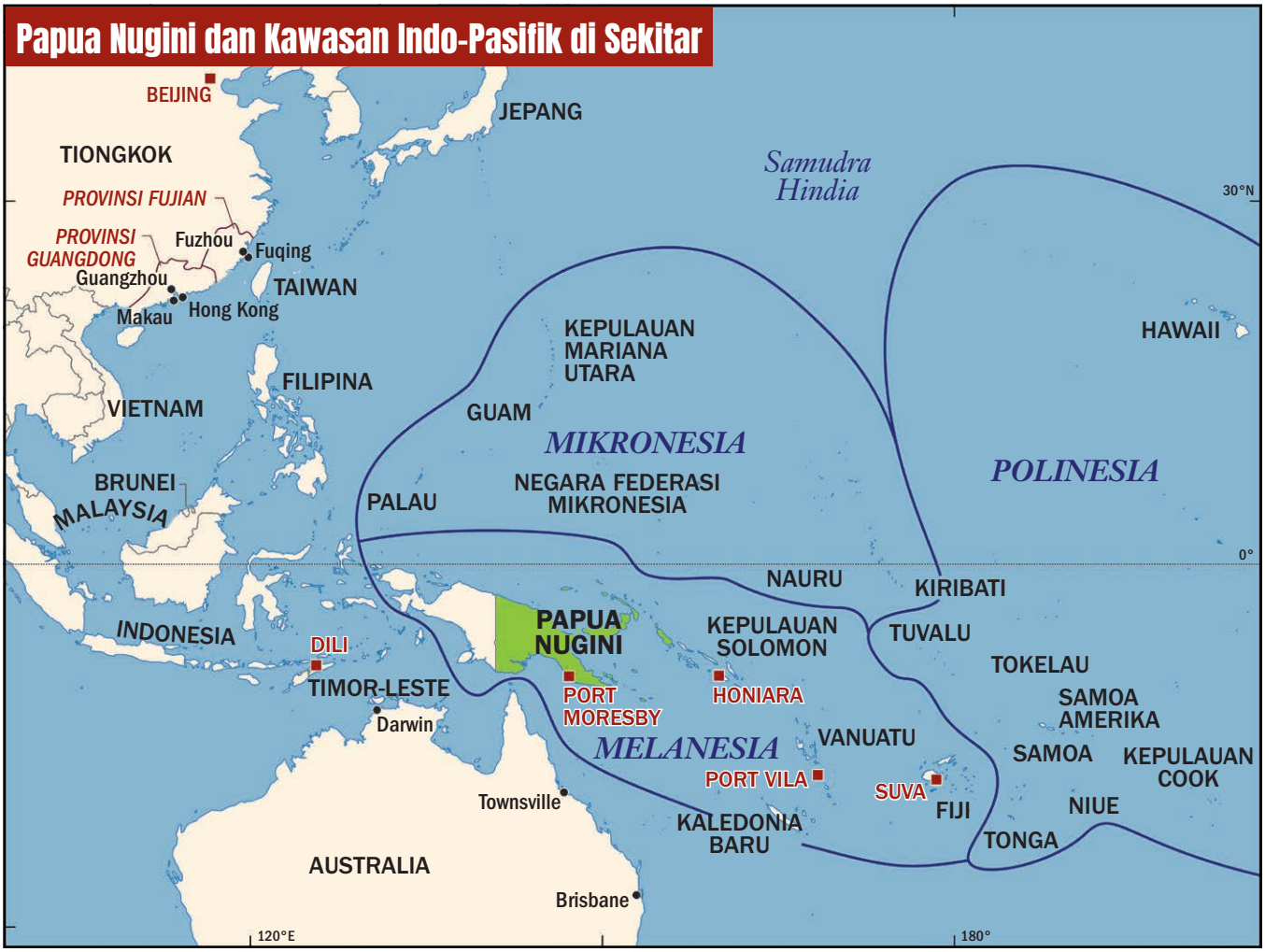

Sumber: CartoGIS Services, Australian National University

Perspektif Badan Usaha Milik Negara Tiongkok

Seorang eksekutif dari BUMN konstruksi Tiongkok memandang BRI hanyalah sekadar label untuk hal yang telah terjadi selama lebih dua dekade melalui kebijakan "Going Out". Dia menyesalkan bahwa BRI buruk bagi bisnis karena membuat takut pemerintah Barat, yang menggambarkannya sebagai "pengumuman keras akan kebangkitan Tiongkok [yang] tidak memberikan perbedaan" di PNG sebab tidak membawa pendanaan tambahan Tiongkok. "Kami di sini untuk berbisnis dan ingin menghindari masalah politik," ungkapnya, tetapi mengklarifikasi: "Kami pengusaha, tetapi kami adalah pengusaha milik negara — BUMN dapat diperintahkan untuk mendukung hal yang diminta negara."

BUMN utama bekerja sama erat dengan konselor ekonomi dan komersial MOFCOM, yang tampaknya mengoordinasikan proyek BRI di PNG. Eksekutif Tiongkok tersebut mengatakan BUMN menerima bahwa arahan tersebut mungkin melayani tujuan strategis atau politik, meski tidak memiliki logika ekonomi atau kemanfaatan.

BUMN adalah sarana utama tata negara ekonomi Tiongkok dan tampaknya menjadi instrumen geoekonomi yang ideal. David Baldwin pada tahun 1985 menetapkan teknik tata negara ekonomi telah digunakan sepanjang sejarah untuk melaksanakan kekuatan nonekonomi dalam upaya untuk memengaruhi kebijakan negara lain. Edward Luttwak pada tahun 1990 mengusulkan "geo-ekonomi" sebagai persaingan geopolitik tanpa perang, dan Robert Blackwill dan Jennifer Harris pada tahun 2016 menggambarkan ini sebagai upaya mencapai tujuan geopolitik dengan alat ekonomi. Niat seperti itu dapat menyebabkan alat ekonomi beroperasi bertentangan dengan asumsi ekonomi. Sebagai contoh, Ching Kwan Lee pada tahun 2017 menunjukkan bahwa BUMN Tiongkok di Zambia memiliki motivasi yang berbeda dengan BUMN Barat karena mereka mencari "modal negara" alih-alih keuntungan ekonomi murni. Contoh filosofi ini di PNG adalah tambang dan kilang nikel dan kobalt Ramu NiCo di provinsi Madang, yang dioperasikan oleh BUMN China Metallurgical Group Corp. (MCC). Dari tahun 2007, tambang Ramu NiCo beroperasi dengan kerugian selama lebih dari satu dekade untuk mencapai akumulasi jangka panjang dari sumber daya strategis ini.

Namun, peralihan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taipei ke Beijing pada tahun 2019 memberikan contoh yang lebih langsung tentang BUMN Tiongkok

yang dipekerjakan untuk tata negara ekonomi guna mencapai hasil geopolitik. Manajer umum Pasifik Selatan untuk China Civil Engineering Construction Corp. (CCECC), yang berbasis di Vanuatu, menawarkan hibah dan pinjaman senilai 7,6 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) kepada Kepulauan Solomon untuk mendorong Perdana Menteri Manasseh Sogavare untuk melakukan peralihan. CCECC sejak itu berkomitmen membangun infrastruktur di Honiara untuk Pacific Games 2023, memenuhi kepentingan signifikan bagi pemerintah Sogavare.

Eksekutif BUMN itu menjelaskan bahwa dia dengan senang hati akan menggunakan dana asing dan menyatakan preferensi absolut untuk uang ADB daripada bank kebijakan atau bank komersial Tiongkok. Dia mengatakan BUMN khususnya lebih memilih pembiayaan ADB karena bank tersebut melakukan penyelidikan profesional dan studi fasilitas, sementara bank Tiongkok mengharuskan negara tuan rumah untuk melakukan proses ini, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan penundaan, terutama dalam pembayaran. Dia menambahkan bahwa tidak ada tekanan dari negara Tiongkok untuk menggunakan pembiayaan Tiongkok sebagai bagian dari BRI. RRT tampaknya senang menghabiskan uang pihak lain dan menerima pujian untuk hal tersebut.

Pendanaan BRI

Ketertarikan pada pembiayaan ADB menjadi hal umum di kalangan BUMN Tiongkok di PNG antara tahun 2014 dan 2019. CHEC dan CCECC, yang tampaknya telah menjadi dua BUMN Tiongkok terkemuka untuk memajukan BRI di Pasifik Barat Daya, terutama berfokus pada pendanaan multilateral. Sekitar 90% proyek CHEC di PNG didanai oleh ADB dan 75% proyek CCECC di Vanuatu didanai oleh Bank Dunia, demikian menurut para eksekutif senior pada tahun 2019. Di kantor ADB di Port Moresby, seorang spesialis infrastruktur memperkirakan BUMN Tiongkok memiliki kontrak untuk lebih dari 80% proyek infrastruktur ADB di PNG pada tahun 2019. Dia menjelaskan proses ADB yang ketat dan memberikan data untuk tiga program infrastruktur selama satu dasawarsa untuk memperluas dan meningkatkan jaringan jalan di dataran tinggi dan meningkatkan lapangan udara provinsi. Berbagai proyek tersebut jelas penting bagi perekonomian dan rakyat PNG.

Spesialis itu meyakini bahwa perusahaan Tiongkok lebih menyukai ADB karena ADB membayar kontraktor secara langsung dan dapat diandalkan. Dia mengatakan BUMN Tiongkok selalu memberikan tawaran terendah, sementara ADB menerima nilai bagus dari persaingan ini dan memastikan kualitas melalui prosesnya.

Empat kontributor terbesar ADB, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia, tidak mendukung atau berpartisipasi dalam BRI. Negara-negara tersebut berkomitmen untuk membantu pembangunan PNG tetapi tidak akan mengklasifikasikan kontribusi mereka melalui ADB sebagai bagian dari BRI. Pada saat yang sama, proyek-proyek yang didanai oleh uang mereka tetapi dijalankan oleh BUMN Tiongkok untuk ADB sering diklaim oleh RRT sebagai proyek BRI. Meski RRT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dana ADB, pada tahun 2018 RRT juga merupakan peminjam terbesar ADB. Ini herannya menarik sedikit perhatian, meski memiliki implikasi yang signifikan bagi pesaing RRT.

Dinny McMahon, seorang penulis dan mantan koresponden keuangan surat kabar Wall Street Journal di Tiongkok, menganalisis kepemilikan mata uang asing China Development Bank (CDB) — bank yang lebih besar dari dua bank kebijakan Tiongkok. Dia menemukan bahwa CDB meningkatkan mata uang asingnya dengan mantap hingga tahun 2014 tetapi melambat menjadi kenaikan bertahap dari tahun 2014 hingga 2016, tepat ketika Xi mulai mendukung OBOR. Pada tahun 2017, ketika BRI yang berganti nama memperoleh momentum dengan Forum Sabuk dan Jalan pertama, kepemilikan mata uang asing CDB mulai menurun. “Ini benar-benar aneh karena di sini adalah CDB, yang seharusnya menjadi ujung tombak sehubungan dengan BRI Tiongkok, tetapi mata uang asingnya malah menurun,” kata McMahon. Dia mengaitkan hal ini dengan pengurangan cadangan devisa Tiongkok sebesar hampir 25% pada tahun 2016, dari 64.339 triliun rupiah (4,2 triliun dolar A.S.) menjadi 49.020 triliun rupiah (3,2 triliun dolar A.S.). People’s Bank of China, bank sentralnya, mencoba melindungi renminbi dengan menggunakan dua bank kebijakan sebagai kedok untuk membantu menopang mata uang Tiongkok.

Hal ini memengaruhi penerapan BRI pada PNG. Xi menjanjikan pinjaman senilai 4,6 triliun rupiah (300 juta dolar A.S.) dari CDB kepada O’Neill di forum APEC 2018, tetapi tampaknya CDB enggan menurutinya. Setelah setahun negosiasi sia-sia, Australia memberikan pinjaman sebagai bantuan anggaran langsung untuk memenuhi utang PNG. Mungkinkah kementerian Tiongkok seperti MOFCOM, dan bank kebijakan seperti CDB, melihat BRI lebih sebagai risiko daripada peluang, terutama di tempat yang dianggap lebih periferal dan kurang aman? Bank ExIm yang lebih kecil secara tradisional memiliki kehadiran yang lebih besar dalam pinjaman Kepulauan Pasifik, tetapi tampaknya telah mengalami tekanan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan internasional mungkin akhirnya harus membayar untuk bagian yang signifikan dari proyek yang dijanjikan oleh RRT di bawah BRI. Meski mungkin tidak sesuai dengan pesan strategis Tiongkok, hal itu sejalan dengan setiap perspektif Tiongkok yang ditinjau dalam studi kasus ini. BUMN Tiongkok di PNG jelas lebih menyukai pembiayaan ADB dan telah menciptakan lingkungan persaingan ketat untuk pembiayaan multilateral, di mana sebagian besar lainnya tidak dapat bersaing dengan biaya mereka yang rendah. Bantuan, bank kebijakan, dan lembaga sentral Tiongkok mungkin telah mencapai misinya dengan membangun dominasi pasar PNG, sehingga RRT puas untuk menumbuhkan reputasinya melalui BRI yang makin

Pekerja Tiongkok dari kilang Ramu NiCo membeli hasil bumi dari perempuan Papua Nugini di dekat Basamuk. SHAUN GESSLER

didanai oleh pihak lain. Lingkungan ini memungkinkan tata negara ekonomi Tiongkok untuk mengejar tujuan geopolitik dan geostrategi.

Perspektif Papua Nugini

Setelah mengamati kedatangan BRI di PNG dari perspektif Tiongkok, pertanyaan yang paling penting adalah: Apa artinya bagi Warga Papua Nugini? Sebagian besar orang di PNG melihat perlunya infrastruktur dan keuangan untuk mengembangkan ekonomi, secara nasional dan lokal. Hal ini mengarah pada tingginya ekspektasi terhadap BRI. Namun, harapan ini telah bercampur dengan pandangan yang seimbang dan pragmatis dari maksud di balik BRI, bagaimana penyampaiannya, dan konsekuensi potensialnya. Pemikiran seperti itu adalah dasar bagi lembaga PNG dalam mengejar kepentingan nasionalnya.

Pada tahun 2017, sebelum negaranya bergabung dengan BRI, seorang pengusaha PNG menggambarkan hal yang dia harapkan dari kemitraan ekonomi dengan RRT. Dia mengatakan "Tiongkok mengubah lanskap negara ini dengan jalan, pelabuhan, dan serat optik" dan "oportunisme akar rumput Fujian" tetapi meyakini bahwa PNG hanya "mendapatkan rongsokan dari Tiongkok." Dia meyakini "periode 'merkantilisme barat liar' sudah berakhir," sebab pasar PNG telah belajar untuk menuntut uji tuntas dan standar yang lebih tinggi, sementara kepemimpinan Tiongkok sekarang mengharuskan BUMN untuk mengangkat standar kepatuhan mereka secara global. "Dalam 10 tahun ke depan, Tiongkok akan menyukseskan atau menghancurkan kawasan ini," ungkapnya. Sehubungan dengan pengaruh Tiongkok, dia menyimpulkan bahwa pilihan "koeksistensi atas kohabitasi tergantung pada disiplin negara." Disiplin ini telah diuji sejak tahun 2018.

Dua tahun kemudian, seorang analis Papua Nugini menggambarkan bagaimana O'Neill dianggap sangat dipengaruhi oleh Tiongkok saat dia menjabat, dan bahwa pencopotan dirinya terkait dengan persepsi ini. Ketika O'Neill putus asa untuk mendapatkan pembiayaan dalam persiapan untuk APEC, "Tiongkok melihat peluang untuk memperkuat tangannya dengan PNG," kata analis itu. Wakil Perdana Menteri PNG saat itu, Charles Abel, khawatir dengan utang dan ingin menggunakan pembiayaan ADB atau Bank Dunia alih-alih ExIm Bank. Menurut beberapa pejabat, persepsi penangkapan elite dalam hubungan Tiongkok dengan PNG berkembang antara penandatanganan MOU BRI pada Juni 2018 dan APEC lima bulan kemudian.

Seorang pejabat senior dari Departemen Luar Negeri PNG mengatakan bahwa RRT adalah mitra pembangunan yang penting, memberikan infrastruktur murah yang sangat

Sebuah kapal pesiar berlabuh di Rabaul di provinsi East New Britain, Papua Nugini, pada Agustus 2017.
PETER CONNOLLY

dibutuhkan PNG. Namun dia menambahkan, "Meski perlu berkembang, kami juga perlu tetap memperhatikan peraturan sendiri … Ini hal yang baik, tetapi kami perlu menerapkan integritas di kedua sisi." Dia mengamati PNG berada di persimpangan jalan dan perlu mengembangkan "mekanisme penyaringan" untuk melestarikan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan Tiongkok.

Seorang pejabat senior keamanan Papua Nugini mengamati bahwa hubungan politik Tiongkok-PNG pada tahun 2018 belum pernah terjadi sebelumnya dan matang di APEC melalui percakapan antara O'Neill dan Xi. Politisi lain khawatir mereka ditinggalkan dari diskusi ini. Pejabat keamanan tersebut meyakini bahwa hal ini berkontribusi pada kejatuhan O'Neill, dan mengatakan bahwa "kemesraan politik tersebut mengganggu." Dia mengakui potensi kehadiran Tiongkok akan memengaruhi keamanan dan stabilitas di PNG. Pejabat senior PNG lainnya mengamati bahwa "orang-orang Tiongkok memengaruhi perpecahan karena keengganan mereka untuk berasimilasi ke dalam komunitas." Tumbuhnya kehadiran Tiongkok berisiko menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan ketidakamanan atau dikaitkan dengan keluhan yang ada. Saya menyebut hal ini sebagai "gesekan yang tidak disengaja."

Wawancara dengan pejabat senior pemerintah PNG pada tahun 2017 dan 2019 menunjukkan pemahaman bersama tentang kepentingan nasional mereka. Ini termasuk kesadaran akan perlunya menyeimbangkan risiko dan peluang ketika hubungan negara mereka dengan RRT berkembang. Setelah APEC 2018, sebagian besar khawatir tentang meningkatnya utang PNG ke Tiongkok. Hal ini tampaknya sangat beralasan menurut laporan 2021 oleh AidData, sebuah laboratorium penelitian di The College of William & Mary di A.S. Paparan utang PNG ke Tiongkok sebagai persentase produk domestik bruto adalah 17,2%, yang terdiri dari 11% utang tersembunyi (dari BUMN ke BUMN) dan 5,2% utang negara (dari pemerintah ke pemerintah). Laporan itu juga menemukan bahwa komitmen keuangan RRT terhadap PNG telah menurun setelah PNG bergabung dengan BRI, sesuai dengan analisis McMahon.

Temuan ini membingungkan tetapi juga menunjukkan pilihan bagi PNG. Terlepas dari masalah utang, jika BRI di PNG sebagian besar dibayar oleh sumber keuangan non-Tiongkok seperti ADB, hal ini dalam teori memberi PNG kebebasan yang lebih besar untuk mengamankan pembangunan yang dibutuhkan dengan biaya yang lebih rendah tanpa terikat pada RRT. Ada bukti yang berkembang bahwa memang demikian halnya, sebagai bagian dari tren lebih luas yang diidentifikasi oleh George Carter dan Stewart Firth sebagai "ketegasan Melanesia baru," dan oleh Greg Fry dan Sandra Tarte sebagai "Diplomasi Pasifik Baru."

Biaya Nonekonomi

Pemerintah PNG makin mengejar kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan RRT selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, Marape menolak memperpanjang sewa di tambang emas Porgera di provinsi Enga, yang 47,5% dimiliki oleh Zijin Mining Group Tiongkok. Belakangan tahun itu, Pengendali Pandemi PNG David Manning mengirim 180 pekerja Tiongkok dari BUMN terkemuka RRT di PNG kembali ke Tiongkok setelah menetapkan bahwa mereka adalah bagian dari uji coba vaksin rahasia Tiongkok. Pada tahun 2022, sebuah gugus tugas PNG antar lembaga menggerebek operasi penambangan MCC Ramu Nico milik Tiongkok, dan menemukan izin kerja dan visa 260 staf tidak sesuai. Yang paling penting, 10 mitra Pulau Pasifik Tiongkok menolak "Visi Pembangunan Bersama" RRT pada Pertemuan Menteri Luar Negeri kedua mereka pada Mei 2022. Ada juga reaksi terhadap kehadiran orang-orang Tiongkok oleh struktur kekuasaan suku dan pemerintah daerah yang bertindak untuk melindungi kepentingan mereka.

Dari perspektif Papua Nugini, BRI telah membawa hasil yang beragam. BRI telah menciptakan peluang untuk infrastruktur murah yang diproduksi dengan cepat, bersama dengan peluang perdagangan dan bisnis. Namun, pejabat PNG khawatir bahwa peluang tersebut hadir dengan risiko, frustrasi, dan biaya nonekonomi, seiring makin jelasnya maksud RRT. Ketika PNG menegosiasikan hubungannya dengan Tiongkok, pemerintahnya makin melihat BRI apa adanya: strategi geoekonomi yang menggunakan tata negara ekonomi untuk menyampaikan strategi besar Tiongkok. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang dirasakan BRI menimbulkan biaya nonekonomi. Itu bukan saling menguntungkan, meski dijual seperti itu. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengevaluasi opsi dalam mengupayakan kepentingan nasional PNG. ◻

Artikel ini diadaptasi dari "The Belt and Road comes to Papua New Guinea: Chinese Geoeconomics with Melanesian characteristics?" yang dipublikasikan di "Security Challenges," Vol. 16, No. 4, Geo-Economics in the Indo-Pacific (2020), halaman 41-64. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. Untuk melihat artikel lengkap, kunjungi https://www.jstor.org/stable/10.2307/26976257.

Di Ujung Selatan Thailand,Seniman Berusaha Mengubah 'Citra Kekerasan'

KISAH DAN FOTO OLEH BENAR NEWS

Pantai-pantai di provinsi Pattani, di jantung Ujung Selatan Thailand, masih asli tetapi sebagian besar sepi. Hampir tidak ada orang luar yang datang ke sini karena wilayah perbatasan yang mayoritas Muslim dan berbahasa Melayu ini identik dengan pemberontakan separatis bersenjata yang telah memanas selama beberapa dekade tanpa tanda-tanda akan berakhir.

Namun seniman dan penduduk kota Pattani, ibu kota provinsi dan pusat perdagangan garam yang telah lama ada di selatan jauh, berupaya mengubah citra negatif itu dengan menampilkan kekayaan warisan seni dan budaya di kawasan itu, yang berbeda dari daerah-daerah lain di Thailand.

"Kami ingin menceritakan kisah yang berbeda," kata Hadee Hamidong, penyelenggara Pattani Decoded, pertunjukan seni kreatif dan desain yang dimulai pada tahun 2019 tetapi harus ditunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. "Kami ingin mengubah citra kekerasan dan menunjukkan lapisan lain. Ada jauh lebih banyak hal di sini selain insiden tersebut. Ada masyarakat dan berbagai aspek kehidupan. Ada sejarah dan warisan yang telah berusia berabad-abad."

"Deep Salt" adalah tema dari pertunjukan seni 2022. Diadakan pada awal September, pameran ini menarik sekitar 30.000 orang di tempat-tempat di kota Pattani dan situs lainnya, termasuk sebuah tambak garam, kata Hadee. Kelompok lain, Patani Artspace, yang menyatukan 10 galeri, mengadakan festival seni paralel hingga November 2022 di kota-kota di Pattani dan provinsi lainnya di Ujung Selatan.

Seniman dan pematung Piraporn Pean menunjukkan karyanya dalam Pattani Decoded, yang memiliki tema "Deep Salt" pada tahun 2022.

Kota pesisir Pattani, yang menghadap ke Teluk Thailand, telah lama menjadi pusat panen garam dari laut dan pusat perdagangan untuk ekspor garam ke Tiongkok dan pasar luar negeri lainnya. Varietas yang ditemukan di sini dijuluki "garam manis" berkat rasanya yang lembut. Namun, tambak garam telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. "Ini kerja keras dan membutuhkan tanah, air, dan sinar matahari," kata Abdul Ka-bu, seorang petambak garam lokal yang menghadiri pameran "Deep Salt". "Kami tidak bisa bergantung padanya lagi seperti pada masa lalu."

Dalam satu video yang ditayangkan di pameran, seorang petambak garam lama mengeluh bahwa dia hanya menjual 10 karung pada tahun 2021, dibandingkan

dengan 500 hingga 600 karung yang dia jual beberapa tahun yang lalu. Ujung Selatan adalah salah satu daerah termiskin di negara itu. Di provinsi Pattani, tingkat kemiskinan adalah 34,2%, dibandingkan dengan 6% secara nasional, demikian menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2019.

Pameran yang diselenggarakan oleh Hadee juga menampilkan, antara lain, kerajinan tangan dan kaligrafi, pertunjukan musik, lukisan perahu, lukisan kain batik, dan demonstrasi kuliner. "Kami ingin mempromosikan identitas lokal, budaya lokal, warisan lokal, kostum lokal, dan pengetahuan lokal," kata Hadee, yang berasal dari Melayu Living, sebuah koperasi seniman yang berbasis di Pattani.

Salah satu karya yang ditampilkan, "Field Work" oleh arsitek-seniman Savinee Buranasilapin, menampilkan 600 cermin melingkar kecil, masing-masing dipasang pada batang baja yang ditanam di tengah dataran garam di Na Kluea Laem Nok, tepat di luar kota. Konsepnya adalah untuk mencerminkan masa lalu perdagangan garam Pattani ketika kapal dagang berlabuh di dekat lampu kota yang berkilauan.

Nattapon Pichairat, 40 tahun, seorang seniman dan perancang kain, menggambar tanaman yang ditemukan di sekitar tambak garam di atas kertas kemudian mencetaknya secara digital pada kain. "Saya memilih tanaman karena merupakan objek kecil indah yang membawa perasaan damai dan sukacita luar biasa … Saya ingin memberi tahu orang lain tentang alam dan keindahan Pattani dan daerah sekitar," ungkapnya, seraya menambahkan bahwa dia ingin "menata kembali kota sebagai pusat budaya."

Dalam "Le Sel de La Vie [Garam Kehidupan]," Emsophian Benjametha memamerkan barang keramik buatan tangan yang terinspirasi oleh "garam manis" Pattani dari proses produksi menuju destinasi. "Tanpa garam, tidak ada kehidupan. Tanpa kehidupan, tidak ada seni. Tanpa seni, tidak ada peradaban," kata perancang dan seniman berusia 43 tahun yang mendapatkan pelatihan di Prancis. "Semua orang disambut di Pattani, kota kecil dengan hati besar dan sejarah yang sangat panjang dan kaya. Bukan bom dan bahaya. Ada banyak hal baik di sini: kerajinan, desain, makanan, rumah-rumah tua."

Kawasan yang sekarang membentuk Ujung Selatan pernah menjadi jantung kerajaan Muslim yang mencakup beberapa provinsi tetangga. Inggris memberikan kawasan itu kepada Thailand, yang mencaploknya pada tahun 1909. Kelompok separatis telah melancarkan pemberontakan sejak tahun 1960-an.

Rueanglada Punyalikhit, seorang dosen di Universitas Silpakorn, mengatakan acara seperti "Deep Salt" membantu kawasan tersebut melepaskan citra kekerasannya. Sebagai bagian dari upaya itu, dia membantu wirausahawan lokal mengembangkan produk alami yang inovatif, termasuk herba, makanan, minuman, tekstil, dan kerajinan, yang terbuat dari bahan baku yang tersedia secara lokal. "Tidak dibenarkan bahwa hanya kekerasan yang mendefinisikan identitas Anda," kata Rueanglada. "Dari luar, situasinya tidak terlihat baik karena berita tentang kekerasan. Namun saat datang ke sini, Anda dapat melihat bahwa kehidupan di sini normal, dan tidak berbahaya seperti yang dipikirkan orang-orang."

"Tanpa garam, tidak ada kehidupan," kata seniman Emsophian Benjametha, yang barang-barang keramik buatan tangannya terinspirasi oleh perdagangan garam Pattani.

"Field Work," sebuah instalasi di pameran seni Pattani Decoded di Thailand pada September 2022, menampilkan 600 cermin melingkar kecil yang dipasang pada batang baja yang ditanam di tengah dataran garam untuk mencerminkan sejarah perdagangan kawasan itu.

Pattani Decoded juga menampilkan demonstrasi kuliner, pertunjukan musik, lukisan perahu, dan kegiatan lainnya yang mempromosikan budaya dan warisan setempat.

Perkenalkan **Kecoak Cyborg Jepang,** *Merayap ke Bencana di Dekat Anda*

KISAH DAN FOTO OLEH REUTERS

Jika gempa bumi terjadi dalam waktu dekat, menjebak korban selamat di bawah berton-ton puing, para penanggap pertama yang menemukan mereka bisa jadi adalah segerombolan kecoak cyborg. Itu adalah aplikasi potensial dari terobosan baru-baru ini oleh para peneliti Jepang yang menunjukkan kemampuan untuk memasang "ransel" sel surya dan elektronik pada serangga tersebut untuk mengontrol gerakan mereka dari jarak jauh.

Kenjiro Fukuda dan timnya di Thin-Film Device Laboratory di raksasa penelitian Jepang Riken mengembangkan film sel surya fleksibel yang tebalnya 4 mikron — sekitar 1/25 lebar rambut manusia — dan dapat dipasang di perut serangga. Film ini memungkinkan kecoak untuk bergerak bebas sementara sel surya menghasilkan daya yang cukup untuk memproses dan mengirim sinyal arah ke organ sensorik di tubuh bagian belakang serangga tersebut.

Karya ini melanjutkan eksperimen pengendalian serangga di Nanyang Technological University di Singapura dan dapat menghasilkan serangga cyborg yang dapat memasuki area berbahaya jauh lebih efisien daripada robot. "Baterai di dalam robot kecil habis dengan cepat, sehingga waktu eksplorasi menjadi lebih pendek," kata Fukuda. Manfaat utama dari serangga cyborg "adalah sehubungan dengan gerakan serangga, serangga itu menggerakkan dirinya, sehingga listrik yang dibutuhkan tidak sebegitu besar."

Fukuda dan timnya memilih kecoak mendesis Madagaskar untuk eksperimen karena cukup besar untuk membawa peralatan dan tidak memiliki sayap yang menghalangi. Bahkan ketika ransel dan film terpasang di punggung, serangga itu dapat melintasi rintangan kecil atau bangun sendiri ketika terbalik.

Penelitian ini masih harus menempuh jalan panjang. Dalam demonstrasi baru-baru ini, peneliti Riken, Yujiro Kakei, menggunakan komputer khusus dan sinyal Bluetooth untuk mengarahkan kecoak cyborg berbelok ke kiri, yang membuatnya merayap ke arah umum tersebut. Namun ketika diberi sinyal "kanan", serangga itu berputar-putar. Tantangan berikutnya adalah miniaturisasi komponen sehingga serangga dapat bergerak lebih mudah, serta sensor dan bahkan kamera dapat dipasang. Kakei mengatakan dia membangun ransel dengan suku cadang senilai 535 ribu rupiah (35 dolar A.S.) yang dibeli di distrik elektronik Akihabara yang terkenal di Tokyo.

Ransel dan film dapat dilepas, sehingga kecoak dapat kembali ke kehidupan di terarium laboratorium. Serangga tumbuh dewasa dalam empat bulan dan diketahui dapat hidup sampai lima tahun dalam penangkaran.

Selain serangga penyelamat bencana, Fukuda melihat aplikasi yang luas untuk film sel surya, yang terdiri dari lapisan mikroskopis plastik, perak, dan emas. Ini dapat dipasang ke dalam pakaian atau plester kulit untuk memantau tanda-tanda vital. Pada hari yang cerah, payung yang ditutupi dengan bahan tersebut dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk mengisi daya ponsel.

MEMBIDIK

VICTORIA GRANADO/GARDA NASIONAL ALASKA

B. Munkherdene membantu seorang pemanah muda menarik busur sebagai bagian dari festival Naadam tradisional — yang meliputi gulat, pacuan kuda, dan panahan — yang diadakan selama latihan Gobi Wolf multilateral di Bayankhongor, Mongolia, pada September 2022. Anggota dinas militer dan penanggap pertama dari Mongolia dan Angkatan Darat Pasifik Amerika Serikat, serta delegasi dari Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Britania Raya, dan Vietnam, berpartisipasi dalam pelatihan bantuan bencana dan kemanusiaan.

RELEVAN. BERWAWASAN. ONLINE.

www.ipdefenseforum.com

Indo-Pacific Defense FORUM disediakan secara GRATIS bagi para profesional militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA

DAFTAR SEKARANG:

www.ipdefenseforum.com/subscribe

surat:
IPD FORUM Program Manager
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

MOHON SERTAKAN:

- Nama
- Pekerjaan
- Jabatan atau pangkat
- Alamat surat
- Alamat email

SEKARANG DALAM 11 BAHASA!

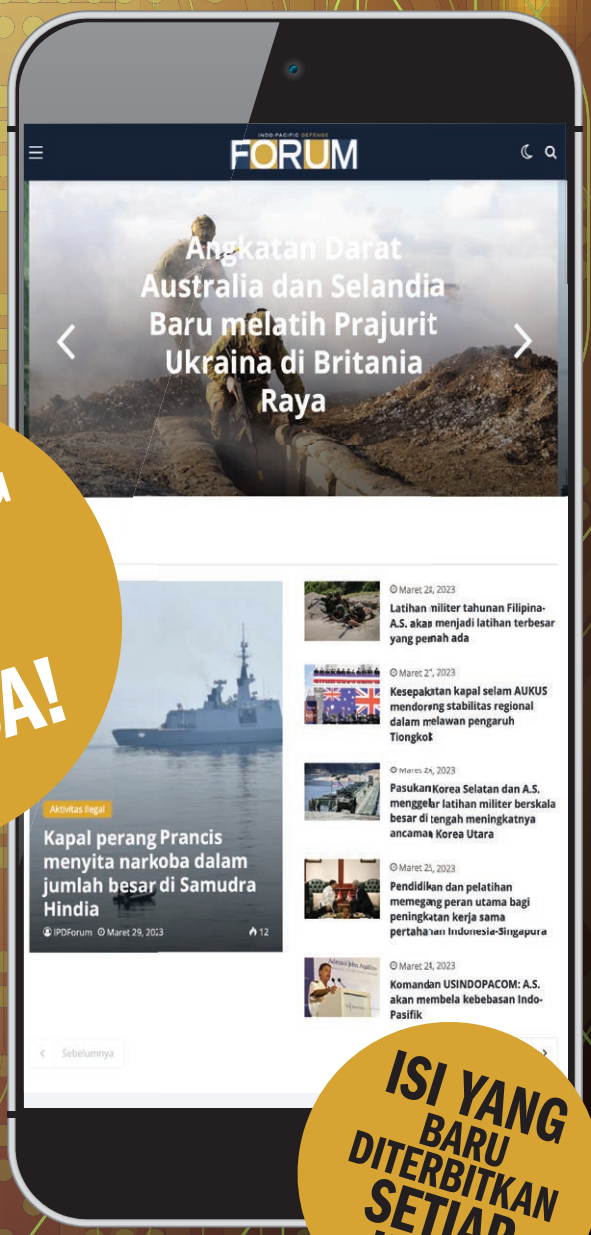

ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI!

BERGABUNGLAH DENGAN KAMI SECARA ONLINE DAN DI MEDIA SOSIAL!

MARI BERGABUNG DENGAN KAMI DI FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, WHATSAPP: @IPDEFENSEFORUM, DAN LINE: @330WUYNT

Semua platform mungkin tidak tersedia di setiap lokasi.